

Better Policies Better Lives™



PENTINGNYA PENGETAHUAN LOKAL!

Kekuasaan, Konteks dan
Pembuatan Kebijakan di Indonesia

Kharisma Nugroho, Fred Carden dan Hans Antlov




PENTINGNYA PENGETAHUAN LOKAL!

Kekuasaan, Konteks dan
Pembuatan Kebijakan di
Indonesia

Kharisma Nugroho, Fred Carden dan Hans Antlov





Pentingnya Pengetahuan Lokal! Kekuasaan, Konteks dan Pembuatan Kebijakan di Indonesia

Kharisma Nugroho, Fred Carden dan Hans Antlov

Foto halaman sampul:

Armin Hari

Pandangan penulis yang diungkapkan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan pemerintah Australia, pemerintah Indonesia, atau Knowledge Sector Initiative. Semua entitas di atas tidak menerima pertanggungjawaban apa pun atas akibat yang timbul dari publikasi ini.

Daftar Singkatan	vi
Prakata	
Dr. Leonard VH Tampubolon	
Deputi Menteri bidang Ekonomi, Kementerian Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).....	vii
Kata Pembuka	x
Bab 1. Pendahuluan: Pengetahuan lokal penting!	1
Pengetahuan di dalam proses kebijakan	8
Jenis-jenis pengetahuan dalam proses kebijakan.....	14
Hirarki Pengetahuan	18
Sektor Pengetahuan di Indonesia	25
Pengetahuan Lokal dalam Pembuatan Kebijakan di Indonesia.....	26
Ragangan Buku Ini	29
Bab 2. Bentuk-bentuk pengetahuan dan pengaruh kebijakan	33
Jenis-jenis pengetahuan dalam pembuatan kebijakan	34
Tipologi pengetahuan	36
Interaksi antara sumber pengetahuan: pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat	45
“Pengetahuan ke Kebijakan” dan pengetahuan lokal	46
Kesimpulan	48
Bab 3. Pengetahuan lokal dalam pembuatan kebijakan demokratis	51
Kajian mengenai makna dan pengetahuan lokal	52

Pengambilan kebijakan publik, kekuatan birokrasi dan pengetahuan lokal	54
Bekerja secara Politis	57
Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Partisipatif	62
Kesimpulan	67
Bab 4. Cerita tentang Pengetahuan Lokal	69
Studi Kasus 1: Air bersih untuk semua – Perkumpulan Pikul	69
Studi Kasus 2: ‘Baleo! Baleo! Baleo!’ – Poros Photo	73
Studi Kasus 3: <i>Pranata Mangsa</i> : Ketika pengetahuan tradisional bertemu dengan sains – Pusat Kajian Antropologi, Universitas Indonesia (PUSKA UI)	76
Studi Kasus 4: Kedaulatan menangkap ikan di <i>sasi lompa</i> , Haruku – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta	80
Studi Kasus 5: Sungai yang membawa kehidupan di kota – Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3), Banjarmasin, Kalimantan Selatan	84
Studi Kasus 6: Kearifan menghindarkan bencana di Jawa Tengah – <i>Bandung Institute for Governance Studies</i> (BIGS)	88
Studi Kasus 7: Menghidupkan kembali <i>Keujruen Blang</i> – Pusat Kajian dan Pendidikan Masyarakat (PKPM), Aceh	91
Studi Kasus 8: Anugerah dari <i>mawah</i> – Yayasan Kemaslahatan Umat (YKU), Aceh Besar	94
Studi Kasus 9: Tanpa kompromi di Torong Besi – Pusat Studi Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (POLGOV UGM)	96
Studi Kasus 10: Asuransi tradisional – Lembaga Advokasi HIV/AIDS (LAHA)	99
BAB 5. Kemunculan dan perkembangan pengetahuan lokal	103
Berkembangnya pengetahuan lokal	103
Interaksi dan adaptasi dengan lingkungan sekitar	106
Interaksi antara bentuk-bentuk pengetahuan	110

Lokalitas dan asal usul	113
Kondisi politik-ekonomi untuk melahirkan dan mengelola pengetahuan lokal	118
Metode dan instrumen untuk mengkodifikasi informasi dan pengetahuan.....	123
Metode dan instrumen untuk mengelola informasi dan pengetahuan.....	128
Kesimpulan	133
Bab 6. Memanfaatkan pengetahuan lokal dalam penyusunan kebijakan	137
Bagaimana pengetahuan lokal dikomunikasikan?	137
Siapa yang harus dipengaruhi	146
Konteks politik dalam perubahan dari pengetahuan lokal menjadi kebijakan	150
Pengaruh berbasis hubungan	150
Pengetahuan lokal sebagai aset pilkada	152
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang penerapan kebijakan	154
Bab 7. Kesimpulan: Memperbaiki kebijakan publik dengan memanfaatkan aset lokal.....	159
Aset pengetahuan dan strategi	163
Peran baru, aturan baru.....	167
Melangkah maju: kesempatan yang setara	169
Pustaka	174

Daftar Singkatan

AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BIGS	Bandung Institute of Governance Studies
BPJS Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
JATAM	Jaringan Advokasi Tambang
KSI	<i>Knowledge Sector Initiative</i>
LAHA	Lembaga Advokasi HIV/AIDS
LK3	Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Banjarmasin
MAA	Majelis Adat Aceh
P3A	Perkumpulan Petani Pemakai Air
PAMSIMAS	Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PATTIRO	Pusat Telaah dan Informasi Regional, Jakarta
PKPM	Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat, Aceh
POLGOV UGM	Pusat Penelitian Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
PUSKA UI	Pusat Kajian Antropologi, Universitas Indonesia
Rp.	Rupiah
UGM	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
UI	Universitas Indonesia, Jakarta
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
YKU	Yayasan Kemaslahatan Ummat, Aceh



Prakata

Dr. Leonard VH Tampubolon
Deputi Menteri bidang Ekonomi, Kementerian
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas)

Kemajemukan adalah keniscayaan bagi Indonesia mengingat latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Sebagai realitas sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, kemajemukan ini tidak harus dimaknai sebagai kelemahan yang menjadikan Indonesia rentan konflik dan disintegrasi, sebaliknya dapat dijadikan modal dasar untuk mendorong tumbuh-kembang Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dan unggul. Semua elemen masyarakat majemuk di Indonesia harus dapat membangun relasi sosial yang harmonis, memperkuat kohesi, serta mengutamakan persamaan—bukan mengeksploitasi perbedaan—untuk mewujudkan persatuan dan keutuhan Indonesia dengan semboyan: Bhinneka Tunggal Ika.

Kebajikan, pengetahuan dan aspirasi dari masyarakat lokal yang begitu dalam dan tersebar seharusnya menjadi dasar untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Namun sayangnya kebijakan tidak selalu berbasis kebajikan. Harta karun pengetahuan dari masyarakat lokal yang memberikan makna tentang pentingnya sebuah konteks dalam siklus perencanaan tidak selalu dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan. Rujukan kebijakan sebagian besar berasal dari kajian akademis yang seringkali tidak memperhitungkan konteks lokal dan relevansinya dengan kebijakan yang sedang dikaji.

Evaluasi sementara RPJMN 2015-2019 yang dilakukan Bappenas 2016

dibidang perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa dua permasalahan kunci yang menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya penyerapan belanja pemerintah dan melambatnya aktivitas sektor swasta; dan dua hal ini terkait dengan hambatan struktural pelaksanaan kebijakan di instansi teknis dan daerah. Pengalaman empiris dari tersendatnya beberapa program unggulan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur (jalan tol Manado-Bitung misalnya) juga menunjukkan pentingnya kita untuk memperhatikan tahapan pelaksanaan dilapangan untuk suksesnya sebuah ikhtiar pembangunan.

Bappenas menyambut baik terbitnya buku ini karena sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan untuk memahami peran pengetahuan lokal dalam tahapan-tahapan kritis dalam siklus pembangunan, terutama dalam tahapan pelaksanaan kebijakan seperti telah diuraikan diatas. Kedua, buku ini juga merepresentasikan kerjasama yang baik antara masyarakat sebagai yang empunya pengetahuan, organisasi lokal sebagai pengolah dan pengrajin pengetahuan lokal, dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan publik di wilayahnya masing-masing. Buku ini juga mencerminkan kemitraan antara pemerintah Indonesia (Bappenas) dan pemerintah Australia (DFAT) dalam penguatan proses kebijakan yang berbasis pengetahuan di Indonesia.

Keunggulan buku ini adalah pada penyajian dan pengolahan sepuluh studi kasus mengenai kaitan antara diskursus praktis dan kebijakan sosial, bagaimana pengetahuan lokal diproduksi, dikomunikasikan, dan digunakan untuk mempengaruhi keseluruhan siklus kebijakan. Ditambah dengan rujukan pada literatur yang kaya, buku ini mengajak kita untuk meninjau kembali kasta jenis pengetahuan yang seringkali kita konstruksikan untuk menilai tingkat kehandalan suatu pengetahuan dalam proses pengambilan kebijakan. Melalui penyajian bukti empiris dalam siklus kebijakan di dunia nyata, penulis mampu meyakinkan kita apa arti sebenarnya proses *knowledge to policy*, siapa yang terlibat dan bagaimana pengetahuan lokal bisa efektif dalam mempengaruhi proses

pengambilan kebijakan publik.

Hipotesis utama dalam buku ini yang menarik untuk didalami adalah bahwa kebijakan pembangunan akan lebih efektif jika merujuk pada berbagai jenis pengetahuan, baik pengetahuan yang dihasilkan dari kalangan akademis, dari kaum profesional, dan pengetahuan lokal. Kebudayaan harus menjadi salah satu modal berharga yang berkontribusi pada pembangunan nasional, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara kebudayaan dan pembangunan. Dengan rujukan yang komprehensif ini, sebuah kebijakan pembangunan akan lebih efektif karena sudah mengantisipasi kelaikan teknis, dinamika politis dan dimensi sosial-budaya kemasyarakatan sebagai lokus dan sasaran akhir pembangunan. Prinsip ini penting dan sangat relevan untuk konteks pembangunan di Indonesia yang sangat beragam. Bappenas berharap agar buku ini dapat berkontribusi untuk mempromosikan penggunaan pengetahuan lokal dalam pembuatan kebijakan di Indonesia



Kata Pembuka

Pada akhir 2014, Knowledge Sector Initiative (Indonesia) menyelenggarakan sayembara penelitian dengan mengundang proposal untuk mengkaji kasus-kasus yang menggunakan pengetahuan lokal untuk mempengaruhi kebijakan publik. Ada respon yang luar biasa terlihat dari 500 lebih proposal yang diajukan. Saat itu kami menyadari bahwa ini adalah bidang yang belum banyak digali dan diteliti terkait dengan peran pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan. Kami memiliki dana hanya untuk sepuluh pilot jadi kami melakukan seleksi dengan hati-hati dan hanya memilih yang terbaik. Proposal terpilih datang dari berbagai bidang dan kelompok budaya, ekonomi politik, dan wilayah geografis di Indonesia.

Dalam suatu konferensi di LIPI pada bulan April 2016, para peneliti menyampaikan studi kasus mereka ke khalayak luas pembuat kebijakan, peneliti dan organisasi masyarakat sipil. Mereka presentasikan kasus yang menarik bahwa pengetahuan bukan hanya studi ilmiah yang dilakukan, tetapi cerita-cerita pengetahuan lokal yang didokumentasikan dengan baik dan dikomunikasikan dengan baik juga sehingga menghasilkan data yang dapat dan memang perlu digunakan oleh pembuat kebijakan untuk implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini diakui oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mengutip contoh positif dari penggunaan pengetahuan lokal dalam pembangunan jalan di Sulawesi Utara. Seorang birokrat senior di konferensi LIPI menantang salah satu tim peneliti bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki data untuk mendukung temuan mereka. Tim peneliti dengan sangat meyakinkan menyatakan bahwa foto yang mendokumentasikan pengetahuan lokal merupakan sumber pengetahuan, yaitu bahwa setiap foto memuat banyak titik data (*data point*) yang membantu kita untuk memahami dan

mengkomunikasikan pengetahuan lokal dengan cara yang dapat menjangkau pembuat kebijakan. Mitra lain menunjuk pada jenis data lain seperti penggunaan drama, lagu, dan cerita rakyat. Hal seperti yang membuat kami kemudian menyadari bahwa kita memiliki harta yang luar biasa: sekumpulan kasus tentang bagaimana pengetahuan lokal memainkan peran dalam proses kebijakan dan bagaimana bentuk-bentuk pengetahuan lain ini dapat membantu menciptakan usulan kebijakan. Sementara banyak peneliti kebijakan dan akademisi mencatat pentingnya bentuk pengetahuan lain dalam proses kebijakan, dan hanya sedikit yang menggunakan sumber data kasus yang empiris, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu buku ini disusun.

Kami sangat berhutang budi kepada para peneliti dan lembaga yang mengembangkan studi kasus dan terlibat dalam dialog mengenai peran pengetahuan lokal dalam pembuatan kebijakan. Kami berterima kasih kepada tim-tim dari Perkumpulan PIKUL di Nusa Tenggara Timur; Poros Photo, untuk karyanya di Nusa Tenggara Timur; PUSKA-UI–Pusat Kajian Antropologi di Universitas Indonesia, untuk studinya di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat; PATTIRO–Pusat Studi dan Informasi Regional, di Maluku Tengah; LK3-- Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, di Kalimantan Selatan; BIGS--Bandung Institute of Governance Studies, untuk pekerjaan mereka di Jawa Tengah; PKPM-Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat, di Aceh; YKU–Yayasan Kemaslahatan Ummat, di Aceh; POLGOV-UGM–Pusat Penelitian Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, untuk pekerjaan mereka di Nusa Tenggara Timur; dan LAHA–Lembaga Advokasi HIV/AIDS, di Sulawesi Tenggara.

Kami terutama ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan lembaga pemerintah yang membantu para mitra kami menyelesaikan studi mereka sebagai upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Proses penulisan buku sangat difasilitasi oleh kejelasan dan tingkat detail dalam kasus-kasus tersebut yang memungkinkan kami mengidentifikasi masalah-masalah yang kami sajikan dalam bab-bab di buku ini.

Kami juga berhutang budi kepada peserta di konferensi LIPI, dimana

peneliti mempresentasikan temuan mereka. Minat dan tanggapan peserta telah memicu lahirnya gagasan bahwa kasus-kasus ini memerlukan lebih banyak analisis dan harus mencakupi khalayak yang lebih luas. Kami berharap buku kami dapat mendorong terhimpunnya lebih banyak dana dan dukungan untuk melihat bagaimana semua bentuk pengetahuan dapat bersama-sama menciptakan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung pembangunan sosial, dan bahwa pejabat publik di tingkat nasional dan daerah dapat lebih menghargai pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat.

Sudah sepatutnya pula kami menyampaikan penghargaan tulus kami untuk dukungan dari Bappenas dan Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), yang bersama-sama telah memberi arahan bagi proyek Knowledge Sector Initiative ini dan mendorong terlaksananya gagasan skema hibah dan penulisan buku ini. Dan tentu saja, kami berterima kasih kepada RTI International, pelaksana proyek KSI untuk dukungan mereka dalam upaya ini. Kami berterima kasih kepada tiga *reviewer* anonim di buku versi Bahasa Inggris yang komentarnya telah menyempurnakan draf awal buku ini secara signifikan. Terakhir, yang juga tidak kalah penting, kami ingin berterima kasih kepada tim editorial dari Policy Press di Universitas Bristol untuk dorongan dan dukungan mereka dalam penerbitan edisi Bahasa Inggris. Sekiranya masih ada kesalahan dalam buku ini, semuanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

KN, FC, HA
Bangkok, Ottawa, Jakarta
15 September 2018

Pendahuluan: Pengetahuan lokal penting!

‘Masalah pengetahuan adalah banyak buku tentang burung yang ditulis oleh pakar burung daripada buku tentang burung yang ditulis oleh burung atau buku tentang pakar burung yang ditulis oleh burung.’

(Naseem Nicholas Taleb, 2010: 77)

Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan 300 kelompok etno-linguistik, memiliki berlimpah sumber pengetahuan yang dihasilkan dan dikomunikasikan di luar kerangka formal lembaga penelitian. Pengetahuan lokal memperkaya pembuatan kebijakan dengan menyediakan konteks dan memperkuat penentuan sasaran (*targeting*). Pengetahuan lokal dapat menyalurkan bentuk pengetahuan baru kepada pembuat kebijakan di tingkat daerah dan dapat merevitalisasi budaya tradisional dan cara-cara kebudayaan daerah ini diekspresikan. Sayangnya, kita sering lebih percaya bahwa penelitian ilmiah lebih penting untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dalam buku ini kami akan menunjukkan bahwa mengabaikan pengetahuan lokal adalah sebuah kesalahan, karena pengetahuan lokal dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di tingkat baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Tanpa pengetahuan lokal, ilmiah tidak akan efektif mempengaruhi kebijakan. Ada ketidaksepakatan yang luas tentang penggolongan berbagai jenis pengetahuan (Agrawal, 1995; Briggs, 2005). Kami meninjau dan mengambil posisi pada jenis penggolongan yang berfokus untuk membawa pengetahuan lokal tampil

ke permukaan dalam proses kebijakan. Buku ini berusaha mengidentifikasi bagaimana pengetahuan lokal telah dikembangkan dan digunakan dalam proses kebijakan di Indonesia, dan menempatkan pengetahuan lokal bersama dan setara dengan bentuk-bentuk pengetahuan lain yang mempengaruhi kebijakan publik. Hipotesis kami adalah bahwa upaya mendorong kebijakan publik yang berbasis bukti akan lebih efektif jika semua bagian dari sektor pengetahuan secara aktif terlibat; dan bahwa sektor pengetahuan yang efektif menghasilkan pengetahuan untuk kebijakan akan tercapai jika semua elemen dalam sektor pengetahuan saling terhubung dan berinteraksi secara progresif. Sektor pengetahuan¹ yang berkelanjutan didasarkan pada penelitian yang berkualitas tinggi, yang hasilnya dikontekstualisasikan dengan kondisi lokal, dan yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pembuatan kebijakan publik. Untuk mengembangkan pilihan kebijakan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang sedemikian kompleks seperti di Indonesia, pemerintah memerlukan akses ke data yang semakin canggih dan analisis menyeluruh dan mendalam dari berbagai sumber untuk mendukung pembuatan kebijakan. Di samping itu, proses demokratisasi juga telah meningkatkan tuntutan masyarakat sipil untuk keterbukaan yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan, dan desentralisasi memberi pemerintah daerah ruang untuk bereksperimen dengan solusi kebijakan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Situasi demikian membuka peluang penting untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam proses kebijakan.

Buku ini merupakan upaya untuk mendokumentasikan penggunaan pengetahuan lokal dalam proses kebijakan di Indonesia dan kami berharap buku ini akan berguna bagi para praktisi yang berusaha memahami dan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam ikhtiar mereka untuk mempengaruhi kebijakan. Pada tahun 2014, Program

1 Yang secara praktis didefinisikan sebagai “bentang kelembagaan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil yang menyediakan hasil penelitian dan analisis untuk penyusunan kebijakan publik” (AUSAID, 2012, p iii).

*Knowledge Sector Initiative (KSI)*² yang berbasis di Jakarta mulai mengeksplorasi pengetahuan lokal dan bagaimana bentuk-bentuk pengetahuan alternatif dapat mempengaruhi dan memperkaya kebijakan publik. Kami mendefinisikan ‘pengetahuan lokal’ sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam komunitas atau organisasi tertentu yang diakumulasi dari waktu ke waktu melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sosial dan alam di sekitar mereka. Pengetahuan lokal sering berhubungan dengan subjek yang sama dengan penelitian ilmiah. Namun, pengetahuan lokal memiliki perspektif, makna dan pemahaman yang berbeda yang didasarkan pada konteks lokal dan dibentuk oleh interaksi manusia dengan lingkungan fisik di sekitarnya.

Sebuah skema hibah penelitian kompetitif diumumkan pada akhir tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memahami peran organisasi lokal dalam menghasilkan pengetahuan lokal, bagaimana mereka menyalurkan pengetahuan alternatif kepada pembuat kebijakan lokal, mekanisme yang mereka gunakan dan kendala serta peluang yang mereka hadapi. Hal ini dilakukan untuk menangkap dan mempromosikan inovasi dalam proses transformasi pengetahuan-menjadi-kebijakan untuk mendorong munculnya berbagai pemain, keragaman ide, dan sarana baru guna menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan. Inovasi juga diharapkan bisa menciptakan ruang untuk dialog atau koalisi aktor-aktor pengetahuan yang baru terkait isu-isu kebijakan publik yang strategis. Skema hibah ini menysasar organisasi masyarakat sipil di Indonesia, organisasi berbasis

-
- 2 Program Knowledge Sector Initiative-KSI (www.ksi-indonesia.org/in/home) adalah sebuah kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dengan menggunakan penelitian, data, dalam membuat analisis yang lebih baik. Untuk mencapai ini, KSI menggunakan pendekatan sistem dalam cakupan yang luas, yaitu mencakup penguatan penyediaan hasil penelitian yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebijakan (*supply*), memperkuat kebutuhan akan bukti oleh pembuat kebijakan (*demand*), dan kemampuan untuk mengkomunikasikan bukti secara efektif di dalam proses pembuatan kebijakan (*intermediary*), serta mengatasi hambatan-hambatan struktural yang membuat ketiga elemen ini tidak berfungsi secara efektif (*enabling environment*). Ketiga penulis buku ini bekerja di Program KSI pada saat program ini diluncurkan.

masyarakat, lembaga penelitian kebijakan, dan pusat penelitian berbasis perguruan tinggi yang mempunyai pengalaman langsung dalam penggunaan pengetahuan lokal dalam proses kebijakan publik.

Buku ini didasarkan pada 10 studi kasus yang dipilih secara kompetitif dari sedikitnya 500 proposal yang diterima dari skema hibah ini. Tanggapan yang luar biasa ini menunjukkan minat dan kebutuhan akan dukungan bagi penelitian tentang pengetahuan lokal. Kasus-kasus ini dipresentasikan pada sebuah konferensi di Jakarta pada bulan April 2016, dan kemudian digubah menjadi buku ini oleh para penulis, yang semuanya bekerja di KSI pada saat itu.

10 studi kasus (disajikan secara lebih rinci dalam Bab 4 hingga 6) adalah:

ORGANISASI/ TEMPAT	TUJUAN KEGIATAN	
Perkumpulan PIKUL Timor, Nusa Tenggara Timur	Untuk mengeksplorasi cara-cara efektif dalam melakukan pengelolaan air berbasis masyarakat	Penelitian partisipatif dan dokumentasi untuk mempelajari pengelolaan sumberdaya air berbasis masyarakat di pulau Timor yang mampu mempertahankan pendekatan tradisional dan modern. Syarat mencapai keberhasilan pengelolaan sumberdaya air dari masyarakat dipetakan melalui kegiatan ini yang juga merupakan contoh nyata bagaimana sumberdaya telah berhasil dikelola dengan baik.

Poros Photo Lembata, Nusa Tenggara Timur	Untuk melakukan studi etnografi visual guna meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Nusa Tenggara Timur	Mendokumentasikan dan mensistematisasi cakupan kearifan lokal berbasis desa di kalangan masyarakat nelayan ikan paus di pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan bagaimana mereka terkait dengan kebijakan sosial dan program pemerintah daerah.
PUSKA UI (Pusat Kajian Antropologi, Universitas Indonesia) Indramayu, Jawa Barat dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	Untuk meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan empiris tradisional petani untuk merespon perubahan iklim dengan lebih baik	Para pembuat kebijakan bahwa, di tengah perubahan iklim yang sedang berlangsung, pentingnya menggabungkan pengetahuan tradisional petani dengan pembelajaran agro-meteorologi. Studi ini juga mendokumentasikan bagaimana pengetahuan ilmiah dan lokal saling melengkapi satu sama lain.
PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) Haruku, Maluku Tengah	Untuk meningkatkan kontribusi pengetahuan lokal dalam kebijakan terkait sumberdaya maritim	Tradisi <i>sasi</i> yaitu praktik berbagi sumberdaya dalam pengelolaan sumberdaya maritim di Maluku Tengah. <i>Sasi</i> adalah tradisi pengetahuan lokal masyarakat adat di pulau Maluku yang memanfaatkan sumberdaya alam dan menjaga kelestarian lingkungan.

LK3 (Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan) Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Untuk merevitalisasi budaya konservasi sungai guna beradaptasi dengan perubahan iklim melalui advokasi kebijakan dan pembangunan perkotaan	Mendorong dan mendukung pemerintah Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan untuk mempertimbangkan pelestarian sungai dan budaya sungai melalui kebijakan revitalisasi sungai, untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi budaya sungai. Studi ini juga mendokumentasikan hubungan antara pengetahuan agama dan pengetahuan tradisional.
BIGS (<i>Bandung Institute for Governance Studies</i>) Kendal, Jawa Tengah	Untuk mempromosikan pengetahuan lokal yang relevan untuk konservasi Hutan Gunung Pakis di Kendal, Jawa Tengah	Memahami peran pengetahuan lokal yang digunakan dalam konservasi hutan berbasis masyarakat di masyarakat yang tinggal di hutan pegunungan, dan untuk membangun konservasi hutan masyarakat berdasarkan pengetahuan lokal.
PKPM (Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat) Aceh Besar, Aceh	Untuk merevitalisasi nilai-nilai lokal dan peran Keujruen Blang, lembaga tradisional di Aceh Besar	Mengidentifikasi nilai-nilai lokal di masyarakat petani di Kabupaten Aceh Besar melalui studi tentang keberadaan, peran dan fungsi aktor adat dan institusi Keujruen Blang, serta mekanisme tradisional dalam pembagian sumberdaya.

YKU (Yayasan Kemaslahatan Ummat) Aceh Besar, Aceh	Untuk melakukan studi tentang peran mekanisme keuangan tradisional <i>mawah</i> dalam mendukung mata pencaharian masyarakat rentan di Aceh Besar	Menganalisis keunggulan komparatif dari sistem bagi hasil tradisional (<i>mawah</i>) dan bagaimana sistem ini dapat berkolaborasi dengan layanan keuangan formal dan informal lainnya yang ada di masyarakat pedesaan di Kabupaten Aceh Besar.
POLGOV UGM (<i>Research Centre for Politics and Government, University of Gadjah Mada, Yogyakarta</i>) Belu and Manggarai, Nusa Tenggara Timur	Untuk memperkuat pengetahuan lokal dalam mengelola sumberdaya alam menggunakan studi kasus penolakan petani terhadap pertambangan	Untuk menjembatani, mendorong dan memberdayakan pengetahuan lokal yang digunakan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya ekstraktif. Kegiatan ini memfasilitasi dan mendokumentasikan beberapa mekanisme lokal yang digunakan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya.

LAHA (Lembaga Advokasi untuk HIV/AIDS) Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	Untuk mengembangkan model asuransi berbasis masyarakat menggunakan pengetahuan lokal dari Sulawesi Tenggara	Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat melalui sistem asuransi tradisional yang terinspirasi oleh nilai-nilai lokal di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Rencana jangka panjang adalah membentuk Badan Manajemen Asuransi Kesehatan berbasis masyarakat.
---	---	--

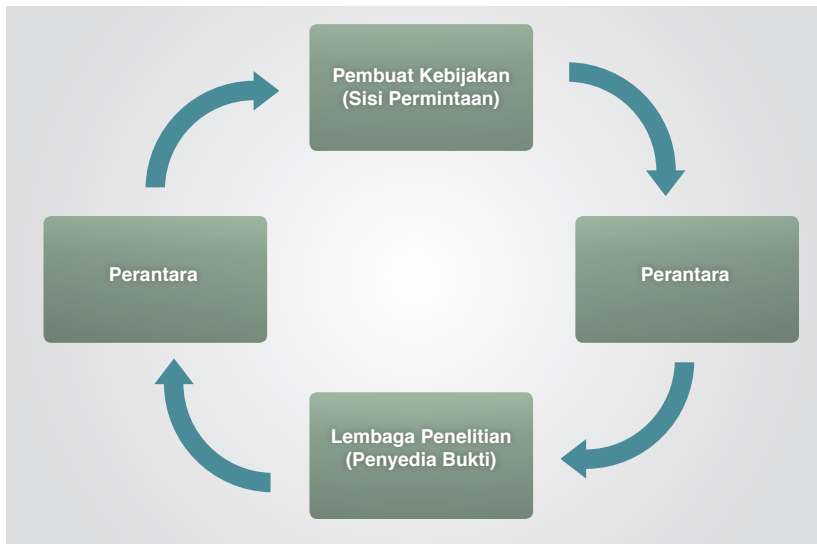
Buku ini didasarkan pada pengalaman pribadi dan riwayat keahlian para penulisnya, digabungkan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui 10 studi kasus yang disebutkan diatas. Kasus-kasus tersebut sangat beragam, baik lokasi maupun isinya. Ada yang dari Aceh, Jawa, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan Maluku (lihat Peta di halaman berikutnya). Kasus-kasus ini membahas pengelolaan hutan, sumberdaya air, manajemen sumberdaya maritim, layanan keuangan, penolakan terhadap penambangan, dan topik masyarakat lainnya. Kasus-kasus ini menyajikan bentuk-bentuk pengaruh di berbagai ranah. Kita akan belajar tentang manfaat pendokumentasian praktik-praktik tradisi pengelolaan hutan dalam mengurangi erosi, upaya untuk merevitalisasi tradisi budaya sungai, dan pentingnya puisi dan lagu dalam mendidik masyarakat tentang konservasi dan pelestarian.

Pengetahuan di dalam proses kebijakan

Buku ini akan dimulai dengan sedikit penjelasan mengenai apa yang kami maksud dengan proses kebijakan dan pembuatan kebijakan berbasis bukti, yang terkait dengan konteks yang lebih luas yaitu hubungan pengetahuan dalam pembuatan kebijakan (Pawson, 2006; Carden, 2009; Cartwright dan Hardie, 2012). Penggambaran yang paling umum dari proses “pengetahuan-menjadi-kebijakan” (“knowledge-to-



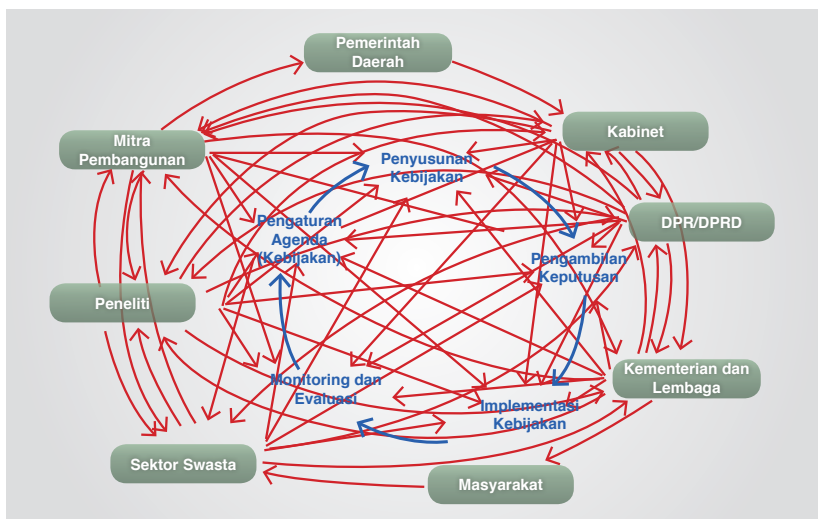
policy”) ini adalah sebagai suatu siklus (lihat Gambar 1) dan di dalamnya ada para pembuat kebijakan yang membutuhkan bukti; perantara-analis kebijakan, lembaga penelitian kebijakan – yang menyusun pertanyaan penelitian; jika diperlukan penelitian baru, peneliti akan memproduksinya, jika tidak mereka menyediakan perantara dengan bukti; dan perantara pada gilirannya menafsirkannya kembali ke pembuat kebijakan dengan cara mereka dapat menggunakannya untuk tujuan khusus mereka. Kadang-kadang hubungan langsung dapat dibuat antara peneliti dan pembuat kebijakan, tetapi model yang lebih umum menggunakan perantara, dan ini sebetulnya mencerminkan ketidakmampuan di kalangan peneliti untuk berkomunikasi secara efektif dengan para pembuat kebijakan.



Gambar 1. Siklus sederhana pengetahuan-menjadi-kebijakan

Namun, dalam kenyataannya, prosesnya tidak sederhana, dan bukan merupakan siklus yang rapi. Banyak faktor politik, sosial dan ekonomi ikut berperan, dan jarang ada pengaruh langsung dan murni dari pengetahuan terhadap kebijakan. Gambar 1 mengasumsikan bahwa permintaan berasal dari pembuat kebijakan, sementara peneliti memenuhi permintaan dan orang dengan keterampilan mediasi dan komunikasi memastikan pembuat kebijakan mengerti sehingga mereka dapat menggunakan bukti. Ini adalah model yang mengabaikan sebagian besar faktor eksternalitas: apakah bukti itu mengganggu relasi kuasa pembuat kebijakan? Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan partai politik yang sedang berkuasa? Penelitian mengenai isu kebijakan seringkali menunjukkan bahwa masalah kebijakan “ditemukan” melalui penelitian terlebih dahulu dan kemudian dibawa ke proses kebijakan, namun demikian, hal-hal yang mempengaruhi proses kebijakan tidak hanya hasil penelitian yang bersangkutan. Ada banyak titik pijak yang perlu diperhitungkan dalam menilai sejauhmana pengaruh sebuah bukti

terhadap proses pembuatan kebijakan (Carden, 2009). Lebih lanjut, model sederhana ini mengasumsikan serangkaian hubungan yang bersih dan sederhana, padahal sebenarnya sering ada banyak aktor yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perantara yang menafsirkan mungkin juga memiliki bukti dan kepentingan untuk menampilkan diri; masyarakat lokal, seperti halnya birokrat, pemimpin agama dan lain-lain juga memiliki pengetahuan.



Gambar 2. Siklus pengetahuan-ke-kebijakan ditinjau kembali. Digunakan dengan izin dari Overseas Development Institute (ODI).

Walaupun kerumitan ini semakin hari semakin disadari, masih ada kecenderungan untuk menerima asumsi dasar bahwa pengetahuan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik adalah pengetahuan ilmiah. Kami berangkat dengan suatu ikhtiar untuk menunjukkan bahwa ini adalah pandangan sempit yang mengabaikan realitas mengenai bagaimana pengetahuan dihasilkan dan digunakan. Tanpa memandang pengetahuan secara lebih luas seperti ini, pengetahuan ilmiah dapat jatuh di telinga yang tidak bisa mendengar. Proses kebijakan bukanlah proses yang rapi

dan bersih seperti Gambar 1. Sebaliknya, prosesnya lebih tidak beraturan seperti Gambar 2., dimana didalamnya terlihat banyak aktor dengan beberapa proposisi nilai dan basis pengetahuan yang berbeda yang saling berinteraksi dalam proses yang pada akhirnya mengarah pada perumusan kebijakan.

Ini berarti bahwa peran bukti dan pengetahuan tidak hanya (atau terutama) terkait pada proses teknis. Dalam proses teknis, seperti membangun jembatan, pengetahuan tentang konstruksi dan keselamatan jembatan mempengaruhi desain dan proses konstruksi secara langsung. Pengetahuan yang diterapkan pada proses kebijakan sangat berbeda. Alih-alih berdiri di atas kelebihannya sendiri, pengetahuan harus berinteraksi dan bersaing dengan nilai-nilai politik dan keyakinan budaya. Seperti ditulis oleh Parkhurst (2017: 66), 'dengan memandang pembuatan kebijakan sebagai sesuatu yang ditentukan oleh persaingan atas kepentingan dan keyakinan, dan memahami proses kebijakan sebagai arena tempat terjadinya persaingan kepentingan, maka pemahaman kita atas apa yang disebut sebagai bukti akan berbeda secara fundamental (sisi politis dari bukti). Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa kita 'seharusnya tidak terkejut ketika suatu bukti dimanfaatkan oleh suatu kelompok kepentingan yang mendorong suatu kebijakan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka. Hal seperti ini bukan suatu fenomena yang mengejutkan atau dianggap sebagai suatu hal yang menyimpang'. (Parkhurst, 2017: 67). Pengetahuan digunakan (sering secara selektif) untuk mendukung suatu pendapat atau sudut pandang yang sudah ditentukan. Mantan ketua sebuah lembaga *think tank* pemerintah Australia yang paling tersohor menyebut proses ini sebagai "kekuatan energi politis, kepentingan pribadi, dan lobi" (Banks, 2009: 9). Carol Weiss menyebut ini sebagai 'perkolasi (penyaringan)' bukti (Weiss, 1979). Seperti yang akan dibahas dalam Bab 3, pengaruh kebijakan diperkuat ketika pengetahuan ilmiah, profesional dan lokal bekerja bersama, dan menghasilkan pengaruh kolektif.

Pembuatan kebijakan terkait erat dengan implementasi kebijakan. Dalam berbagai tinjauan literatur mengenai implementasi kebijakan,

Najam (1995) menyatakan bahwa kebijakan dibuat di tempat kekuasaan berada (bisa di tingkat nasional, provinsi atau lokal). Dan kebijakan-kebijakan ini sering diterapkan pada tingkat lain, dalam konteks dan kondisi yang berbeda. Jadi, implementasi kebijakan adalah tentang mengelola ketegangan antara keharusan yang dimandatkan dalam suatu kebijakan, dengan sumber daya yang ada, dan dengan lingkungan tempat masyarakat yang disasar sebagai penerima manfaat kebijakan. Perumusan kebijakan pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi, dan implementasi kebijakan di lapangan, tidaklah selalu sinkron.

Situasi yang sudah menantang ini semakin rumit ketika sebuah kebijakan itu sendiri seringkali hanyalah suatu reaksi untuk menunjukkan seolah-olah ada perubahan, padahal niatan sebenarnya adalah mempertahankan status quo. Gaya “seolah-olah ada perubahan” dengan meniru perubahan ditempat lain disebut sebagai “isomorphic mimicry” yang didefinisikan oleh Pritchett, Woolcock dan Andrews (Pritchett et al, 2010; Andrews et al, 2012) sebagai proses tempat reformasi kebijakan hanya dilakukan di atas kertas (mementingkan bentuk formal) dan tidak terlalu peduli pada fungsi. Artinya, tidak ada perubahan nyata yang terjadi dalam hal-hal yang dilakukan, meskipun kebijakan baru diberlakukan sebagai tanggapan terhadap tekanan eksternal. Kebijakan, baik berdasarkan beberapa bentuk pengetahuan atau keyakinan dan nilai, tidak diimplementasikan dan pada akhirnya menyia-nyiakan sumberdaya negara (sambil melindungi kepentingan sebagian orang), dan malah menghambat terjadinya pembangunan sosial dan ekonomi yang efektif.

Sebuah contoh bagus terkait tantangan yang dihadapi pengetahuan - dan bahaya memaksakan pemahaman yang dominan tentang pengalaman lokal - adalah buku terbaru, *Papua versus Papua* (Suryawan, 2017), sebuah buku tentang provinsi paling timur Indonesia. Argumen penulis adalah bahwa ada dua ‘Papua’: satu Papua *mainstream* (arus utama), seperti yang digambarkan dalam literatur akademik (awalnya referensi dari luar Indonesia, namun akhir-akhir ini ada juga literatur dari Indonesia), dan yang lain sebagai Papua sebagaimana dialami, hidup dan

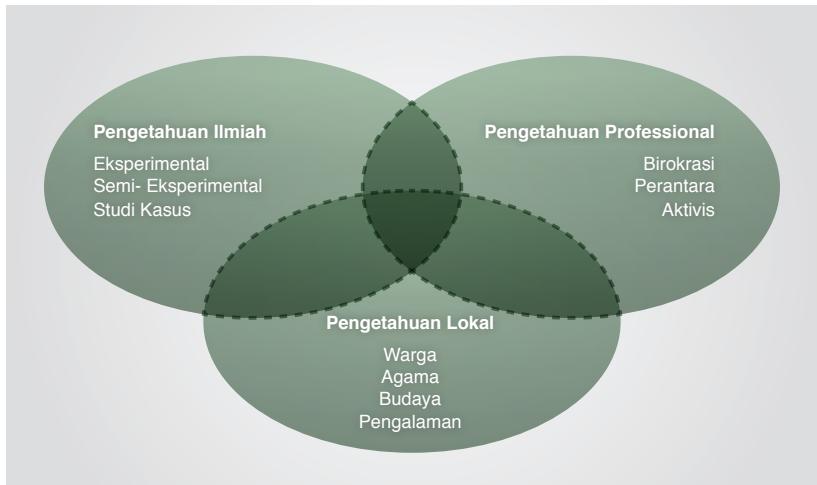
didefinisikan oleh orang-orang di Papua. Penulis berpendapat bahwa citra akademis tentang Papua selama beberapa dekade telah dibumbui oleh etnosentrisme, orientalisme dan pada akhirnya imperialisme. Alasan mengapa pertanyaan mendasar tentang Papua (*the Papua Question*)' masih belum terselesaikan setelah lebih dari 50 tahun adalah bahwa pemerintah pusat terutama mengacu pada citra mainstream dan imperial Papua, dan tidak memahami apa yang sedang terjadi di lapangan. Dengan demikian, hal ini memberikan pandangan naif tentang modernisasi Papua tanpa memperhatikan konteks lokalnya, atau membuat keputusan kebijakan yang salah.

Ini adalah bagian dari masalah yang lebih besar. Dalam sebuah buku yang berpengaruh dalam penelitian soal kepribumian (*indigenous research*), Tuhiwai Smith (1999) berpendapat bahwa etnosentrisme dan romantisme adalah umum dalam studi Barat tentang masyarakat adat, dan sering mengarah ke salah tafsir melalui orientalisme (Said, 1978). Kebudayaan Barat menjadi norma dan masyarakat lain ditafsirkan berdasarkan norma tersebut. Seperti yang akan kita diskusikan, ini adalah salah satu keterbatasan sumber pengetahuan 'ilmiah', yang didasarkan pada positivisme (non-pribumi). Apa yang kami utarakan di sini adalah bahwa kepercayaan dan pengalaman hidup dari sebuah masyarakat - pengetahuan lokal - perlu melengkapi dan mungkin bahkan dijadikan titik awal untuk penelitian tentang budaya dan masyarakat lokal.

Jenis-jenis pengetahuan dalam proses kebijakan

Pengetahuan lokal adalah salah satu dari tiga jenis pengetahuan utama yang mempengaruhi kebijakan publik (Gambar 3). Seperti halnya klasifikasi dalam ilmu-ilmu sosial, batas antara jenis-jenis pengetahuan bersifat tidak kaku, dan tidak ada yang secara eksklusif hanya memuat satu jenis pengetahuan saja. Yang paling dipahami dan paling umum adalah penelitian akademis dan pengetahuan ilmiah. Meskipun sering implisit, penelitian akademis 'sarat dengan asumsi budaya, ras, gender, politik dan kelas' (Holmes dan Crossley, 2004: 208). Memberikan peluang

untuk jenis pengetahuan lain berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dengan sendirinya merupakan proses demokratisasi yang menyiratkan partisipasi dari kelompok yang lebih luas dan aktor-aktor yang sah untuk menghasilkan informasi. Karena bentuk-bentuk pengetahuan lain sering menggunakan sarana komunikasi yang berbeda daripada penelitian akademis, pengetahuan ini sering dapat menangkap makna yang berbeda (Holmes dan Crossley, 2004; Bryant, 2002). Meskipun hal ini pada umumnya dapat dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan, mengkomunikasikan pengetahuan ini dengan pembuat kebijakan akan menimbulkan berbagai tantangan. Pejabat mungkin lebih suka model komunikasi yang terkait dengan penelitian akademis karena dianggap sah untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan. Selanjutnya, kelompok yang menyediakan pengetahuan lokal atau profesional mungkin memiliki kedudukan berbeda di mata pembuat kebijakan, mengingat identitas politik dan posisi mereka di dalam konteks sosial lokal, dan ini berbeda dengan perspektif mereka mengenai peneliti yang dianggap menawarkan informasi yang lebih 'obyektif' (Bryant, 2002). Karena itu penting untuk memahami bagaimana pejabat dapat menerima sumber pengetahuan lain, dan bagaimana mereka memilih untuk menggunakannya. Bab 2 menyajikan penyelidikan lebih dekat dari jenis pengetahuan yang ditunjukkan pada Gambar 3, yaitu: pengetahuan ilmiah, pengetahuan profesional dan pengetahuan lokal.



Gambar 3. Jenis-jenis pengetahuan dan ruang pengaruh kebijakan.

Di dalam buku ini, tipologi mengacu pada sumber dan metode produksi pengetahuan yang berbeda walaupun diakui ada beberapa batas yang tumpang tindih di antara jenis-jenis pengetahuan ini. Konsep ini berbeda dengan kategorisasi lain/bukti yang didasarkan pada kegunaannya. Sebagai contoh, manajemen berbasis bukti, yang lebih fokus pada berbagai jenis bukti yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Briner, Denyer, dan Rousseau 2009: 22) atau konsep Parkhurst tentang unsur-unsur tata kelola bukti yang baik (Parkhurst, 2017: 123).

Memahami dan menggunakan berbagai bentuk bukti merupakan kekuatan yang dapat membantu saat bernavigasi di medan ekonomi-politik yang berbahaya. Seperti yang Najam katakan, karena ada banyak aktor yang beroperasi di berbagai tingkat sistem dan dalam konteks yang berbeda, 'aktor harus menjadi unit analisis' (Najam, 1995: 32) untuk memahami pembuatan kebijakan dan implementasinya. Buku ini akan mengeksplorasi peran pengetahuan lokal dalam proses tersebut dan menunjukkan bahwa pengetahuan lokal adalah alat yang kuat dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaannya, karena

pengetahuan lokal dapat membawa lebih banyak aktor ke dalam proses pembuatan kebijakan. Kami sepenuhnya mengakui poin yang disampaikan oleh Parkhurst (2017) bahwa bukti mana yang akhirnya muncul ke permukaan atau dipilih dalam penyusunan kebijakan adalah soal pilihan politik. Kami berpendapat, walaupun demikian, bahwa pilihan politik dapat berubah dan dapat dipengaruhi oleh aktor dalam sistem jika mereka sadar akan dimensi politik dari keputusan yang akan diambil dan dapat mengidentifikasi cara dan sarana untuk membawa bentuk pengetahuan lain untuk dapat juga dipertimbangkan. Buku ini mencoba membangun pemahaman tentang bagaimana hal itu terjadi melalui analisis kasus-kasus dari seluruh Nusantara, menyoroti pentingnya dan potensi pengetahuan lokal, sesuatu yang sering disebutkan dalam literatur kebijakan (misalnya, Jasanoff, 1990) tetapi jarang dieksplorasi secara mendalam. Banyak literatur internasional termaktub dalam pandangan Hernandez (2012: 153) bahwa, 'hanya ada sedikit, hampir tidak ada bukti bahwa sistem pengetahuan lokal telah disertakan secara berarti dalam pengembangan kebijakan publik'. Pada saat yang sama, ada pengakuan yang berkembang tentang potensi pengetahuan lokal untuk berkontribusi, dan upaya-upaya sedang dilakukan untuk mencari tahu bagaimana caranya hal ini dilakukan (FAO, 2004; Nordic Council of Ministers, 2015; Thaman et al, 2013; World Agroforestry Centre, 2014; Simpson et al, 2015).

Karena dihasilkan melalui pengulangan dan adaptasi dalam praktik sehari-hari, pengetahuan lokal sangat relevan untuk kehidupan masyarakat. Namun, karena konteksnya yang spesifik-lokal, penggunaan pengetahuan lokal untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik mempunyai banyak tantangan, karena cakupan kebijakan publik ditujukan untuk masyarakat luas dan jarang membahas konteks tertentu. Pengetahuan lokal, seperti juga bentuk-bentuk pengetahuan umum lainnya, paling efektif jika kita mengakui bahwa berbagai bentuk pengetahuan berinteraksi untuk mempengaruhi kebijakan. Masyarakat jarang bertindak berdasarkan satu jenis pengetahuan saja. Sebaliknya, pengalaman hidup mereka menggabungkan (baik ke tingkat yang lebih

besar atau lebih rendah) pengetahuan lokal, profesional dan ilmiah. Dan walaupun sebagai akademisi dan ilmuwan kami sendiri sepenuhnya setuju dengan panel ilmuwan sosial terkemuka yang mengedepankan menekankan pada pentingnya ilmu pengetahuan, dan khususnya ilmu sosial, dan bahwa ilmu-ilmu ini harus digunakan dengan lebih baik dalam pembuatan kebijakan publik (National Research Council, 2012), kami tidak percaya bahwa ini dapat dicapai tanpa pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara lain untuk mengetahui sesuatu dan bentuk-bentuk pengetahuan lain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuat kebijakan.

Hirarki Pengetahuan

Pengetahuan berkembang dalam bentang hirarki tanpa bisa dibendung dan melalui berbagai cara mencari jalan agar dapat memberikan pengaruh pada kebijakan (Gambar 4). Bentang hirarki pertama terkait anggapan yang memandang bentuk-bentuk dan domain pengetahuan ilmiah (sering diidentikkan dengan ilmu alam) secara tradisional menempati posisi terdepan; bentuk-bentuk pengetahuan yang bersifat non eksakta (pengetahuan profesional dan lokal) diletakkan di tingkat *prestise* yang lebih rendah (Weiler, 2009).

Jenis hirarki kedua adalah soal pengaturan kelembagaan bagaimana pengetahuan itu diproduksi. Kredibilitas pengetahuan terkadang disusun sesuai tingkat prestisenya, sumberdaya dan pengaruh lembaga yang menghasilkan pengetahuan, dan tempat mereka berada (di belahan utara atau selatan dunia), bukan oleh kualitas pengetahuan itu sendiri. Di bawah kategori yang sama ini ada hirarki di dalam institusi yang berhubungan dengan pengetahuan, antara profesor dan mahasiswa, antara direktur institut dan staf, antara dosen senior dan yunior dan, yang tidak terlalu terlihat, antara petugas biro administrasi kampus dan dosen.

Jenis hirarki ketiga adalah soal metodologi penelitian yang digunakan. Pengetahuan yang dihasilkan melalui metodologi yang dianggap sebagai 'standar emas' (misalnya *randomised control trials*-atau penelitian

eksperimental) dianggap sebagai puncak hirarki pengetahuan. Pandangan ini kuat dimiliki banyak kalangan, tetapi kami mempertanyakan jenis klasifikasi metodologi penelitian ini dan lebih memilih posisi bahwa metode terbaik adalah yang paling sesuai untuk pertanyaan penelitian terkait. Sebuah laporan dari International Development Research Centre (IDRC) di Canada berpendapat bahwa kualitas penelitian tidak dapat dipisahkan dari relevansi sosialnya (Ofir et al, 2016: 4). Bahkan informasi ilmiah kemungkinan akan diabaikan jika dilihat tidak relevan dengan kebutuhan pembuat keputusan tertentu. Dalam proses ini, mempertimbangkan pengetahuan yang relevan secara sosial dalam penelitian sosial akan meningkatkan relevansi, legitimasi, dan mutu keilmiah informasi tersebut.

Keempat adalah soal hirarki pengetahuan berdasarkan bentuk-bentuk manifestasinya. Di dunia di mana sains, peradaban, kecerdasan, kearifan, dan pendidikan diukur dalam hal keaksaraan-literasi fungsional dan dokumen tertulis, seperti jumlah buku yang diterbitkan dan publikasi dalam jurnal yang ditelaah sejawat (*peer review*), pengetahuan lokal dan kearifan lisan akan secara permanen berada tingkat paling bawah dalam hirarki pengetahuan. Ini menghadirkan tantangan bagi masyarakat berbasis pengetahuan lisan seperti Indonesia. Ariel Heryanto (2015) berpendapat bahwa Indonesia selalu akan menjadi kisah sedih yang berkelanjutan mengenai kemajuan peradaban atau kualitas pendidikan jika pengukuran secara eksklusif dilakukan hanya dalam hal kinerja ilmiah³ atau dalam jumlah publikasi akademis (Nugroho, Prasetiamartati dan Ruhanawati, 2016).

3 Dalam pemeringkatan oleh *the Programme for International Student Assessment (PISA)*, sebuah kajian mengenai literasi matematika, ilmu pengetahuan dan membaca dengan responden siswa umur 15 tahun, In 2015, Indonesia mendapat peringkat 62 dari 72 negara yang disurvei.

Hirarki	Pengetahuan	Pengaturan Kelembagaan Pengetahuan	Metode	Jenis Pengetahuan
 <p>Tinggi</p>	Ilmiah	Prestise Lembaga	Eksperimental	Berlaku ditingkat Global
	Profesional	Lokasi (Utara/Selatan)	Semi-Eksperimental	Publikasi
	Lokal	Hirarki di dalam Lembaga	Etnografis	Literasi
Rendah			Studi Kasus	Lisan

Gambar 4. Hirarki Pengetahuan dan Pengaruh Kebijakan

Meskipun produksi pengetahuan lokal tidak dapat dihentikan karena pengetahuan lokal menunjukkan bagaimana suatu masyarakat memahami kehidupan, hierarki dan relasi bias saja menjadi hambatan dan disinsentif untuk menggunakan pengetahuan lokal untuk mempengaruhi kebijakan. Hierarki ini menjadi basis status dan otoritas pengetahuan lokal di dalam proses pengetahuan-ke-kebijakan; kredibilitas pengetahuan lokal dalam mempengaruhi kebijakan oleh hirarki ini telah ditempatkan pada tingkat terendah. Dalam situasi ini, pengetahuan lokal nyaris tidak memiliki kemampuan dan kredibilitas sebagai kekuatan yang sah, sehingga pembuat kebijakan publik tidak terlalu berminat mendukung peningkatan pengaruh pengetahuan lokal dalam pembuatan kebijakan. Sama halnya, minat untuk menginvestasikan sumberdaya untuk pengembangan pengetahuan lokal sehingga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan juga rendah. Hal ini mungkin dapat dimengerti, mengingat pengetahuan dan kekuasaan terhubung oleh hubungan legitimasi timbal balik - yaitu, pengetahuan melegitimasi kekuasaan dan, sebaliknya, pengetahuan dilegitimasi oleh kekuasaan (Flyvbjerg 1991). Hubungan simbiotik-saling menguntungkan antara pengetahuan dan kekuasaan ini berimplikasi pada peran perguruan tinggi sebagai mitra politik pembuat kebijakan. Karena perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain melegitimasi pengetahuan di mata pembuat kebijakan, pengetahuan lokal mengalami berbagai ketidaksetaraan, yang menghalangi perkembangannya. Ketimpangan ini ditopang oleh hubungan yang tidak setara dengan (dan

di dalam) kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan budaya, dan yang memaksakan cara eksklusif membangun pengetahuan lokal. Ketidaksetaraan dalam pengetahuan juga terjadi dalam suatu masyarakat yang di dalamnya gender, usia dan asal etnis mempengaruhi nilai yang diberikan untuk pengetahuan.

Pengetahuan lokal sedang marak di berbagai arena, jadi hierarki ini akan membantu menjelaskan bagaimana pengetahuan lokal menjadi bagian penting dari sektor pengetahuan dan bagaimana kita dapat membangunnya dengan lebih efektif di masa depan. Seperti yang diamati oleh Jones et al (2012), pengetahuan lokal biasanya tidak terlihat. Buku kami ini berupaya untuk mengeksplisitkan sebagian dari pengetahuan itu, dan bagaimana pengetahuan ini dapat mempengaruhi kebijakan publik. Pertanyaannya adalah: Pengetahuan siapa yang harus dianggap penting? Pengetahuan siapa yang seharusnya digunakan dalam proses kebijakan, dan pengetahuan siapa yang tidak digunakan, baik karena tidak dianggap sebagai pengetahuan atau karena dianggap kurang penting? Apa yang ditunjukkan oleh kasus-kasus ini adalah keragaman pengaruh pada kebijakan publik. Jika peran bukti ilmiah telah banyak ditunjukkan, pemahaman tentang peran bukti dan pengetahuan dalam bentuk lain dan potensinya dalam mempengaruhi proses kebijakan publik masih sangat minim, dan pengakuan akan pentingnya menghasilkan pengetahuan secara bersama masih sangat terbatas.

Armitage et al (2011: 996) mendeskripsikan produksi bersama (*co-production*) pengetahuan sebagai, 'pemicu atau mekanisme institusional yang benar-benar memungkinkan pembelajaran dalam kerangka manajemen bersama'. Mereka melihat konteks di Antartika-Kanada, saat sains tidak dapat mengatasi tantangan tanpa mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam model mereka. Sederhananya, produksi bersama (*co-production*) adalah produksi bersama pengetahuan baru oleh semua orang dengan beberapa pengetahuan yang berguna untuk berkontribusi, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, pengetahuan profesional atau pengetahuan lokal. Banyak bidang lain, misalnya konferensi di University of York tentang implikasi di Web 2.0 (University of

York, 2012); Sheila Jasanoff dalam penelitian kebijakan (Jasanoff, 2004); dan penelitian kesehatan terapan (Heaton et al, 2016) mengakui bahwa dalam menangani masalah sistemik dan yang rumit, banyak pemain perlu dilibatkan. Pengetahuan baru yang diperlukan untuk mengelola dalam pengaturan ini membutuhkan masukan yang luas, bukan hanya masukan dari mereka yang disebut ‘pakar’. Ada banyak definisi untuk pemroduksian bersama tetapi semuanya mengacu pada pentingnya mengambil produksi pengetahuan dari tangan para ilmuwan dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan lain yang dibangun oleh masyarakat.

Segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan lokal, harus dikelola agar dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan. Keragaman sumber pengetahuan adalah salah satu ciri pembuatan kebijakan yang sehat. Pengetahuan lokal yang dihasilkan oleh masyarakat dikodifikasi oleh organisasi masyarakat sipil dan berbasis masyarakat, seringkali melalui lembaga formal yang menampung partisipasi warga negara, atau melalui media massa (Jones et al, 2012). Pengetahuan masyarakat dihasilkan dalam apa yang biasanya disebut masyarakat madani – yakni kumpulan organisasi non-pemerintah (ornop atau LSM) dan kehidupan asosiatif yang memanifestasikan kepentingan dan keinginan warga negara; sekaligus merupakan pelindung terhadap penyalahgunaan kekuasaan publik atau swasta, dan merupakan kendaraan praktis untuk transformasi nilai-nilai sosial, dan sekaligus ruang tempat solusi alternatif untuk masalah sosial dapat dikembangkan dan diperdebatkan (Hall, 2003). Sektor masyarakat-dan pengetahuan yang sehat dan berfungsi baik - membangun hubungan, kerja sama dan komunikasi lintas sektor, lintas perbatasan dan lintas masyarakat. LSM dapat berkontribusi pada pengetahuan lokal dengan menggunakan beragam bukti, meningkatkan kualitas wacana, mengatasi kendala dan tantangan terkait kapasitas, membuka data untuk diperiksa dan berbagi pengetahuan dengan orang lain (Hayman dan Bartlett, 2013: 2).

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berbasis bukti masih merupakan tantangan besar, bahkan di negara-negara maju (Carden, 2009; Banks, 2009; Parthasarathy, 2011; Grant, 2014).

Pembuatan kebijakan berbasis bukti mulai mendapat perhatian dari pembuat kebijakan saat pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair di Inggris pada akhir 1990-an, dengan pemerintah dengan mandat reformasi dan modernisasi, berkomitmen untuk mengakhiri politik yang digerakkan oleh ideologi dan menggantinya dengan pengambilan keputusan yang rasional. Namun, Rose (2017) dalam artikelnya tentang politik Brexit, Trump dan pasca-kebenaran (post-truth), melaporkan bahwa ideologi dan sentimen masih memiliki pengaruh signifikan terhadap pembuatan kebijakan. Mengingat sifat pembuatan kebijakan yang inheren secara politis, bukti kuat tidak selalu memiliki peringkat tertinggi dalam hirarki pengetahuan. Seperti yang akan kita lihat di Bab 3, hal ini berdampak pada bagaimana pembuat kebijakan menggunakan sumber pengetahuan yang berbeda, dengan bentuk baru pembuatan kebijakan ‘populis’ yang muncul menggunakan lebih banyak bukti ‘realis’ (baca, pasca-kebenaran) untuk usulan kebijakan.

Kami memulai kajian mengenai pengetahuan lokal ini pada tahun 2014. Sejak saat itu, perubahan global telah memperkuat pentingnya menangani pengetahuan lokal dan memastikan integrasi pengetahuan lokal ke dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini semakin sulit menggunakan bukti bentuk apa pun dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Politik memainkan peran utama dan pertimbangan politik seringkali lebih penting daripada apa yang diperlihatkan oleh bukti. Di titik paling ekstrem, politik telah menjadi ‘politik pasca-kebenaran’ (Suiter, 2016). Tetapi kecenderungan ini selalu ada: pembuat kebijakan lebih menghargai bukti politik daripada bukti lainnya. Seruan terhadap emosi, ideologi atau dogma mendominasi, dan bantahan terhadap fakta atau pemeriksaan fakta diabaikan dengan alasan bahwa fakta tersebut sebetulnya hanyalah pendapat. Pada tahun 2016 ada dua contoh di dunia saat opini masyarakat (bercampur dengan politik) bertentangan dengan badan-badan pengetahuan yang dominan: Brexit dan pemilihan presiden Amerika Serikat. Kedua kasus ini mengartikulasikan kontra budaya sebagai reaksi terhadap dominasi elit tradisional. Keduanya memiliki hasil yang mengejutkan para pakar dan

elit penguasa. Harus dicatat bahwa kedua kejadian ini sangat berbeda dari kasus-kasus pengetahuan lokal yang digambarkan dalam buku ini – kedua kejadian ini didasarkan pada kekecewaan, ketidakpercayaan dan ketakutan yang dikooptasi oleh politisi populis - tetapi kedua kejadian ini memberikan argumen untuk mendiversifikasi sumber-sumber pengetahuan kita. Para politisi dan media arus utama, tidak mendengarkan pengetahuan lokal yang dihasilkan masyarakat ini, salah membaca *mood* publik 2016 dan dengan demikian memungkinkan para pemimpin populis untuk mengklaim dukungan akar rumput. Belajar dari kejadian-kejadian ini, para pembuat kebijakan dan pakar harus menjadi lebih baik dalam menangkap pandangan alternatif dunia.

Kami tidak berpendapat bahwa kita harus mengabaikan bukti atau kepakaran ilmiah, justru sebaliknya. Karena pengembangan kebijakan tidak dapat diprediksi, diperlukan lebih banyak pengetahuan berbasis data dan bukti untuk memberi masukan pada prosesnya, agar dapat dipastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan landasan pengetahuan yang kuat. Namun demikian, pengetahuan lokal membantu kita dengan kerangka kerja untuk memahami berbagai dimensi kebenaran dari berbagai sisi.

Selain itu, perencanaan dan pembuatan kebijakan publik yang sebelumnya tertutup harus dibuka dan didemokratisasikan. Ini bukan sekadar mengganti pengetahuan ilmiah atau ilmunan dengan hal lain (lihat Bab 3). Ini adalah tentang memperkaya pengetahuan ilmiah dengan mengikutsertakan sumber dan perspektif lokal. Pengetahuan lokal harus memiliki peran penting dalam pembuatan penelitian yang relevan dengan kebijakan dan memperkaya peran pakar. Pembuatan kebijakan tidak hanya tentang memproduksi dan menggunakan pengetahuan, tetapi juga tentang mempromosikan dialog dan membangun kapasitas. Ini dideskripsikan sebagai panggilan untuk ‘sebuah politik ekologi pengetahuan yang baru dan pluralis,’ (Nandy, 1989: 267).

Lebih dari sebelumnya, kita perlu mempromosikan penggunaan bukti - semua jenis bukti - untuk mengantisipasi kegagalan pendekatan pasca-kebenaran ke dunia.

Sektor Pengetahuan di Indonesia

Untuk berbagai alasan, Indonesia belum mengembangkan jenis infrastruktur pengetahuan domestik yang ditemukan di banyak negara berkembang (Guggenheim, 2012). Sebaliknya, Indonesia masih sangat bergantung pada bantuan teknis luar negeri untuk membantu mengembangkan opsi kebijakan yang dapat disajikan kepada pengambil keputusan pemerintah tingkat tinggi—dengan menyediakan pengetahuan ilmiah dari para pakar. Alasan utama di balik sektor pengetahuan yang tertinggal adalah warisan pemerintahan Soeharto (1966-1998) yang memerintah dengan menggunakan sedikit penindasan langsung dan lebih banyak menggunakan mesin administrasi untuk menarik lembaga yang seharusnya independen (seperti universitas dan lembaga *think tank*) masuk ke dalam orbitnya dan di bawah kendali birokrasi negara (Guggenheim, 2012: 48). Hal ini menghambat kualitas dan pemikiran independen dan akhirnya tidak ada insentif untuk mendasarkan pembuatan kebijakan pada penelitian dan pengetahuan. Itu melemahkan produksi pengetahuan dari dalam institusi yang menciptakan dan menggunakannya (Guggenheim, 2012: 142). Satu generasi kemudian, warisan ini masih terasa, dengan administrasi yang secara berurutan enggan menyerahkan kekuasaannya. Meskipun universitas negeri yang besar diberikan otonomi pada tahun 2012, para peneliti di perguruan tinggi rata-rata masih dibatasi oleh struktur dan budaya pelayanan sipil yang kaku⁴, dan para peneliti di perguruan tinggi swasta dan lembaga *think tank* dibatasi oleh pendanaan yang tidak memadai.

4 Sebagai contoh, aturan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN-pegawai negeri sipil) hanya dibuka untuk level yang paling rendah dengan pengalaman kerja yang minimal. Kesempatan bagi orang non-ASN untuk posisi menengah dan senior tidak dimungkinkan. Universitas terkemuka di Indonesia hanya mempromosikan pengajar atau professor dari kalangan ASN internal, bukan berdasar kompetensi yang dibutuhkan. Kandidat dari luar universitas tidak dimungkinkan apalagi dari luar negeri (lihat Nugroho et al, 2016). Hal demikian melanggengkan pandangan sempit (parokialisme) dan memperlemah iklim persaingan. Namun demikian, Undang-Undang yang baru tentang ASN (2014) memperkenalkan model rekrutmen yang berbasis kompetensi yang kompetitif, yaitu dengan berbagai syarat, orang non-ASN bisa ikut dalam proses rekrutmen ASN. Butuh waktu untuk aturan ini bisa berdampak secara sistemik.

Meskipun telah ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, kinerja sektor pengetahuan Indonesia berkinerja berada di bawah negara-negara lain dengan kedudukan ekonomi yang sebanding dalam hal peringkat perguruan tinggi, jumlah publikasi internasional, atau paten (Guggenheim, 2012; Rakhmani dan Siregar, 2016; Nugroho, Prasetiamartati dan Ruhanawati, 2016).

Namun, ada berita gembira. Generasi baru pembuat kebijakan mulai bermunculan, pembuat kebijakan yang tidak terlatih di bawah musim dingin otoriter yang panjang di Indonesia. Desentralisasi memberikan insentif bagi pemimpin lokal untuk lebih sensitif terhadap konstituen dan realitas lokal, dan demokrasi telah terbuka untuk kontestasi dan akuntabilitas (lihat Bab 3). Yang paling penting, kompleksitas menjadi *Middle Income Country* di era globalisasi dan dalam lautan ekonomi yang berkembang pesat akhirnya mengejar para pembuat kebijakan utama (termasuk Presiden Joko Widodo yang terpilih pada 2014) yang mulai melihat pentingnya berinvestasi lebih banyak dalam ekonomi pengetahuan dan membangun sektor pengetahuan domestik dan beragam. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) terdiri dari para ilmuwan terkemuka yang memberikan saran kebijakan sains independen penting bagi bangsa. Sampai saat ini, AIPI cukup lemah tetapi sekarang mulai memperkuat perannya sebagai penasihat ilmu pengetahuan bagi bangsa. Sebuah 'SAINS 45: Agenda Sains Indonesia Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017) telah dikembangkan oleh Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan mencakup isu-isu yang berkaitan dengan pengetahuan lokal.

Pengetahuan Lokal dalam Pembuatan Kebijakan di Indonesia

Mixed picture dari sektor pengetahuan di Indonesia ini penting untuk proses *knowledge to policy*. Studi terbaru tentang perolehan pengetahuan oleh para pengambil keputusan nasional di Indonesia (Datta et al, 2016) menemukan bahwa baik produksi maupun permintaan akan pengetahuan masih rendah. Ketika para pengambil keputusan menggunakan bukti, jenis utama pengetahuan yang mereka pertimbangkan adalah data

statistik, pendapat ahli dan persepsi masyarakat (Datta et al, 2016: 6). Karena aturan pengadaan yang rumit, pembuat kebijakan jarang melakukan penelitian independen. Sebaliknya, mereka membaca laporan statistik, mengatur pertemuan pakar atau mengadakan lokakarya pemangku kepentingan. Apa yang kami sebut ‘pengetahuan birokrasi’ di Indonesia sering merupakan penggabungan dari laporan-laporan ini, pertemuan pakar dan lokakarya.

Penelitian Datta adalah mengenai pembuat kebijakan nasional dan merupakan cerminan akurat dari pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Namun, seperti yang akan kita lihat dalam buku ini, ada banyak inovasi di tingkat lokal dimana ada kebijakan yang peka terhadap kondisi lokal diuji. Desentralisasi proses pembuatan kebijakan publik telah menciptakan peluang bagi pengetahuan lokal untuk menginformasikan kebijakan regional. Desentralisasi ‘Big Bang’, yang diperkenalkan pada tahun 2001, telah memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah daerah untuk menafsirkan kebijakan nasional, menyesuaikannya dengan konteks lokal, dan memaksimalkan kebutuhan dan potensi lokal khusus mereka (Antlov dan Hidayat, 2004). Pemilihan yang kompetitif di tingkat nasional dan sub-nasional, diperkenalkan pada tahun 2005, melihat pemimpin terpilih menjadi lebih bertanggung jawab kepada masyarakat, sementara juga memberikan peluang untuk pembuatan kebijakan berdasarkan bukti dan data yang lebih baik dari lapangan.

Dengan desentralisasi, kewenangan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih besar berada di tangan pemerintah daerah. Bagian dari desentralisasi pembuatan kebijakan ini adalah UU Desa No. 6/2014. Undang-undang ini menjadikan masyarakat desa bagian dari proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dalam keadaan ini, pengetahuan lokal dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik dengan cara yang berbeda. Pertama, pengaruh dihasilkan melalui ‘faktor penarik’, saat tuntutan dari masyarakat disajikan untuk kebijakan spesifik konteks lokal; kedua, pengaruh dihasilkan melalui ‘faktor pendorong’, proses politik yang terjadi saat pengetahuan lokal dapat dikapitalisasi sebagai aset pemilu

dalam politik representasi. Kami akan mendiskusikan kedua-duanya nanti di buku ini.

Meskipun persepsi masyarakat adalah pengetahuan paling umum ketiga yang digunakan oleh pembuat kebijakan nasional, studi Datta menemukan bahwa ketika benar-benar digunakan, tujuan penggunaannya adalah terutama untuk lebih memahami masalah, tidak harus meningkatkan implementasi. Di bab berikutnya, kami membahas secara lebih rinci beberapa tantangan untuk produksi dan penggunaan pengetahuan lokal. Satu masalah di Indonesia adalah tidak terhubungannya birokrat sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang menghasilkan dan memediasi pengetahuan lokal.

Indonesia memiliki sejarah pengetahuan yang kaya yang diproduksi di luar perguruan tinggi, jika kita melihat di belakang yaitu ke gerakan nasional yang terjadi awal abad ke-20, yang dipimpin oleh para intelektual dan *opinion leaders* yang mendasarkan otoritas mereka pada pemahaman yang kuat tentang pengalaman hidup. Sebuah tekstur yang kaya dari kelompok dan gerakan sosial telah ada: masyarakat agama, sekolah swasta, asosiasi kredit, kelompok bantuan swadaya saling membantu, organisasi lingkungan, asosiasi pengguna air dan banyak lainnya (Ibrahim, van Tuijl dan Antlov, 2007). Seperti yang akan kita lihat di Bab 4, saat ini ada partisipasi masyarakat yang tinggi di Indonesia – publik ikut serta melakukan analisis anggaran, pengawasan layanan publik, pemberdayaan masyarakat, bantuan hukum dan advokasi hak asasi manusia. Dalam keterlibatan ini, mereka menghasilkan pengetahuan yang relevan secara lokal. Ada antusiasme dan energi untuk menemukan solusi lokal untuk masalah lokal, dan dalam proses ini menantang paradigma pembangunan dari atas (top-down) dengan solusi teknis yang sudah ditentukan. Ada ribuan kelompok aksi sosial berbasis masyarakat di seluruh Indonesia yang terjadi saat masyarakat yang peduli untuk berkolaborasi untuk memecahkan masalah lokal, dan yang berbagi keinginan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan memastikan dana publik dialokasikan untuk kemaslahatan konstituen mereka (Antlov dan Wetterberg, 2013: 200).

Politik lokal di Indonesia telah dicirikan sebagai kepentingan kelompok *pemangsa* yang dipelihara di bawah sistem patronase yang dahulu dibangun oleh rezim Suharto, yang sebagian besar masih tetap utuh, meskipun dengan kelas baru, yakni para “penumpang gelap pencari-sewa” (*rent seekers*) (Hadiz, 2003). Aktivis masyarakat sipil di Indonesia telah dicirikan sebagai ‘demokrat mengambang’ yang melayang di atas, dan tidak mengakar dengan, masyarakat Indonesia, dan dengan demikian tidak dapat memperoleh legitimasi masyarakat dan mengumpulkan basis luas yang cukup untuk memobilisasi dukungan atau pengaruh politik (Manning dan van Diermen, 2000) ; Priyono, Samadhi, Törnquist et al 2007). Demokrasi yang terkompromi yang muncul sebagai akibatnya tidak memberdayakan masyarakat biasa, karena ruang terbuka melalui bentuk desentralisasi demokratis ini ditangkap oleh berbagai bentuk “*predatory interest*” (Hadiz, 2003) atau “*bad guys*” (Törnquist, 2002).

Desentralisasi politik dan ekonomi yang diperkenalkan pada awal tahun 2000 telah berkontribusi pada marjinalisasi kepentingan masyarakat lokal (Aspinall dan Mietzner, 2010; Nasution, 2016). Namun, hal itu juga menciptakan peluang baru untuk mengadopsi pengetahuan lokal dalam proses kebijakan publik. Desentralisasi, menurut Pisani, Kok dan Nugroho (2016), telah meningkatkan penerimaan para pembuat kebijakan daerah terhadap pengetahuan lokal saat pengetahuan lokal disajikan sebagai aspirasi lokal (aspirasi lokal) dan dikodifikasikan sebagai aset suara untuk pemilu. Proses desentralisasi saat ini dan peningkatan demokrasi politik di Indonesia juga mengabaikan aspirasi dan pengetahuan lokal. Hal ini terjadi karena kepala pemerintah daerah dan anggota DPRD, yang seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui pemilihan umum, malah lebih bertanggung jawab kepada partai politik.

Ragangan Buku Ini

Buku ini akan fokus pada proses dan mekanisme bagaimana pengetahuan lokal:

- Diproduksi
- Dikomunikasikan

- Berinteraksi dengan bentuk pengetahuan lain
- Diterima oleh pembuat kebijakan dan dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan.

Bab 2 adalah tentang berbagai bentuk pengetahuan yang dijelaskan pada Gambar 3: pengetahuan ilmiah, profesional dan lokal, dan bagaimana mereka berinteraksi. Kami akan menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah dan profesional sering diistimewakan, sehingga menyederhanakan dan mungkin merusak proses kebijakan. Proses kebijakan mencakup banyak aktor, yang beroperasi pada berbagai tingkat sistem, dalam konteks yang beragam. Mempengaruhi proses itu berarti memahami berbagai basis pengetahuan yang sedang dimainkan di antara para pelaku ini dan menggunakannya untuk mengidentifikasi dan menentukan opsi-opsi kebijakan yang akan beresonansi dengan mereka yang pada akhirnya harus menerapkannya. Pilihannya mungkin beresonansi karena alasan politik (seperti tekanan publik), alasan berbasis nilai, atau alasan ekonomi dan sosial. Tidak ada satu alasan terbaik dan tidak ada pendekatan terbaik. Peluang terbaik untuk sukses dalam mempengaruhi proses kebijakan terletak dalam memahami berbagai bentuk pengetahuan yang sedang bermain dan mampu bekerja dengan mereka, idealnya dalam beberapa bentuk produksi bersama, untuk meningkatkan kebijakan dan pelaksanaannya. Proses kebijakan diperkaya ketika berbagai bentuk pengetahuan digunakan; agar pengetahuan lokal ini menyajikan peluang untuk memperluas jangkauan dan relevansinya.

Bab 3 menawarkan kerangka pikir untuk memahami kasus-kasus penggunaan pengetahuan lokal di Indonesia. Bab ini menggali secara lebih mendalam tentang pentingnya pengetahuan lokal dalam pembuatan kebijakan secara demokratis. Berdasarkan argumen bahwa pengetahuan lokal bersifat politis, kita melihat bagaimana pengetahuan ini memainkan peran kunci tidak hanya dalam perumusan kebijakan tetapi juga dalam implementasinya. Pengetahuan lokal dihasilkan oleh masyarakat dalam percakapan dan forum sehari-hari, sering

diartikulasikan dalam masyarakat sipil dan partisipasi rakyat. Kami berpendapat bahwa pengetahuan lokal adalah prasyarat untuk demokratisasi pembuatan kebijakan dan peningkatan kebijakan publik. Peran baru dari ‘pakar’ adalah untuk mendukung masyarakat untuk memahami opsi kebijakan, dan untuk menyediakan arena bermain yang setara dan peluang untuk demokrasi deliberatif secara lebih umum. Para pakar juga membantu masyarakat memahami dan mendiskusikan isu-isu kompleks yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Bab 4 memperkenalkan 10 studi kasus lokal untuk memberikan nuansa kekayaan pengalaman lokal. Bab ini berfokus pada pendekatan, pencapaian, dan tantangan dalam mendukung dan memahami kasus-kasus pengetahuan lokal: bagaimana pengetahuan lokal dihasilkan, dikelola, dan digunakan secara *real time* oleh masyarakat setempat dan LSM dukungannya.

Dua bab berikut akan menggunakan studi kasus ini untuk memperkaya argumen yang disajikan dalam Bab 1 hingga 3.

Bab 5 berfokus pada produksi dan manajemen pengetahuan lokal. Ada posisi dan peran yang berbeda dari organisasi dalam menghasilkan pengetahuan lokal: untuk memecahkan masalah, untuk merekomendasikan cara alternatif untuk memecahkan masalah, untuk mengantisipasi potensi masalah dan melestarikan kearifan lokal. Peran-peran yang berbeda ini ditentukan oleh kapasitas organisasi yang berbeda dalam memahami isu-isu lokal dan mengetahui konteks politik lokal, termasuk para pemangku kepentingan terkait. Semua organisasi percaya bahwa kearifan tradisional dan nilai yang hidup di masyarakat harus memiliki tempat dan pengaruh pada peraturan lokal, karena di dalamnya ada suara rakyat dan kekuatan komunal. Dengan menggunakan data dari studi kasus, kami menunjukkan ketika pengetahuan lokal berhasil disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan; dalam beberapa kasus lain, pekerjaan tersebut hanya mampu berfungsi sebagai peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan lokal. Dalam kategori ketiga, beberapa kasus menyajikan pengetahuan lokal yang belum terkait dengan kebijakan lokal, tetapi

telah terbukti berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat. Di sini, implementasi mendahului perubahan kebijakan, kejadian yang cukup umum ketika masyarakat mengenali nilai perubahan sebelum pembuat kebijakan siap untuk bertindak.

Bab 6 berfokus pada kondisi di mana pengetahuan lokal dapat mempengaruhi kebijakan. Beberapa mitra kami berhasil membangun komunikasi dengan pembuat kebijakan daerah dan mendapatkan tempat dalam wacana kebijakan. Secara umum, kami menemukan bahwa mitra yang berlokasi di tempat pengetahuan lokal berada lebih mampu mengadvokasikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Ini tampaknya karena mereka telah membangun hubungan dengan para pemimpin lokal dan mereka memiliki reputasi organisasi yang kuat di masyarakat. Beberapa telah mampu menarik perhatian para pemimpin lokal kepada hasil penelitian mereka, yang kemudian telah dilaksanakan di tingkat lokal. Sangat penting untuk memahami apakah pembuat kebijakan mampu menarik makna dari dan memanfaatkan jenis informasi yang dihasilkan oleh organisasi masyarakat sipil. Beberapa mekanisme diidentifikasi sebagai mekanisme yang akan membantu mengamankan pertemuan dengan pembuat kebijakan saat rekomendasi akan disampaikan kepada mereka.

Kesimpulan dalam Bab 7 menempatkan studi kasus dalam konteks sumber-sumber pengetahuan yang berbeda. Kami menyajikan sejumlah ketegangan yang muncul di antara pengetahuan lokal, profesional dan ilmiah. Ketegangan ini adalah permadani dalam membangun pengetahuan dan cara untuk menggambarkan fakta bahwa mengejar berbagai nilai, akhir, dan manfaat yang berlipat ganda secara tak terelakkan menimbulkan tantangan tentang bagaimana mencapai keseimbangan. Kami juga melihat implikasi dari kerangka kerja yang baru baik untuk studi akademis berbagai bentuk pengetahuan, dan untuk praktisi pembangunan yang bekerja untuk meningkatkan atau mempengaruhi kebijakan publik.

Bentuk-bentuk pengetahuan dan pengaruh kebijakan

Argumen pokok Bab ini adalah bahwa ada banyak jenis pengetahuan yang berkontribusi pada apa yang disebut sebagai “bangunan pengetahuan”. Meskipun persepsi umum tentang ‘pengetahuan’ sering terbatas pada pengetahuan ilmiah formal, pengetahuan profesional juga penting, seperti halnya pengetahuan lokal. Dalam pengetahuan profesional, kami memasukkan pengetahuan birokrasi, yang tanpanya banyak isu kebijakan tidak akan bisa sampai kepada para pembuat kebijakan. Mereka yang bekerja di lembaga penelitian kebijakan dan lembaga *think tank* juga menghasilkan pengetahuan profesional: mereka dapat menggunakan dan mengintegrasikan bukti dari penelitian ilmiah dengan isu-isu yang relevan dengan pembuat kebijakan di sekitar ekonomi lokal dan politik dengan cara yang membuat bukti relevan, dan yang lebih penting, dapat digunakan oleh kebijakan pembuat. Jenis pengetahuan profesional ini dapat digambarkan sebagai pengetahuan perantara. Lembaga advokasi, menggunakan pengetahuan aktivis, dapat menggunakan bukti penelitian dengan cara yang sama untuk mempromosikan agenda mereka. Seiring dengan bukti masyarakat sebagai bagian dari pengetahuan lokal, pengetahuan agama juga dapat memainkan peran penting. Bab ini berpendapat bahwa jika kita mengabaikan bentuk-bentuk pengetahuan ini, dan memperlakukannya sebagai tidak relevan dan menganggap bahwa bukti ilmiah itu sendiri dapat mempengaruhi proses kebijakan, kita akan kehilangan beberapa elemen penting untuk mencapai keberhasilan. Masing-masing jenis

pengetahuan memainkan peran penting dan membawa jenis bukti yang berbeda kepada pembuat kebijakan. Tanpa interpretasi lokal dan pengetahuan perantara, aktivis dan birokrasi yang menggerakkan gagasan untuk pembuat kebijakan, kita tidak mungkin melihat banyak pengaruh pengetahuan ilmiah. Sebelum kita beralih ke perlakuan yang lebih rinci tentang pengetahuan lokal dan yang dihasilkan oleh masyarakat sebagai fokus utama buku ini, bab ini memberikan gambaran umum tentang berbagai bentuk pengetahuan dan bagaimana pengetahuan ini berinteraksi satu sama lain dalam proses pembuatan kebijakan.

Seperti yang akan kita lihat dalam deskripsi jenis-jenis pengetahuan dan penerapannya, kategori-kategori pengetahuan itu tidak memiliki batas yang kaku di antaranya. Biasanya kita berhubungan dengan lebih dari satu jenis pengetahuan; kita semua menggunakan banyak sumber bukti, tetapi kita cenderung memiliki preferensi dan menempatkan satu jenis pengetahuan di atas yang lain dalam menilai situasi dan membuat keputusan. Produksi bersama, yang menuntut penghormatan terhadap pengetahuan yang tidak kita prioritaskan, sebenarnya suatu hal yang logis dalam prosesnya, tetapi ada kebutuhan untuk membuatnya lebih eksplisit dan mencerminkan relevansi semua bentuk pengetahuan dalam proses itu. Setiap jenis pengetahuan bermanifestasi dalam beberapa cara berbeda, seperti yang terlihat pada Gambar 3.

Jenis-jenis pengetahuan dalam pembuatan kebijakan

Pengakuan akan pentingnya beragam jenis pengetahuan dalam pembuatan kebijakan sudah mulai berkembang (Jasanoff, 2012). Pengetahuan dihasilkan di berbagai tempat dan dalam berbagai cara. Kami berpendapat di sini bahwa publik bukan hanya konsumen pengetahuan tetapi juga produsen. Bahkan birokrat yang merupakan konsumen pengetahuan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan publik juga merupakan produsen pengetahuan. Semua bentuk pengetahuan harus memiliki tempat di sektor pengetahuan yang berkembang.

Posisi istimewa ilmu pengetahuan formal telah membayangi peran bentuk-bentuk pengetahuan lain dalam sebagian besar penelitian tentang peran bukti dalam pembuatan kebijakan publik. Meskipun telah

banyak ditulis tentang peran masyarakat dan masalah dengan terlalu banyak fokus pada para pakar (Easterly, 2015; Eyben et al, 2015), dan ada banyak literatur tentang peran masyarakat dalam pemerintahan⁵, peran berbagai bentuk pengetahuan dalam pembuatan kebijakan tidak terlalu mendapatkan perhatian, berbeda dengan perhatian yang diberikan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak dianggap sebagai pemilik pengetahuan, sebagai orang yang menghasilkan pengetahuan yang dapat berguna untuk proses kebijakan (pengecualian penting untuk dicatat di sini adalah Chambers, 2012). Sebaliknya, masyarakat diperlakukan sebagai orang yang dipengaruhi oleh kebijakan. Jadi diskusi telah banyak tentang perlunya memastikan konsultasi yang memadai dan tepat dengan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk menanggapi bukti ilmiah atau berusaha menyanggahnya dengan bukti ilmiah dan pengetahuan ilmiah lainnya. Mereka diundang untuk berpartisipasi, untuk menyajikan pendapat dan perspektif tentang bukti ilmiah yang diketahui, daripada membawa pengetahuan baru dan berbeda untuk proses (Nadasdy, 2003). Jika masyarakat berasal dari basis budaya atau pengetahuan yang berbeda, seperti masyarakat adat, tantangan menjadi bertambah. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda dan lebih dari 55% populasi dalam dua etnis (Jawa, Sunda), Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam hal ini. Kami berargumen bahwa pandangan yang beragam ini perlu didengar, berbagai perspektif dipertimbangkan dan beberapa nilai diperhitungkan (lihat Bab 3). Tetapi asumsi umum tetap pada posisi bahwa bukti dan pengetahuan yang harus dipertimbangkan adalah yang bersifat ilmiah. Ini jarang dipertanyakan.

Dengan cara yang sama, birokrat tidak dianggap sebagai penghasil pengetahuan. Para konsultan dan pakar yang mengkonsolidasikan penelitian orang lain dalam representasi mereka pun tidak dianggap sebagai produsen pengetahuan tetapi lebih sebagai konsumen pengetahuan ilmiah. *Think tanks*, atau lembaga penelitian kebijakan,

5 Termasuk didalamnya Goss, 2001; Fischer, 2003; Boyte, 2004; Gastil dan Levine, 2005; dan Chambers, 2012.

membentuk jembatan, karena banyak dari mereka adalah produsen dan konsumen pengetahuan ilmiah. Warga negara, birokrat dan lembaga think tank diharapkan terlibat dengan proses dan sistem yang telah disiapkan untuk berkonsultasi mengenai bukti ilmiah. Untuk banyak pengetahuan lokal dan tradisional, ini adalah transisi yang sangat sulit dan pengetahuan yang disajikan dalam forum ilmiah tampaknya tidak pada tempatnya dan tidak autentik. Pengetahuan ini diperlakukan sebagai pandangan, pendapat dan dianggap tidak lazim. Kami membutuhkan beberapa cara baru untuk memikirkan hubungan antara berbagai jenis pengetahuan dan untuk mengupayakan diterimanya berbagai bentuk pengetahuan dalam proses kebijakan.

Tipologi pengetahuan

Bab 1 mengidentifikasi tiga jenis pengetahuan utama yang mempengaruhi kebijakan (berdasarkan tipologi sebelumnya seperti Aristoteles, serta Hunt dan Shackley, 1999). Aristoteles mendefinisikan tiga jenis pengetahuan: *epistem*, *techne* dan *phronesis*⁶. *Episteme* adalah tentang penjelasan fenomena, biasanya disebut sekarang sebagai sains. *Techne* adalah tentang pengetahuan teknis yang kita miliki, atau apa yang akan kita sebut pengetahuan profesional. Dan *phronesis* adalah tentang bagaimana kita “berkontribusi pada rasionalitas praktis masyarakat dalam menjelaskan di mana kita berada, di mana kita ingin pergi, dan apa yang diinginkan sesuai dengan rangkaian nilai dan minat yang beragam” (Flyvbjerg, 2001: 167). Ini adalah jenis pengetahuan lokal yang dihasilkan masyarakat. Jenis-jenis pengetahuan yang dijelaskan di sini tidak monolitik. Masing-masing dimanifestasikan dengan cara yang berbeda dan beberapa ilustrasi disediakan, seperti pengetahuan birokrasi sebagai bentuk pengetahuan profesional, dan pengetahuan agama sebagai bentuk pengetahuan lokal (Bab 3). Harus jelas bahwa kategori-kategori itu tidaklah kaku dan kebanyakan dari kita membawa pengetahuan dari bagian-bagian berbeda dari tipologi ini, tetapi banyak

6 Seperti diterangkan dalam Flyvbjerg (2001).

dari kita lebih mengandalkan pada satu bentuk pengetahuan dalam membuat keputusan. Seperti tipologi apa pun, ini adalah alat untuk membantu kami menyortir dan mengidentifikasi pola dan cara bertindak.

Bentuk pertama adalah **pengetahuan ilmiah formal** yang menghasilkan kumpulan data yang membantu kita mengambil kesimpulan tentang masyarakat, dan menarik kesimpulan tentang apa implikasinya untuk kebijakan. Pengetahuan ilmiah mendapatkan kedudukan di Era Pencerahan (*Era of Enlightenment*) di Eropa, dimulai pada abad ke-18 ketika ide-ide disajikan berdasarkan logika dan ilmiah, yang mengarah ke Revolusi Ilmiah⁷. Gerakan ini menyebabkan ledakan pemikiran dan perspektif tentang bukti dan alasan. Penelitian ilmiah formal memiliki banyak alat untuk menarik, apakah untuk penelitian tentang isu-isu ilmu alam seperti perubahan iklim, atau penelitian tentang perubahan sosial yang mencoba untuk memahami apa yang akan mempengaruhi perilaku baru dalam masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Akademisi akan mengumpulkan bukti ilmiah menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Bukti ini akan diperebutkan oleh akademi dan sebagian akan dipresentasikan kepada pembuat kebijakan untuk menginformasikan keputusan mereka. Pengetahuan ilmiah formal ini adalah pengetahuan yang telah menjadi fokus dari banyak usaha - untuk membuat pembuat kebijakan mempertimbangkannya dan menggunakannya dalam kebijakan publik. Seringkali adalah 'bukti' dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti.

Dalam berpikir tentang pengaruh pengetahuan tentang kebijakan publik, kita cenderung memberikan hak istimewa kepada 'pakar', ilmuwan yang dianggap memiliki pengetahuan superior dan bukti yang lebih unggul. Banyak penelitian dan penulisan telah dilakukan pada penggunaan bukti ilmiah dalam proses kebijakan (Jasanoff, 1990; Kingdon, 1994; Carden, 2009). Hal ini memang penting dan banyak kasus telah ditulis dan banyak kerangka kerja yang disajikan tentang bagaimana pengaruh terjadi.

7 Diuraikan oleh Thomas Kuhn (1962) dalam *The Structure of Scientific Revolutions* sebagai sebuah pergeseran paradigma bagaimana kita berpikir ilmiah dan memandang bukti.

Aktor kunci dalam kelompok ini adalah para ilmuwan. Mereka sering di perguruan tinggi, tetapi kadang-kadang di lembaga penelitian (yang mungkin didanai publik atau swasta). Bukti ilmiah yang kuat, disajikan dengan baik, adalah penting. Perdebatan mengenai perubahan iklim telah melihat munculnya bukti dalam diskusi, dari hari-hari awal ketika penelitian masih awal dan dipertanyakan, sampai sekarang ketika sebagian besar orang percaya bahwa ada bukti yang kuat dan bahwa sesuatu harus dilakukan. Perjanjian internasional, perundang-undangan nasional dan bahkan lokal telah dipengaruhi oleh kekhawatiran tentang perubahan iklim. Sains telah memainkan peran yang sangat berpengaruh di sini.

Bentuk pengetahuan kedua yang kita sebut **pengetahuan profesional** (*techne* Aristoteles, atau apa yang disebut Hunt dan Shackley sebagai pengetahuan *fiduciary* dan apa yang Jones et al sebut sebagai pengetahuan yang diinformasikan oleh praktik)⁸. Pengetahuan profesional dihasilkan sebagai layanan bagi pembuat kebijakan. Kami mengidentifikasi tiga bentuk pengetahuan profesional: birokrasi, perantara, dan advokasi. Ketiganya mencerminkan kemampuan kelompok-kelompok tertentu untuk menghubungkan pengetahuan dengan praktik dengan cara-cara yang memiliki potensi untuk mempengaruhi; pengetahuan birokrasi yang paling dipraktikkan di dalam birokrasi, pengetahuan perantara dipraktikkan di lembaga *think tank*, dan pengetahuan advokasi dipraktikkan terutama oleh kelompok-kelompok advokasi. Pengetahuan profesional didasarkan pada keyakinan bahwa para produsen pengetahuan telah menggunakan secara adil dan jujur bukti dan pengetahuan utama dalam saran kebijakan mereka, bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang konteks yang melatari keputusan yang harus diambil, dan bahwa mereka tidak memanipulasi bukti terutama untuk keuntungan atau tujuan mereka

8 Penulis lebih memilih istilah “professional knowledge” atau pengetahuan dari para professional sebagai sebuah istilah yang lebih mudah dikomunikasikan ketimbang ‘fiducial knowledge’, dan maknanya lebih luas daripada ‘practice-informed knowledge’ — pengetahuan yang muncul dari praktik.

sendiri. Karena alasan inilah reputasi *think tank* sangat penting: *think tank* mengambil penelitian primer dan sering menggabungkannya dengan pengetahuan lain yang memungkinkannya mengartikulasikan makna bukti bagi pembuat kebijakan. Jika reputasinya terpuruk karena manipulasi bukti yang nyata, atau menyerah pada kelompok kepentingan khusus, kemampuannya untuk mempengaruhi hilang sampai ia dapat membangun kembali reputasinya. Pengetahuan profesional biasanya didasarkan pada sumber informasi sekunder serta pengalaman langsung para praktisi dan pengetahuan mereka tentang konteks dan proses tempat pengetahuan digunakan. Baik pengetahuan birokrasi, perantara, atau advokasi, semua mensintesis dan mengkonsolidasikan ide-ide dan menghubungkannya dengan konteks tempat kebijakan tersebut beroperasi.

Pengetahuan profesional berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan ilmiah dan kebutuhan pembuat kebijakan. Pengetahuan ini membantu menerjemahkan pengetahuan ilmiah; para praktisi melihat diri mereka mampu memahami para ilmuwan dan pembuat kebijakan. Mereka biasanya tidak menghasilkan pengetahuan dasar yang baru; namun mereka melihat temuan penelitian melalui lensa yang berbeda dan mensintesis bukti yang berasal dari sumber yang berbeda sesuai dengan kebutuhan klien mereka dan konteks tempat mereka beroperasi. Tanpa pengetahuan profesional, banyak pengetahuan ilmiah tidak akan menemukan jalannya ke ruang kebijakan.

Agar berhasil, produsen pengetahuan profesional harus memiliki pemahaman yang kuat tentang penelitian dan tentang kebutuhan pembuat kebijakan yang merupakan klien mereka. Keterampilan dalam menerjemahkan dan mengkomunikasikan pengetahuan adalah sangat penting. Mampu menginterpretasikan bukti dengan cara yang berarti bagi masyarakat kebijakan tidaklah mudah. Ini adalah salah satu yang beberapa ilmuwan kuasai, oleh karena itu produsen pengetahuan profesional memainkan peran perantara kunci, sering didefinisikan sebagai ‘analisis kebijakan’ dalam struktur ketenagakerjaan pemerintah.

Kotak 1. Pengetahuan birokrasi sebagai bentuk pengetahuan profesional

Kami menyajikan satu bentuk pengetahuan profesional yang memainkan peran utama dalam proses kebijakan meskipun tidak sering dianggap sebagai pengetahuan: pengetahuan birokrasi. Ini adalah bentuk pengetahuan saat birokrat bukan hanya pengguna tetapi juga produsen pengetahuan. Sebagaimana pendapat Zimmerman (n.d.), birokrasi sangat baik dalam mengkodifikasi pengetahuan tak terlihat menjadi aturan dan peraturan. Zimmerman lebih jauh berpendapat bahwa organisasi lain dapat belajar dari birokrasi dan menggunakan pengetahuan pendokumentasian yang ada di dalam birokrasi.

Birokrasi menerjemahkan dan mensintesis pengetahuan ke dalam kerangka kerja yang relevan untuk masyarakat pengguna tertentu. Apa yang mungkin perlu diketahui oleh Kementerian Keuangan, misalnya, untuk membuat keputusan kebijakan sangat berbeda dari apa yang mungkin perlu diketahui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; kedua kementerian mungkin melihat hal-hal melalui lensa yang sangat berbeda. Pengetahuan birokrasi memandu sintesis dan pengembangan kerangka kerja yang akan membantu pembuat kebijakan yang berbeda melakukan tugas mereka. Ini tercermin dalam kemampuan birokrat memahami bukti sedemikian rupa sehingga dapat menjawab kebutuhan khusus pembuat kebijakan dengan siapa mereka bekerja. Dalam sisi ini kita melihat pemroduksian pengetahuan, bukan hanya pemanfaatannya.

Pengetahuan birokrasi pada dasarnya adalah pengetahuan tentang proses dan konteks. Pengetahuan ini penting karena mendefinisikan apa yang mungkin dalam suatu konteks kebijakan. Memahami keterbatasan dan parameter tindakan kebijakan adalah pengetahuan yang dibawa birokrasi. Elemen ini penting dalam pengaruh kebijakan namun tidak banyak ada dalam pengetahuan ilmiah dan lokal. Para birokrat di posisi berpengaruh adalah yang paling memahami proses

dan konteks yang berubah yang melingkupi pembuatan keputusan kebijakan. Tanpa pengetahuan itu, pengaruh akan bersifat terbatas. Hal ini bukan sekadar taktik. Seperti pengetahuan profesional, pengetahuan birokrasi banyak yang tersirat, diserap melalui pengamatan dan praktik selama bertahun-tahun. Pengetahuan ini dibuat eksplisit melalui aturan dan sistem, tetapi sangat lemah dalam menangkap konteks karena sifatnya yang selalu berubah, dan mereka sangat terbatas dalam menangkap proses. Langkah-langkah proses formal ditangkap tetapi proses informal, hubungan dan masalah kekuasaan yang nyata, tetap implisit.

Apa yang harus dilakukan oleh pengetahuan birokrasi adalah menyederhanakan gagasan-gagasan rumit dan selektif tentang apa yang dapat dilakukan dalam setiap konteks. Ini membutuhkan pengetahuan mendalam tentang proses dan konteks yang sedang dimainkan serta kapasitas untuk mensintesis dan menerjemahkan pengetahuan menjadi bukti yang berguna dan dapat digunakan. Ini juga membutuhkan kemampuan untuk menjaga kompleksitas masalah dalam pikiran sehingga penyederhanaan selalu terfokus dengan baik.

Pengetahuan birokrasi sangat terspesialisasi. Pengetahuan ini membangun sintesis dari berbagai macam bukti; pengetahuan ini tercipta dari pemahaman yang mendalam tentang praktik dalam birokrasi dan pemahaman tentang konteks operasional; pengetahuan ini membutuhkan pengetahuan orang dalam dan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan harapan para pembuat keputusan. Sebagai bentuk pengetahuan profesional, pengetahuan birokrasi memberikan kontribusi signifikan terhadap proses kebijakan. Tanpa pengetahuan birokrasi yang kuat, menggunakan pengetahuan ilmiah dan lokal untuk pengaruh kebijakan dapat menimbulkan tantangan. Pengetahuan birokrasi sering menjadi penjaga gawang dan tidak boleh diremehkan. Namun, yang lebih buruk (dan ini sering terjadi di Indonesia) 'pengetahuan birokrasi' tidak lebih dari sekadar kumpulan laporan, pertemuan pakar, dan lokakarya.

Jenis pengetahuan ketiga, **pengetahuan lokal**, hanya akan dibahas secara singkat di sini, karena ini adalah subjek dari sisa buku ini. Pengetahuan lokal muncul dari pengalaman dan praktik masyarakat. Kadang-kadang disebut sebagai pengetahuan masyarakat (Jones et al, 2012), pengetahuan pengalaman atau pengetahuan racikan (*craft-knowledge*)⁹. Durose dan Richardson (2016) merujuk Henry Mintzberg yang menyatakan bahwa kebijakan tidak boleh hanya bergantung pada sains, tetapi juga pada 'seni', yang mencakup antara lain pengetahuan lokal. Banyak pengetahuan yang kita miliki sebagai individu adalah pengetahuan pengalaman. Ini adalah pengetahuan yang kita miliki tentang bagaimana bertindak dalam masyarakat kita, nilai-nilai apa yang penting dalam masyarakat tempat kita hidup, dan apa yang akan memberi kita akses atau membuat kita terbuang. Kita belajar cara menyeberang jalan menggunakan pengetahuan pengalaman - kita belajar bahwa gerakan tangan membantu kita, atau bahwa di beberapa tempat kita harus menyeberang di lampu lalu lintas. Kerangka yang dikembangkan oleh FAO (2004) adalah titik awal yang berguna untuk menavigasi berbagai bentuk tipe pengetahuan lokal:

- Pengetahuan umum yang dimiliki oleh sebagian besar orang di masyarakat – misalnya hampir semua orang tahu cara memasak nasi (atau makanan pokok setempat).
- Pengetahuan bersama dipegang oleh banyak orang, tetapi tidak semua, anggota masyarakat - masyarakat desa yang memelihara ternak akan tahu lebih banyak tentang peternakan daripada mereka yang tidak memiliki ternak.
- Pengetahuan khusus dimiliki oleh beberapa orang yang mungkin memiliki pelatihan khusus atau magang - hanya beberapa penduduk desa yang akan menjadi tabib, bidan atau pandai besi.

9 Pengetahuan racikan seringkali bersifat *tacit*, tersirat, pengetahuan yang kita miliki untuk mengerjakan sesuatu. Seringkali tidak tersirat namun diwariskan secara verbal atau dengan memberikan contoh/kebiasaan. Lihat, misalnya tulisan Wood (2006). Pengetahuan eksperimental diuraikan sebagai “kebenaran yang didasarkan pengalaman pribadi” (Borkman, 1976).

Pengetahuan lokal sering tersirat atau secara tak terlihat dimiliki oleh masyarakat dalam suatu masyarakat. Artinya, kita mempelajarinya dengan mengamati orang lain atau secara *trial and error*. Kita jarang mengartikulasikan atau mendokumentasikannya. Kita belajar dari waktu ke waktu, bertindak dan melihat bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita. Pengetahuan lokal membantu kita memahami bagaimana bertindak di rumah kita, di tempat kerja kita dan dengan teman-teman kita. Ini membantu kita memahami apa yang sehat dan apa yang berbahaya. Ini membantu dengan hal-hal praktis di bidang pertanian juga, seperti Grenier (1998: 50) mencatat dari sebuah studi di Bali bahwa, 'pengetahuan deskriptif desa untuk pohon, bambu, dan sumberdaya tanah, setidaknya, setara dengan, dan mungkin lebih rinci dari, data yang sesuai dari peneliti ilmiah yang terlatih'. Pengetahuan lokal dihasilkan oleh warga dari berbagai masyarakat yang berbeda dalam percakapan sehari-hari dan forum, sering diartikulasikan dalam masyarakat sipil dan melalui partisipasi masyarakat. Ini adalah bagian dari wacana kontekstual dan hidup, diperebutkan melalui interaksi sehari-hari dan melalui interpretasi oleh masyarakat dari berbagai bentuk pengetahuan yang merupakan bagian dari pengalaman hidup mereka - modal sosial yang memungkinkan individu untuk menjadi warga negara dan membangun masyarakat.

Tantangan untuk menggunakan pengetahuan lokal dan membagikannya dengan masyarakat lain, adalah bahwa penerusannya dilakukan melalui tradisi lisan dan belum dikodifikasikan. Kodifikasi akan membuat pengetahuan ini dapat diakses untuk kemudian digunakan dan disebarkan kepada pembuat kebijakan dan masyarakat lain, seperti yang akan kita lihat di Bab 5. Mengkodifikasi pengetahuan lokal juga berisiko membirokratiskan dan membekukannya sejak dini.

Pengetahuan lokal dilihat oleh mereka-mereka yang memilikinya sebagai produksi bersama antara masyarakat dan lingkungan mereka¹⁰.

10 Proses evolusi bersama (co-evolution) merujuk ke suatu proses saling beradaptasi yang berkesinambungan dan dinamis antara umat manusia dan lingkungan alamnya. Teori co-evolution menunjukkan bagaimana dunia sosial (sebagai contoh sistem pengetahuan) dan sistem ekologi saling terkait dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Co-evolution membawa kepada proses adaptasi yang ajeg/konstan dalam suatu lingkungan

Dengan demikian, pengetahuan ini terus berkembang dan berubah, seperti halnya bentuk-bentuk lain dari perubahan pengetahuan dengan pembelajaran baru dan situasi baru. Pengetahuan lokal juga berdasar pada tempat dan kepemilikannya lebih bersifat tersebar, alih-alih terpusat. Adalah kelompok-kelompok tertentu (baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, petani, nelayan, dll.) yang memiliki pengetahuan lokal tertentu dan mengembangkannya sebagai bagian dari kelangsungan hidup dan pembangunan sosial ekonomi mereka. Studi kasus kami menggunakan berbagai definisi pengetahuan lokal:

- Sistem pengetahuan - tentang pertanian dan adaptasi iklim (PUSKA), melawan penambangan (POLGOV UGM), tentang konservasi hutan (BIGS) dan kehidupan berbasis sungai (LK3).
- Inovasi lokal - ekonomi lokal masyarakat (YKU), atau sistem asuransi kesehatan masyarakat (LAHA).
- Praktik masyarakat setempat - mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan, misalnya, berburu ikan paus (Poros Photo), pengelolaan air berbasis klan (Pikul), perikanan ramah lingkungan (PATTIRO) dan pengelolaan air berbasis masyarakat (PKPM).

Aktor kunci di ruang ini adalah lembaga advokasi, tokoh masyarakat, pemimpin agama dan praktisi pengobatan tradisional. Di sini juga ada tumpang tindih dengan aktor di ruang pengetahuan profesional. Seperti yang akan kita lihat di Bab 6, organisasi advokasi dapat memainkan peran yang sangat penting karena keberhasilan mereka tergantung pada pemahaman yang baik tentang ruang politik, tetapi mereka biasanya berangkat dari keinginan melindungi masyarakat pada masalah yang sangat penting bagi kepemimpinan dan seringkali tertanam dalam pengetahuan lokal (contohnya adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN).¹¹

yang terus berubah yang kemudian akan mengarah kepada keberagaman ((Blaikie, 1992, seperti dikutip dalam FAO (tanpa tahun)).

11 <http://www.forestpeoples.org/partners/aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman->

Interaksi antara sumber pengetahuan: pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat

Pengaruh kebijakan diperkuat ketika pengetahuan ilmiah, profesional dan lokal bekerja bersama. Kemampuan untuk bekerja di berbagai jenis pengetahuan ini adalah keterampilan khusus dari masyarakat yang berpengetahuan dan terlibat. Sering diwujudkan dalam kewirausahaan kebijakan (*policy entrepreneur*) (Kingdon, 1984). Kewirausahaan kebijakan dapat keluar dari segala bentuk pengetahuan, tetapi ialah seseorang yang mampu mengintegrasikan bentuk-bentuk pengetahuan lain ke dalam argumen dan advokasi mereka, dan melalui itu membawa sisi-sisi yang berbeda bersama di sekitar agenda bersama. Mereka adalah pemimpin dalam proses ko-produksi pengetahuan. Kasus-kasus menggambarkan pentingnya hubungan (antara jenis pengetahuan dan masyarakat yang berbeda dalam proses kebijakan), komunikasi (ide, nilai dan keyakinan), jaringan (untuk menggunakan sumberdaya lain untuk memahami proses politik) dan perubahan kelembagaan. Sementara pengetahuan lokal diterapkan oleh produsen dan aktor sosial itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari mereka, pengetahuan ilmiah (dan pada tingkat yang lebih rendah pengetahuan profesional) disebarkan oleh agen yang tidak mempraktikkannya sendiri (Olivier de Sardan, 2005: 159).

Konsisten dengan argumen ini, Durose dan Richardson (2016) membuat kasus untuk model produksi bersama pembuatan kebijakan, memperlakukan semua bentuk pengetahuan sebagai bagian dari proses. Mengutip beberapa peneliti lain, mereka mengusulkan pendapat bahwa 'produksi bersama [*co-production*] mengandung nilai melibatkan berbagai bentuk pengetahuan dan keahlian dalam proses kebijakan, dan bahkan mengarah pada pembuatan sintesis dari semua "bahan" berbeda dari "potongan teka-teki kebijakan', sambil memastikan bahwa berbagai bentuk pengetahuan ini 'terintegrasi, tidak dimusnahkan, tidak (lenyap) terserap' (Durose dan Richardson, 2016: 40-41).

Setiap bentuk pengetahuan memiliki beberapa jenis organisasi

terkait. Tetapi kategori ini tidaklah kaku dan hanya mewakili bidang tempat pengetahuan dominan yang dihasilkan terjadi di setiap jenis organisasi. Perguruan tinggi memberikan pengetahuan profesional di samping mandat mereka di sekitar akumulasi pengetahuan ilmiah, sementara lembaga penelitian kebijakan dapat melakukan penelitian atau menjadi bagian dari pengetahuan lokal di bidang tertentu. Lembaga advokasi dapat menggunakan semua jenis pengetahuan. Mereka adalah aktor pengetahuan independen dalam ruang pengaruh kebijakan. Tetapi mereka sering bertindak bersama dengan kelompok masyarakat, dan sering lebih kuat ketika mereka bertindak bersama membawa beberapa jenis bukti untuk menghadapi masalah kebijakan atau melakukan upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan.

Di luar argumen demokratis, ada alasan empiris mengapa mendiversifikasi sumber pengetahuan dalam pembuatan kebijakan bersifat penting. Sebagaimana diuraikan dalam *Australian Women in Leadership Strategy* (DFAT, 2015), bukti empiris menunjukkan bahwa beragam tim dan sumber pengetahuan menghasilkan hasil yang lebih kuat. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa organisasi dengan sejumlah besar perempuan di jajaran pimpinan bekerja lebih baik dalam berbagai indikator kinerja daripada organisasi yang jajaran pimpinannya cenderung bergender homogen. The “*Wisdom of the Crowd*”, seperti yang disebut Surowiecki, lebih unggul daripada keputusan yang diambil oleh segelintir orang saja (Surowiecki, 2004). Ada *business case* untuk meningkatkan keragaman dan melibatkan lebih banyak orang dalam pengambilan keputusan: hasilnya adalah keputusan lebih baik.

“Pengetahuan ke Kebijakan” dan pengetahuan lokal

Seperti yang kita lihat dalam Pendahuluan, ‘pengetahuan untuk kebijakan’ adalah proses saat data, bukti dan bentuk pengetahuan lain diciptakan, berubah menjadi kebijakan dan diimplementasikan dalam ‘pusaran energi politik, kepentingan pribadi dan lobi’ (Banks, 2009: 9). Ke dalam pusaran inilah kita sekarang bergerak.

Proses ini tidak hanya tentang data yang lebih canggih dan dapat

diakses, tetapi pemahaman yang lebih baik tentang konteks sosial pengetahuan dan hubungan ilmu sosial dengan pertimbangan politik. Pembuatan kebijakan membutuhkan lebih banyak bukti dan argumen yang sensitif secara kontekstual yang dibawa untuk menanggung masalah kebijakan atau masalah sosial - menyelidiki peningkatan jumlah perspektif yang relevan dan menambahkan lebih banyak sumber pengetahuan. Ini adalah pemahaman yang baik tentang interaksi yang membangun realitas, cara empiris tertanam dalam normatif. Jika Stephen Lukes (1972) benar bahwa kekuasaan membentuk preferensi kita, kita harus memiliki pemahaman yang lebih cerdas tentang konteks politik dan sosial dari pembuatan kebijakan.

Pengetahuan lokal berjalan seirama dengan pengetahuan ilmiah atau pengetahuan profesional. Studi kasus kami menunjukkan cara yang berbeda bahwa masyarakat dapat menghasilkan wacana mereka sendiri dan mereka sering bertindak menentang kerangka pembangunan yang dominan. Untuk itu, masyarakat setempat perlu diperkuat, sehingga memungkinkan mereka untuk membatasi ekstraksi pengetahuan lokal tanpa pandang bulu, untuk merundingkan bagaimana cara penelitian dilakukan, untuk memiliki suara dalam hal kekayaan intelektual pengetahuan lokal, dan untuk membela pengetahuan lokal sebagai harta mereka sendiri yang merupakan milik masyarakat mereka sementara tidak berbalik melawan 'pihak-pihak lain'. Dalam situasi ini, pengetahuan lokal membutuhkan definisi dan peran yang lebih jelas sebagai 'akal sehat bagi orang-orang yang memiliki kepekaan komunal yang sama' (Geertz, 1983).

Kasus BIGS dalam buku ini (studi kasus 6, Bab 4) melihat bagaimana pengetahuan lokal dan pengetahuan profesional harus bersatu untuk memecahkan tantangan. Ini mengingatkan kita bahwa prosesnya bisa panjang dan terperinci dan terkadang membutuhkan perubahan kelembagaan. BIGS mengkodifikasi pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan di pulau Jawa yang padat penduduk. Di Jawa, deforestasi, erosi dan hilangnya lapisan atas tanah menyebabkan berkurangnya produktivitas dan banjir besar di banyak daerah. Sementara

mengkodifikasi pengetahuan dan praktik lokal yang dapat mengurangi deforestasi, BIGS mulai membawa pejabat pemerintah daerah ke dalam diskusi dan untuk melihat praktik yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengetahuan lokal ke dalam kebijakan untuk konservasi hutan.

Kesimpulan

Jadi, pengetahuan siapa yang penting dalam proses kebijakan? Kami telah membuat argumen bahwa ada berbagai bentuk pengetahuan dan kesemuanya memainkan peran dalam kebijakan publik. Kami selanjutnya berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dan pengenalan terhadap berbagai bentuk pengetahuan yang ada dalam setiap proses kebijakan merupakan hal yang penting. Sebagai masyarakat, kita cenderung memberikan keistimewaan pada pengetahuan ilmiah tetapi kami telah mendiskusikan contoh-contoh bentuk pengetahuan lain, dan sebagaimana ditunjukkan oleh kasus-kasus dalam buku ini dengan jelas mengilustrasikan, pengetahuan lokal penting dan memainkan peran penting. Selain pengetahuan individual, interaksi juga berperan sangat penting.

Pengetahuan profesional sering menjadi tempat untuk menerjemahkan bukti ilmiah dan jenis pengetahuan lain ke dalam pengetahuan yang efektif secara politik yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan. Pengetahuan birokratis, misalnya, adalah fitur kunci dari banyak pengaruh kebijakan. Para birokrat tahu bagaimana sistem bekerja, mereka memahami bagaimana cara menyampaikan ide kepada pengambil keputusan, dan mereka dapat memblokir ide jika mereka mau. Produsen pengetahuan ilmiah harus belajar bagaimana menyajikan bukti mereka dengan cara yang relevan dengan kebijakan dan harus belajar bagaimana bekerja dengan birokrasi dan bentuk lain dari pengetahuan profesional untuk memiliki pengaruh. Pengetahuan lokal tidak selalu berinteraksi dengan mudah dengan birokrasi, tetapi dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk pengetahuan profesional lainnya dapat memainkan peran penting. Kadang-kadang interaksi tidak melalui

perantara tetapi melalui ide yang secara langsung menangkap imajinasi pembuat kebijakan.

Akhirnya, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa bukti dan pengetahuan tidak sendirian dalam mempengaruhi kebijakan (Glover, 2015). Produsen pengetahuan harus menyajikan bukti terbaik dan mereka harus mempresentasikannya dengan sangat persuasif. Tetapi para ilmuwan dan produsen pengetahuan lainnya harus mengakui bahwa bukti tidak selalu penting. Politik, keyakinan dan nilai-nilai memainkan peran sentral dan pengetahuan harus bergerak bersama pengaruh-pengaruh ini untuk menemukan tempatnya.

Pengetahuan lokal dalam pembuatan kebijakan demokratis

Sebagaimana dibahas dalam Pendahuluan, keragaman sumber pengetahuan adalah ciri khas pembuatan kebijakan yang sehat. Namun tidak semua jenis pengetahuan dihargai dan mendapat sumberdaya yang sama di Indonesia. Banyak organisasi masyarakat yang ragu untuk berhubungan terlalu dekat dengan pemerintah karena berbagai alasan. Dan oleh karenanya, teknokrat, ilmuwan, dan pengambil keputusan seringkali enggan untuk terlibat dengan pengetahuan lokal yang mereka hasilkan. Akibatnya, ada ketidakpercayaan timbal balik yang hanya bisa diatasi dengan interaksi yang lebih baik dan rasa hormat yang mendalam (Guggenheim, 2012; Rakhmani dan Siregar, 2016).

Bab ini berpendapat bahwa memberi perhatian pada pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat sangat penting untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik dan perwujudan demokrasi karena hal ini menyediakan konteks dan makna. Sektor pengetahuan suatu negara dapat ditingkatkan dengan membuka pembuatan kebijakan bagi partisipasi masyarakat dan mendemokrasikan ranah publik. Pendekatan-pendekatan ini, seperti yang akan kita lihat dalam bab-bab berikutnya yang memuat data empiris, dapat lebih berkelanjutan daripada desain-desain pembangunan *top-down* yang dihasilkan pemerintah dan para pakar. Bab ini akan dimulai dengan paparan historis mengenai pengambilan kebijakan publik dan bagaimana kebijakan dibuat. Selanjutnya diuraikan bagaimana kami membangun sebuah pernyataan

bahwa pengetahuan lokal merupakan prasyarat untuk demokratisasi pembuatan kebijakan dan peningkatan kebijakan publik.

Kajian mengenai makna dan pengetahuan lokal

Definisi pengetahuan lokal terutama ditemukan dalam literatur antropologis. Clifford Geertz (1983) mendefinisikan pengetahuan lokal sebagai pengetahuan yang dimiliki secara lokal, oleh masyarakat setempat, suatu sistem budaya yang menjadi akal sehat bagi orang-orang yang berbagi kepekaan komunal. Penekanannya di sini adalah pada makna; interpretasi budaya adalah 'bukan ilmu eksperimental dalam pencarian hukum tetapi ilmu interpretatif dalam pencarian makna' (Geertz, 1974: 5). Studi budaya politik dan kebijakan berpendapat bahwa keyakinan dan persepsi adalah bagian konstituen dari pemerintah dan pembuatan kebijakan. Politik harus dilihat tidak hanya sebagai persaingan atas sumberdaya yang langka, tetapi juga sebagai representasi dari praktik sejarah dan pengetahuan lokal (Cannadine and Price, 1987; Kertzer, 1988; Vincent, 1990; Gledhill, 1994; Schaffer, 1998; Olivier de Sardan, 2005; Bubandt, 2014). Representasi budaya adalah instrumen untuk wacana politik. Simbolisme politik, ritual dan representasi normatif digunakan untuk pelaksanaan kekuasaan dan dominasi yang sah.

Kurangnya pemahaman budaya dalam demokrasi secara negatif mempengaruhi makna dasarnya: sebuah citra politik yang kuat dari harapan dan otonomi. Untuk mencapai hal ini, 'demokrasi harus didorong oleh 'roh', mimpi sekuler kepercayaan dan hubungan timbal balik oleh rakyat dan untuk rakyat' (Bubandt, 2014: 13). Dalam sebuah studi tentang demokrasi dan kekerasan di Sri Lanka, Jonathan Spencer (2007: 15) mencatat bahwa ada sesuatu yang hilang 'jika kita bersikeras untuk mengecualikan makna lokal dari definisi kita tentang politik' (lihat juga Schaffer, 1998 untuk bagaimana memahami bentuk-bentuk lokal demokrasi di Senegal). Sama halnya, kurangnya makna dan konteks secara negatif akan mempengaruhi bagaimana pembuatan kebijakan diimplementasikan.

Sementara perspektif antropolog telah memberi kita pemahaman

penting tentang apa yang merupakan pengetahuan lokal (nilai, keyakinan dan makna) dan sifat pengetahuan lokal yang menggabungkan logika deskriptif dan logika tindakan (Yanow, 2003), analisis ekonomi-politik pengetahuan lokal membutuhkan konsep analitis tambahan, yang membantu kita untuk menganalisis dan memahami apakah produksi dan penggunaan pengetahuan lokal merupakan masukan atau lebih tepatnya hasil dari hubungan politik-ekonomi dalam masyarakat. Membedakan dimensi ekonomi-politik dari pengetahuan lokal dalam produksi dan penggunaannya, serta hubungan di antara mereka adalah penting, karena konteksnya beragam. Perspektif semacam itu membahas:

- Apa itu lokal?
- Orang (lokal) mana yang terlibat dan bagaimana?
- Definisi siapa yang berlaku?
- Siapa yang memiliki apa dan bagaimana kita tahu mereka melakukan / tidak melakukan?
- Siapa yang memutuskan penyerapan pengetahuan lokal?
- Siapa yang menang, siapa yang kalah?

Di sisi suplai (produksi pengetahuan), dimensi ekonomi-politik pengetahuan lokal dapat dianalisis dari perspektif sosio-ekonomi tentang struktur dan hierarki dalam masyarakat yang menghasilkan pengetahuan lokal karena ini adalah manifestasi kekuatan klasik yang akan membentuk struktur pengetahuan lokal. Dalam hal ini, pengetahuan lokal merupakan konsekuensi dari relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat; ia dihasilkan oleh dan melalui struktur dan tatanan tertentu, dan memiliki hubungan yang dominan dan subordinatif - pengetahuan lokal mencerminkan struktur otoritas dan kekuasaan dalam masyarakat - esensi politik. Masyarakat jarang menggunakan pengetahuan lokal secara eksklusif; mereka mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan profesional dari pengalaman hidup mereka sendiri. Ini adalah konsep pengetahuan lokal yang lebih luas yang mencerminkan hubungan antara ketiga jenis pengetahuan, dan yang memainkan peran penting dalam partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.

Pada sisi permintaan (pembuatan kebijakan), pertanyaan ekonomi-

politik adalah tentang memahami insentif atau disinsentif yang mendukung atau menghambat penggunaan pengetahuan lokal; hal ini menginformasikan pengetahuan apa atau mekanisme perantara mana yang paling tepat untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, serta mengapa beberapa jenis pengetahuan lebih dapat diterima atau cocok daripada yang lain. Berdasarkan studi kasus dari negara-negara Asia Tenggara, Pellini et al (2012) menyajikan kerangka kerja untuk memahami lanskap: bukti teknis saja tidak efektif dalam mempengaruhi pasar pengetahuan-ke-kebijakan lokal. Hanya pasokan inklusif dan antar-disiplin dari berbagai jenis pengetahuan oleh pemangku kepentingan yang berbeda akan menghasilkan hasil positif melalui pembentukan lingkungan pemerintahan lokal yang lebih akuntabel, partisipatif dan transparan.

Seperti yang terlihat pada Gambar 2, Bab 1, pengembangan kebijakan tidak terjadi dengan cara yang dapat diprediksi. Ini berarti kita perlu fokus pada isu-isu nilai, konteks dan kekuasaan, masalah yang penting bagi orang-orang di tempat mereka tinggal dan bekerja. Seperti yang akan kita lihat di Bab 4 hingga 6, ada banyak inisiatif pengetahuan menarik yang muncul dari solusi spontan individual dan masyarakat di Indonesia. Ini kadang-kadang bisa lebih berkelanjutan daripada desain pembangunan *top-down* para pemimpin dan pakar negara. Inisiatif-inisiatif ini bersifat *trial and error*, iteratif (berulang), dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan alam dan buatan manusia - singkatnya, pada pengetahuan lokal yang muncul dari pengalaman dan praktik yang dialami.

Pengambilan kebijakan publik, kekuatan birokrasi dan pengetahuan lokal

Mari kita sejenak melihat ulang hubungan historis antara kebijakan publik dan berbagai bentuk pengetahuan, yang akan memungkinkan kita untuk lebih memahami pentingnya pengetahuan lokal saat ini. 70 tahun terakhir telah melihat munculnya tiga gelombang global pembuatan kebijakan dan manajemen publik, dicirikan sebagai, dari mendayung ke

mengarahkan dan melayani (*From Rowing to Steering to Serving*) (Denhardt dan Denhardt, 2007).

Baik *Rowing* dan *Steering* memberikan kekuasaan utama bagi negara dalam manajemen publik. Pada fase *Rowing*, setelah Perang Dunia Kedua, kelahiran manajemen publik modern didominasi oleh teknokrat dengan pemikiran rekayasa sosial. Mereka menetapkan kebijakan dan sangat banyak berada di puncak piramida dalam manajemen publik (Weilar, 2009). Pada 1980-an, 'manajemen publik baru' muncul untuk mengatasi beberapa keterbatasan pendekatan sebelumnya (Hood, 1991). Itu memiliki penekanan pada menciptakan kembali pemerintah untuk mengadopsi pendekatan sektor swasta (Osborne dan Gaebler, 1993). Fase *Steering* ini mengakui pada tingkat tertentu bahwa kegagalan sebelumnya adalah kurangnya peran masyarakat. Dalam Manajemen Publik Baru, masyarakat memilih antara barang publik, mengambil ideologi pasar bebas sebagai basis mereka. Namun layanan terus dirancang dan disampaikan oleh spesialis teknis dalam proses yang dimaksudkan untuk dimediasi oleh permintaan publik. Apa yang gagal disadari oleh pendekatan ini adalah pemerintah menjaga publik dan juga swasta. Pendekatan ini tidak dapat mengakomodasi kebaikan publik dan karena itu gagal.

Aliran-aliran manajemen publik baru ini gagal sebagian karena mereka tidak memperhitungkan pengetahuan lokal dan tidak secara efektif melibatkan masyarakat negara. Wildavsky dan Pressman (1973) menyampaikan poin yang sama dalam studi soal implementasi kebijakan di Amerika Serikat. Mereka menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan pada implementasi tidak hanya tentang kompleksitas mekanisme kelembagaan tetapi juga bahwa kebijakan yang dirancang di tingkat nasional di Washington DC tidak memperhitungkan perbedaan regional, perbedaan desa-kota, dan sebagainya. Dengan kata lain, mereka tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masyarakat lokal dan dirancang tanpa manfaat dari masukan masyarakat.

Karena apa yang dilihat sebagai kegagalan manajemen publik baru untuk melayani kepentingan publik inilah, dua dekade terakhir telah

dipenuhi oleh seruan untuk memperdalam demokrasi melalui peran baru untuk administrator publik, transparansi informasi dan akuntabilitas sosial. Terkadang disebut ‘layanan publik baru’ (Denhardt dan Denhardt, 2007) atau ‘demokrasi deliberatif’ (Gastil dan Levine, 2005), fokusnya adalah pada peran pembuatan kebijakan dan manajemen publik untuk melayani publik, bukan sebaliknya. Dalam keterlibatan yang lebih mendalam dari ‘*co-governance*’ (Ackerman, 2004), masyarakat mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan, pemantauan dan panggilan organisasi layanan dan pemerintah untuk memperhitungkan melalui sejumlah mekanisme, misalnya, ombudsman, mobilisasi publik, media massa atau sistem pengadilan. Ini bergerak di luar ‘partisipasi ritual’ dari proses perencanaan tradisional *tick-the-box* (Cooke dan Kothari, 2001, Hickey dan Mohan, 2004) dan memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih konstruktif dalam memantau dan memastikan bahwa standar pelayanan minimum tercapai .

Transisi dari ‘pemerintah ke tata kelola pemerintahan’ ini memiliki implikasi penting bagi diskusi kita tentang bukti dan pengetahuan. Kegagalan paradigma manajemen publik lama dan baru juga merupakan kegagalan negara yang berfokus pada sumber pengetahuan yang terbatas. Saat ini, pemerintah bukan lagi satu-satunya pemegang pengetahuan. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki pengetahuan dan masalah apa yang adil dari kontestasi berbagai jenis pengetahuan, baik yang digunakan untuk kebijakan maupun dalam produksi pengetahuan. Dengan demikian, peran *serving* pemerintah yang baru adalah, di satu sisi, untuk memfasilitasi dan mewujudkan sesuatu (menjadi ‘Indonesia Melayani’) dan, di sisi lain, menyediakan ruang untuk kontestasi dan berbagai sumber pengetahuan. Pejabat pemerintah perlu berinteraksi dengan orang bukan sebagai klien atau benda tetapi sebagai warga negara dengan hak dan pemegang pengetahuan lokal yang berharga. Keterampilan baru yang perlu dipelajari oleh pejabat pemerintah termasuk cara membuat ruang untuk keterlibatan masyarakat dalam keputusan dan pengawasan kebijakan, cara menugaskan (daripada menyediakan) berbagai layanan publik, dan

bagaimana memimpin negosiasi dan memobilisasi persetujuan tentang kebijakan lokal yang diinginkan.

Bekerja secara Politis

Kebijakan publik adalah produk politik. Untuk meningkatkan penggunaan pengetahuan lokal dalam pembuatan kebijakan publik, kita perlu bekerja dengan pengetahuan lokal melalui dimensi politiknya. Pengetahuan lokal sebagai sensibilitas komunal bersama adalah representasi dari keprihatinan atau aspirasi bersama masyarakat. Dari perspektif politik, pengetahuan lokal adalah kelompok kepentingan. Pengetahuan lokal berada di bawah satu definisi yang berpengaruh dari kelompok kepentingan (Martini, 2012: 2): ‘asosiasi individu atau organisasi yang atas dasar satu atau lebih keprihatinan bersama, berupaya memengaruhi kebijakan publik demi kebajikannya’. Dalam konteks pembuatan kebijakan, kita bisa melihat pengetahuan lokal sebagai aspirasi politik bersama. Dalam hal ini, domain kontestasi dengan demikian bukan tentang bagaimana membuat pengetahuan lokal ilmiah sehingga dapat bersaing dengan pengetahuan ilmiah dalam hirarki pengetahuan, tetapi untuk mengakui pentingnya kontestasi dengan kelompok-kelompok kepentingan lain dalam mempengaruhi kebijakan. Produsen pengetahuan lokal, sebagai kelompok kepentingan, dapat fokus pada posisi mereka sebagai yang mewakili kepentingan publik dan memiliki pengetahuan lokal yang akan bersaing dengan kepentingan lain (ilmiah dan profesional).

Pengetahuan lokal, melalui platform representasi politik, dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui aktor perantara (anggota DPRD, aktor masyarakat sipil atau bahkan yang disebut pelobi profesional) karena berusaha mempengaruhi tindakan legislatif. Upaya-upaya ini untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah, partisipasi dalam audiensi publik, penyusunan laporan kepada anggota pemerintah tentang isu-isu kebijakan tertentu, serta melalui media sosial dan

pengaturan wacana publik di media konvensional. . Dalam proses ini, sebagaimana dicatat oleh Bievre (2007), pengetahuan lokal harus bekerja dengan berbagai jenis pengetahuan dan sumberdaya, seperti keahlian dalam masalah kebijakan, informasi tentang pendapat pembuat kebijakan lain, dan organisasi masyarakat.

Mengubah pengetahuan lokal menjadi sebuah kekuatan penekan dan platform kelompok kepentingan untuk menginformasikan kebijakan bukanlah kegiatan yang korup atau tidak sah¹². Ini adalah tentang bekerja secara politis untuk memastikan bahwa aspirasi bersama masyarakat diadopsi dalam kebijakan publik. Platform kelompok kepentingan dapat meningkatkan pembuatan kebijakan, dan mereka memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah dengan memberikan persetujuan masyarakat serta tekanan dalam proses legislatif dan regulasi. Di negara yang terdesentralisasi seperti Indonesia, pengaruh kelompok kepentingan melalui lobi adalah instrumen alternatif dari pengaruh politik *vis-à-vis* korupsi yang berpusat di sekitar partai politik (Keefer, 2002).

Perlu dicatat bahwa keuntungan dan kerugian dari platform ini akan tergantung pada seberapa besar kekuatan kelompok kepentingan tersebut, serta bagaimana kekuatan didistribusikan di antara mereka (Martini, 2012). Seperti yang terlihat dalam satu studi kasus dalam buku ini, pengaruh yang tidak proporsional dari klan dominan dalam kebijakan perikanan pesisir di Maluku, misalnya, dapat menyebabkan pengaruh yang tidak semestinya atau penunggangannya oleh kaum elit (*elite capture*) yang meminggirkan klan lain; sementara industri perburuan paus yang didominasi laki-laki di Lembata di Nusa Tenggara Timur mungkin telah

12 Terdapat perdebatan pro dan kontra terkait peran kelompok-kelompok berbasis kepentingan (interest groups) dalam pembuatan kebijakan (Zinnbauer, 2009; Martini, 2012). Bekerja dengan kelompok ini bukanlah sebuah hal yang tidak patut karena sifatnya yang rentan kepentingan, namun merupakan merupakan sebuah elemen kunci dalam proses pengambilan kebijakan karena pada dasarnya prosesnya adalah sebuah kontestasi kepentingan. Martini (2012) selanjutnya menguraikan manfaat dan kelemahan bekerja melalui kelompok berbasis kepentingan, terutama soal sejauhmana besar pengaruh kuasa yang dimiliki kelompok ini dan bagaimana kuasa ini didistribusikan diantara mereka.

mengabaikan kebutuhan atau aspirasi perempuan di sekitar partisipasi dalam berburu ikan paus. Hubungan antara pembuat kebijakan dan kelompok kepentingan berjalan berdasarkan etika yang baik yang memisahkan demokrasi partisipatif dari pengaruh yang tidak semestinya.

Fokus utama di sini adalah pengetahuan lokal yang digunakan masyarakat untuk mempengaruhi proses kebijakan. Tetapi ada bentuk lain dari pengetahuan lokal. Salah satunya adalah pengetahuan agama, yang sekarang akan sejena kita perhatikan. Ketika kita berpikir tentang proses menggunakan pengetahuan dan bukti, seringkali asumsi yang mendasari adalah bahwa jenis-jenis pengetahuan yang sah untuk mempengaruhi kebijakan, seperti penelitian, data dan bukti, semuanya sekuler. Namun, ada juga pengetahuan lokal yang mengacu pada kitab suci dan praktik keagamaan dan yang dapat berdampak positif terhadap kebijakan publik.

Kotak 2. Pengetahuan agama sebagai bentuk pengetahuan lokal¹³

Sejak Zaman Pencerahan dalam pemikiran Barat, agama telah dipisahkan dari hal-hal yang disebut sekuler. Orang sekuler telah diistimewakan sebagai wilayah rasional, dan ilmiah, modern. Agama dipandang sebagai wilayah mistis, emosional, dan pra-modern. Dasawarsa keistimewaan sekuler memuncak dalam tesis sekularisasi - bahwa ketika negara-negara semakin maju, mereka akan sekuler. Tesis itu sekarang telah dibantah (Gorski et al, 2012). Bukti empiris menunjukkan bangsa demi bangsa maju secara ekonomi dan politik, sementara perhatian publik dan swasta terhadap isu-isu agama tidak berkurang sama sekali, melainkan meningkat. Indonesia adalah contoh yang bagus untuk itu. Para sarjana sekarang berbicara tentang 'dunia pasca-sekuler'. Munculnya perhatian ilmiah terhadap agama di antara para ilmuwan politik dan bahkan para ekonom layak mendapatkan

13 Terima kasih khusus untuk Robin Bush yang telah menyusun bagian ini

perhatian.

Fenomena yang sama berlaku di dunia donor dan di antara mereka yang peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Di masa lalu pengetahuan agama dianggap sebagai benteng sekularisme, tetapi dalam dekade-dekade tahun 2000-an, Bank Dunia, Departemen untuk Pembangunan Internasional (DfID) Inggris, dan donor lain telah mendanai penelitian dan proyek yang meneliti peran agama dalam pembangunan. Pekerjaan ini berkisar dari upaya instrumental untuk melibatkan masyarakat agama dalam inisiatif pembangunan (sesuatu yang Indonesia memiliki sejarah yang panjang), untuk pertimbangan tentang bagaimana kebijakan negara dapat dipengaruhi oleh masyarakat agama.

Di Asia, pemikiran politik dan filsafat tidak membatasi agama dari sekuler dengan cara yang sama seperti pemikiran politik barat, dan hubungan yang jauh lebih bernuansa dan terintegrasi antara agama dan politik. Prinsip pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, Pemerintah Indonesia mengakui enam agama resmi. Ada hubungan langsung antara agama dan kebijakan, dan khususnya implementasi layanan publik. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki KTP yang memvalidasi keanggotaan mereka dari salah satu dari enam agama ini tidak memiliki akses ke layanan publik, tidak dapat menghadiri sekolah umum, tidak dapat menikah secara hukum dan tidak dapat mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka.¹⁴

Ini menimbulkan pertanyaan tentang pengetahuan agama siapa yang penting: Siapa yang memiliki wewenang untuk menentukan batasan bagi enam agama yang diakui negara? Siapa yang berada di dalam dan siapa berada diluar? Pada pengetahuan religius apa otoritas

-
- 14 Kementerian Dalam Negeri telah secara terbuka menyatakan bahwa warga negara tidak harus mengisi kolom 'agama' di KTP mereka, tetapi ini belum secara resmi diterjemahkan kedalam kebijakan atau hukum, sehingga belum diketahui semua pihak. Selanjutnya, pada bulan November 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengikut agama pribumi tidak harus mengosongkan kolom 'agama' di KTP mereka, dan hal ini pada intinya merupakan pengakuan terhadap keberadaan agama pribumi. Apakah ini akan mengakibatkan berakhirnya kebijakan diskriminatif berdasarkan afiliasi agama masih harus dilihat.

itu seharusnya didasarkan? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting dalam menentukan bagaimana kebijakan publik dilaksanakan, dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari warga negara tergantung pada layanan tersebut. Beberapa cendekiawan Indonesia, di antaranya Zainal Abidin Bagir dari Universitas Gajah Mada, mengeksplorasi peran lembaga negara seperti Departemen Agama, lembaga negara semu seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi non-pemerintah, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dalam mendefinisikan identitas agama dan karena hal ini akan memberikan warga negara tertentu akses ke layanan publik, sementara orang-orang lain tidak (Bagir 2014).

Di Asia pada umumnya, dan di Indonesia khususnya, ada pandangan bahwa ketika agama meresap kedalam kehidupan sehari-hari di banyak tingkatan, agama harus juga dipertimbangkan ketika mengembangkan dan menerapkan kebijakan publik. Tingkat kenyamanan dengan hubungan berpori antara agama dan politik, terutama ketika menyangkut kebijakan, memungkinkan kita untuk mempertimbangkan agama, dan pengetahuan agama, sebagai salah satu dari banyak faktor yang harus kita perhitungkan saat kita berusaha mengurangi kemiskinan, meningkatkan layanan publik, dan menstimulasi kesejahteraan ekonomi melalui kebijakan publik. Seperti diilustrasikan dalam kisah Pusat Manajemen Bencana Muhammadiyah di bawah ini, Indonesia memberikan contoh positif tentang bagaimana pengetahuan agama dan otoritas keagamaan dapat meningkatkan akses ke masyarakat yang terpinggirkan, memungkinkan penyebaran pesan dan praktik kesehatan dan pendidikan yang penting melalui jaringan nasional yang luas yang dimiliki organisasi keagamaan, atau memberikan legitimasi kepada kebijakan sosial pemerintah.

Salah satu organisasi tanggap bencana yang paling aktif dan terkenal di Indonesia, Pusat Manajemen Bencana Muhammadiyah (MDMC), berbasis agama. Setelah tsunami Aceh 2004, jaringan-jaringan Muhammadiyah ditarik oleh lembaga-lembaga bantuan internasional dan nasional, karena mereka dapat bergerak cepat untuk masuk ke daerah-daerah yang terkena bencana. Masyarakat lokal

mempercayai mereka lebih dari pemerintah, dan mereka dapat dengan cepat memobilisasi dukungan, donasi dan bantuan dari keanggotaan besar mereka. Ketika pengalaman ini diulang setelah gempa Yogyakarta 2006, gempa Sumatera 2008 dan Gn. 2009 Letusan Merapi, para pemimpin Muhammadiyah menyadari bahwa mereka dapat memberikan kontribusi unik terhadap respons bencana di Indonesia. Akibatnya, mereka secara resmi mendirikan MDMC. MDMC membantu menerapkan kebijakan tanggap bencana di Indonesia, termasuk upaya pencegahan dan mitigasi. Lembaga ini jugamemberikan pelatihan mitigasi bencana di sekolah-sekolah dan rumah sakit di seluruh negeri. Tetapi bagaimana MDMC menggunakan pengetahuan agama dalam pekerjaannya, yang merupakan respon kemanusiaan dan oleh karena itu tidak berdasarkan agama? MDMC telah memanfaatkan pelatihan agama untuk menghasilkan beberapa makalah seperti, 'Theologi bencana', dan, 'Ideologi hak asasi manusia pascabencana'. Makalah ini mengeksplorasi bagaimana ajaran agama membantu kita memahami bagaimana menanggapi pada saat bencana, dan tentang tanggung jawab orang untuk membantu semua manusia, terlepas dari agama. Iman dapat memberikan motivasi dan kenyamanan kepada orang-orang yang kehilangan orang-orang tercinta atau rumah-rumah akibat bencana. MDMC menggunakan posisinya yang unik sebagai organisasi tanggap bencana berbasis agama untuk membawa dua dunia pengetahuan agama dan kebijakan bencana bersama-sama dengan cara yang lebih efektif.

Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Partisipatif

Pembangunan partisipatif adalah melibatkan masyarakat secara sistematis dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh kelompok masyarakat, menghubungkan mereka yang telah mengembangkan metode partisipatif untuk konsultasi, perencanaan dan pemantauan untuk agenda pemerintahan yang baru (Manor, 1998; Blair, 2000; Pimbert, 2001; Fung dan Wright, 2003). Tujuan dari keterlibatan masyarakat bukan untuk memastikan bahwa setiap orang senantiasa

mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi untuk mengubah hubungan kekuasaan kedalam bentuk rekonsiliasi yang lebih adil jika terjadi klaim-klaim yang saling bersaing¹⁵, dan untuk menambah keragaman ke klaim pengetahuan.

Pembangunan partisipatif ditahapan awal sering diukur dengan kehadiran masyarakat dalam pertemuan. Proyek pengembangan akan dianggap 'partisipatif' jika kita dapat menunjukkan data terpilah tentang jumlah masyarakat (berdasarkan jenis kelamin, idealnya) yang menghadiri pertemuan resmi. Ini adalah ukuran yang sangat rendah untuk partisipasi. Pemikiran terbaru soal pembangunan partisipatif lebih menekankan pada partisipasi yang substantif, pada isi ketimbang bentuk, yaitu soal seberapa jauh pengetahuan ilmiah, profesional, dan lokal digunakan dalam pembuatan kebijakan. Dengan kata lain, berapa banyak proses pengembangan kebijakan yang diinformasikan oleh ide dan aspirasi masyarakat: seberapa peka terhadap budaya, seberapa sensitif gender, seberapa inklusif? Mendudukan masyarakat sebagai pusat dari proses pembangunan adalah soal relasi kuasa sehingga penilaian terhadap partisipasi masyarakat harus dilihat dengan kerangka relasi kuasa negara dan masyarakat, bukan hanya soal prosedur. Di bawah pemikiran baru tentang pembangunan partisipatif ini, faktor utamanya bukanlah partisipasi masyarakat, tetapi demokratisasi pengetahuan: sejauh mana pengetahuan lokal disesuaikan dalam proses pembuatan keputusan pembangunan. Apa yang diketahui dan dipraktikkan orang dari waktu ke waktu harus menjadi bagian dari perancangan kebijakan dan proyek yang berusaha memberdayakan dan mengembangkan orang-orang ini, yang didefinisikan sebagai tersisihkan atau terpinggirkan.

Ada bahaya bahwa pengetahuan lokal dapat menjadi elitis ketika digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui mobilisasi (Cooke dan Kothari, 2001). Pelembagaan *gampong* dalam provinsi Aceh (lihat Bab 4, studi kasus 7) adalah salah satu contohnya. Kebijakan, proyek, dan program dirancang dari atas. Di tingkat lokal, para pemimpin

15 Owen Barder, dikutip dari <http://oxfamblogs.org/fp2p/is-engaging-citizens-apanacea-a-swindle-or-a-bit-of-both-plus-why-im-excited-about-moocs/>.

lokal memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program ini hanya untuk menyediakan tenaga kerja atau untuk melegitimasi kegiatan operasional. Kondisi politik dan etika yang kondusif untuk proses pembangunan perlu ditetapkan dengan:¹⁶

- Mendapatkan persetujuan dari masyarakat.
- Memastikan kelompok masyarakat mendapatkan informasi yang memadai tentang program yang sedang dirancang; informasi yang tersedia cukup memadai dan relevan, dan dikemas dengan baik; orang dapat memahaminya; dan informasi dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan mereka.
- Menantang sistem representasi masyarakat yang ada sehingga proyek ini inklusif.
- Memastikan para wakil dipilih dan bertanggung jawab kepada warga/konstituen; mereka mewakili pandangan dan pendapat masyarakat mereka; dimensi politik ini kadang-kadang diabaikan dalam perdebatan tentang penggunaan pengetahuan lokal dalam pembangunan karena pengetahuan lokal dianggap sebagai mekanisme adat yang tidak selalu demokratis dan inklusif.
- Menyediakan platform untuk dialog.
- Menyepakati organisasi dan masyarakat apa yang harus didengar suaranya; terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang tidak terganggu oleh struktur kekuatan proyek pembangunan; jika keputusannya berdasarkan pengetahuan lokal, orang tidak takut untuk membuat proposisi apa pun yang ingin mereka buat jika itu menjadi keprihatinan bersama di masyarakat.

Peran strategis lain dari pengetahuan lokal dalam mendemokraskan proses pembangunan adalah dengan membuka diri untuk pengambilan keputusan yang inklusif. Desentralisasi adalah devolusi kekuasaan. Pengetahuan lokal menginformasikan struktur dan mekanisme yang tepat untuk manajemen sumberdaya dan proses pengambilan keputusan.

16 Diadaptasi dari Laaksonen 2006. Susskind dan Cruikshank memberikan pendekatana yang mirip dalam *Breaking Robert's Rules*.

Penggunaan utama dari pengetahuan lokal dalam pembangunan adalah pemberdayaan. Di sini, kekuasaan diberikan kepada orang-orang melalui penggunaan pengetahuan dan kapasitas asli yang tersedia di lapangan. Struktur partisipasi masyarakat setempat ini memungkinkan adanya dialog antara masyarakat pemilih dengan wakil mereka tentang masalah pembangunan dan solusinya. Pengetahuan lokal harus tersedia untuk berbagai kelompok masyarakat sehingga masyarakat setempat dapat menentukan proyek mana yang mereka sukai, bagaimana sumberdaya harus dimobilisasi secara internal, dan apa yang dibutuhkan dari luar.

Masyarakat saat ini lebih kompleks daripada generasi yang lalu. Di negara berpenghasilan menengah ke bawah seperti Indonesia, masalah pembangunan sederhana telah dibahas: membangun sekolah dan menetapkan anggaran pendidikan yang kuat, misalnya. Dengan globalisasi dan meningkatnya lapisan aktor dalam pemerintahan, solusinya jauh lebih rumit: bagaimana cara memastikan semua anak menempuh pendidikan di sekolah menengah bukan hanya masalah membangun sekolah; perlu penanganan banyak masalah sosial dan ekonomi, termasuk memastikan kualitas pengajaran, membangun prioritas masyarakat dalam pendidikan, menciptakan insentif untuk kehadiran di sekolah, dan lain-lain. Masalah-masalah ini tidak dapat dipecahkan secara teknis (Mangkusubroto et al, 2016). Harus dihindari adanya perubahan perilaku tidak hanya dalam kebijakan dan praktik pemerintah yang melingkupi pendidikan universal, tetapi juga dari orang tua dan guru. Ada beberapa lapisan pemerintahan: Indonesia 2014 membuat keputusan terdesentralisasi ke 75.000 desa (Antlov, Dharmawan dan Wetterberg, 2016), sementara di tingkat regional Indonesia adalah anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Kemitraan Trans-Pasifik. Isu-isu seperti pertumbuhan yang adil dan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja. Kompleksitas menuntut pemerintah untuk berubah, menggunakan banyak sumber pengetahuan dan data untuk menemukan solusi yang tepat.

Struktur pemerintahan yang baru dan tuntutan masyarakat dapat memaksa instansi pemerintah untuk memperluas konsultasi publik,

melaksanakan praktik tata kelola partisipatif di tingkat lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengembangkan kemitraan baru dengan organisasi masyarakat sipil – Layanan Publik Baru. Pemerintahan, kebijakan, dan politik tidak lagi hanya untuk para pakar, politisi dan pejabat pemerintah. ‘De-profesionalisasi’ politik dan administrasi publik perlu dilakukan (Fischer, 2009), atau dalam kata-kata Harry Boyte (2004: xi), ‘membongkar tirani teknik’ (*breaking the tyranny of technique*). Ini adalah sisi yang lebih positif, yakni demokratisasi kebijakan publik, pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik, pengambilan keputusan dan proses pengetahuan-(disertakan) kedalam-kebijakan.

Dengan demikian kita perlu memperluas peran masyarakat dan pengetahuan lokal yang mereka miliki sehingga tidak hanya menjadi objek kebijakan negara, penerima pasif pendanaan pemerintah atau produsen kearifan lokal gaya lama. Kekecewaan terhadap politik arus utama adalah sesuatu yang telah kita lihat di Eropa dan Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir. Seperti disebutkan, ini telah melahirkan bentuk-bentuk baru populisme, politik warga negara, demokrasi deliberatif dan percobaan tata kelola. Yang menarik, perkembangan yang paling menarik terjadi di tingkat lokal, karena disitulah kepadatan kekuatan sosial dapat ditemukan dan di tingkat ini perekrutan politik dan pembangunan konstituensi terjadi. Di sana pula orang dapat menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program lokal terutama terkait isu-isu lokal yang berhubungan dengan ideologi nasional.

Pengetahuan ilmiah hanya dapat menambah nilai jika dihasilkan melalui proses pemahaman makna dan konteks lokal. Jika ‘yang penting adalah (melakukan) apa yang betul-betul dapat dijalankan’ (Tony Blair, dikutip di Banks, 2009: 1), kita memerlukan pengetahuan lokal untuk menunjukkan apa yang mungkin akan berhasil dilakukan dalam kondisi apa dan untuk siapa. Akhir segalanya bukan terletak pada solusi kebijakannya; tapi bagaimana membuat kebijakan berfungsi - dan ini adalah kegagalan yang sering dilakukan masyarakat donor dalam mempromosikan solusi yang sensitif secara lokal. Menjadi lebih baik jika

kita melihat ide-ide kebijakan yang secara inheren adalah tentang pilihan dan preferensi politik. Kebijakan tanpa pengetahuan lokal cenderung akan salah sasaran dan acak, dan dampaknya mungkin positif, netral atau negatif. Memperkaya kebijakan dengan memasukkan pengetahuan lokal berkontribusi pada pengujian dan pengamatan faktual yang merupakan inti dari pengembangan pengetahuan untuk pembangunan nasional.

Kesimpulan

Paradigma tata kelola baru yang diperkenalkan dalam bab ini adalah tentang proses, politik, dan konteks. Melalui partisipasi masyarakat dan integrasi pengetahuan lokal dalam pembuatan kebijakan, hubungan antara masyarakat dan kepentingan publik dijalin. Hal ini memungkinkan masyarakat sebagai pengguna untuk memiliki pendapat yang lebih langsung, terinformasi dan kreatif dalam proses penulisan ulang kebijakan yang memberi arahan bagi perancangan and penyediaan layanan publik. Demokratisasi diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang di dalamnya warga berpartisipasi tidak hanya selama pemilihan umum tetapi juga pada masalah sehari-hari. Kekuasaan dihasilkan oleh aksi masyarakat. Tindakan politik berkelanjutan dimulai dengan ‘seribu pemberdayaan kecil’, dan bukan desain besar (Sandercock, 1998).

Pembuatan kebijakan pada dasarnya bersifat politis: “Nilai, minat, kepribadian, waktu, keadaan, dan kebetulan” singkatnya, demokrasi - menentukan apa yang sebenarnya terjadi (Banks, 2009: 4). Kita harus menyelidiki masalah yang penting di wilayah tempat kita hidup (Flyvbjerg, 2001: 166). Jika ungkapan amat terkenal Peter Drucker, *“culture eats strategy for breakfast, lunch, and dinner,”* yang secara komunikatif dapat diterjemahkan menjadi: “budaya akan mengalahkan strategi (menjadikan strategi seperti santapan pagi, siang atau malamnya)” benar, kita diharuskan untuk lebih memperhatikan makna dan konteks sosial yang membentuk konteks dan budaya - jika tidak kita akan berakhir dengan kebijakan yang di atas kertas sempurna tapi mungkin gagal dalam

implementasi—seperti yang sering kita keluhkan selama ini. Ketika penelitian mempengaruhi kebijakan, sebagaimana dicatat oleh Carden (2009: 50), ‘Selalu ada turbulensi akibat persinggungan berbagai faktor saat keputusan kebijakan dibuat dan hasil kebijakan diperoleh’. Dan dalam gejala ini, kita perlu dibimbing oleh pengetahuan dan konteks yang diciptakan oleh masyarakat setempat.

Cerita tentang Pengetahuan Lokal

Pada tahun 2014, KSI memberikan hibah kepada 10 lembaga penelitian Indonesia untuk mendokumentasikan pengalaman mereka terkait pengetahuan lokal, khususnya tentang bagaimana pengetahuan lokal dihasilkan, dikelola dan dimanfaatkan untuk memengaruhi kebijakan dan praktik-praktik yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Pada bulan April 2016, sebuah konferensi diselenggarakan sesudah 10 mitra menulis laporan tentang hasil penelitian mereka¹⁸. Sebelum kami memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang bagaimana munculnya pengetahuan lokal pemanfaatannya, bab ini akan memberikan gambaran singkat tentang kasus-kasus yang dikaji oleh 10 lembaga penelitian mitra KSI sebagai konteks untuk mengantarkan ke bab-bab berikutnya yang bersifat lebih analitis. Kami mengangkat kisah-kisah ini dari laporan singkat yang disiapkan oleh organisasi-organisasi penerima hibah sebelum konferensi berlangsung.

Studi Kasus 1: Air bersih untuk semua – Perkumpulan Pikul

Pada tahun 2010, masyarakat desa Baumata Timur di Nusa Tenggara Timur menerima kabar baik. Program pemerintah tentang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) akan menjangkau desa mereka. Selamat tinggal krisis air bersih!, begitulah

17 Dari lebih dari 500 proposal yang diterima, 74% berasal dari LSM dan 21% dari perguruan tinggi (sisanya adalah individu dan instansi pemerintah). Sebanyak 31% berbasis di Pulau Jawa dan 7% berasal dari Maluku dan Papua. Sisanya terbagi secara merata antara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

18 Lihat <http://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/knowledge-sector-initiative-ksi-supports-local-knowledge-in-policy-making>

harapan masyarakat Baumata. Proyek ini berhasil membangun empat bak penampung air (reservoir) baru, termasuk didalamnya satu reservoir yang menampung air dari sumber air di Baumata. Selain pembangunan bak penampung baru, proyek ini juga merehabilitasi empat bak penampung yang terlanter, yang dibangun oleh proyek lain pada tahun 2006 dan memperluas jaringan perpipaan hingga sekitar 500 meter. Untuk mendistribusikan air, sebuah pompa listrik dengan kapasitas 13.000 Kwh dipasang. Secara keseluruhan proyek ini menelan biaya sebesar Rp 275 juta (US \$ 20,600), dengan dana yang berasal dari APBN dan APBD serta masyarakat sendiri. Namun, sejak proyek ini selesai pada bulan Desember 2010, air yang ditunggu-tunggu tidak pernah mengalir. Meteran listrik di pompa-pun telah dicabut oleh PLN.

Banyak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki cerita serupa¹⁹. Proyek pemerintah yang menyediakan air bersih atau sistem irigasi sering berakhir dengan kegagalan. Saat ini, Nusa Tenggara Timur mengalami defisit air sekitar 1,5 miliar meter kubik per tahun. Kebutuhan air bersih hanya memenuhi 36 persen dari jumlah penduduk. Pemerintah provinsi telah menetapkan target bahwa pada tahun 2019 kebutuhan air semua masyarakat akan terpenuhi. Secara teknis dan hidrologis, target ini layak tercapai mengingat sumber daya air yang ada di provinsi tersebut. Namun mengapa begitu banyak proyek penyediaan air bersih yang tidak berkelanjutan? Apa yang salah? Dan apa solusinya? Perkumpulan Pikul yang berbasis di Kupang yakin bahwa salah satu alasannya adalah karena sangat sedikitnya faktor-faktor sosial politik di daerah tersebut yang diketahui, yang dapat menghambat keberlanjutan inisiatif pengelolaan air bersih di Nusa Tenggara Timur.

Menurut rencana pembangunan provinsi tahun 2014-2019,

19 Meskipun ada serangkaian proyek infrastruktur di provinsi ini, yang merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia, rendahnya curah hujan rendah dan buruknya infrastruktur menyebabkan krisis air bersih terjadi setiap tahun di musim kemarau. Hal ini memaksa masyarakat setempat untuk mengkonsumsi air yang tidak higienis, karena penduduk tidak mampu membeli air dari PDAM dengan tarif yang menjulang. Selain itu, kekurangan air di provinsi ini dapat memberikan beban yang sangat tinggi bagi penanaman padi dan irigasi, sehingga mengakibatkan gagal panen (Asian Development Bank, 2012)

setidaknya ada 10 bendungan/saluran air, 200 bendungan irigasi dan 4.000 bendungan kecil yang akan dibangun. Melihat kasus bendungan Kolhua yang terletak di kota Kupang, rencana pembangunan tersebut mungkin tidak mudah untuk diwujudkan. Bendungan Kolhua, yang menelan biaya sebesar Rp 480 miliar (US\$ 36 juta), memicu protes dan konflik karena masalah pembebasan lahan. Ini baru satu bendungan yang hanya membutuhkan 81 hektar lahan. Kesepuluh bendungan yang akan dibangun membutuhkan lahan seluas 15.490 hektar. Sulit untuk dibayangkan bahwa pembangunan ini akan terwujud dalam waktu dekat.

Untuk menjajaki tantangan ini, Pikul melakukan penelitian di sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Timur yang masyarakatnya telah berhasil mengelola sumber daya air untuk kebutuhan mereka sendiri dengan memanfaatkan pengetahuan lokal yang bersifat nirlaba dan pendekatan berbasis kearifan. Penelitian ini dilakukan di beberapa komunitas dan berbagai pendekatan telah diidentifikasi. Di desa Naip, misalnya, masyarakat berhasil dilibatkan dalam pengelolaan air berbasis klan; di Apui, pendekatan terhadap masyarakat yang diterapkan untuk mengelola air bersih adalah pendekatan berbasis gereja; di Noelbaki, masyarakat menggunakan pengelolaan air bersih berbasis kelompok kepentingan; di Uiasa, pendekatan pengelolaan air bersih berbasis desa digunakan; dan di Wehali, pengelolaan air bersih berbasis masyarakat adat dipraktikkan.

Pikul menemukan bahwa ada 10 prinsip penggunaan pengetahuan lokal yang dibutuhkan agar pasokan air dapat mengalir ke semua masyarakat. Beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikut:²⁰

1. Masyarakat setuju bahwa meskipun sumber air berada di bawah tanah atau di kawasan milik klan tertentu, sumber ini masih akan dimanfaatkan dan dikelola secara kolektif. Kepemilikan sumber air tidak didasarkan pada pernyataan pribadi tetapi akan selalu berada di

20 Keenam prinsip lainnya adalah: 1) kebijakan pemberian sanksi secara bertahap (sanksi untuk setiap pelanggaran akan diberikan secara bertahap, 2) mekanisme resolusi konflik, 3) pengakuan atas hak untuk berorganisasi, 4) pengelolaan hirarki berbasis masyarakat, 5) pelibatan masyarakat, dan 6) tata kelola air yang mencerminkan struktur sosial budaya.

bawah kendali klan.

2. Sebagai sumber kehidupan dan mitos, sumber air berkaitan erat dengan struktur masyarakat adat setempat. Hubungan antara air dan manusia berada dalam sistem/ institusi lokal. Misalnya, dalam konteks kelompok Wehali air berkaitan dengan kekuatan supranatural, *Wematan Maromak*, yang merupakan asal mula penduduk setempat. Hubungan atau struktur adat yang berkaitan dengan subsistem air dilambangkan melalui rumah adat. Rumah adat berperan sebagai pengingat kolektif terhadap struktur dan proses pengelolaan air bersih sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat.
3. Sebagai identitas yang mengedepankan pengetahuan dan berbagai nilai kearifan lokal, secara fisik sumber air dikelola menurut kepercayaan masyarakat setempat. Di Naip dan Wehali, pemilik atau orang yang mengawasi sumber air tidak ingin mengubah bentuk fisik sumber air menjadi sistem yang lebih modern, seperti membuat waduk. Namun, di Noelbaki, Uiasa, dan Apui, ada upaya untuk menciptakan perubahan fisik dengan membangun waduk dan menggunakan sistem penangkapan air lainnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem penangkapan air, ada satu hal yang tetap sama, yaitu bahwa struktur pengelolaannya tetap berada di tangan klan yang menemukan sumber air.
4. Masalah pengelolaan sumber air berada di seputar hal-hal tertentu, yaitu pemilik klan, mitos, epik dan kisah-kisah di balik sumber air. Ada pula ritual dan peraturan yang jelas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber air, identifikasi penerima manfaat, dan batas-batas fisik pasokan air. Prosedur dan struktur pengelolaan air bersih menjadi ingatan kolektif bagi masyarakat setempat. Ingatan kolektif adalah bentuk pengakuan dan tanggung jawab atas sumber daya yang ada.

Pikul menjadikan kearifan lokal sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi tentang kewajiban pemerintah setempat dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Pikul berhasil memasukkan ide-ide yang terkandung dalam pengetahuan lokal dalam

perdebatan tentang pengelolaan air bersih. Enam naskah kebijakan disusun dan disosialisasikan untuk memicu munculnya wacana lokal dan dialog tentang kebijakan.²¹ Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang berada di lingkungan kantor dinas pekerjaan umum, yang merupakan kelompok kerja multi-partai yang mengelola air minum dan urusan kesehatan lingkungan, telah menunjukkan ketertarikan untuk menyebarluaskan temuan Pikul.

Studi Kasus 2: ‘Baleo! Baleo! Baleo!’ – Poros Photo

‘Baleo! Baleo! Baleo’. Adalah seruan yang memekik di telinga dan tetiba menggema di seluruh sudut leffo Lamalera. Seruan itu merupakan penanda bahwa seseorang melihat seekor ikan paus tampak berenang di perairan Lamalera. Lamalera, sebuah kampung di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.²² Penduduk Lamalera bergerak dengan cepat ke pantai yang menghadap ke Laut Sawu. Mereka tahu, di laut sana “kiriman dari Tuhan” telah tiba: ikan paus.

Peledang, perahu tradisional Lamalera, disiapkan. Para *matros* atau awak perahu bersiap di posisinya. Para penangkap ikan dengan tombak, dikenal dengan istilah *lefa alap*, juga masuk ke *peledang*. *Leo* atau tali yang disimpan di rumah adat dipikul—dari sinilah muncul istilah “baleo”. *Lamafa* sang juru tikam yang memanggul *leo* bersiap menakhodai perahu-perahu.

Doa didaraskan, lalu *peledang* didorong menuju lautan. Lagu-lagu tradisional berkumandang, sebagai penyemangat untuk para laki-laki gagah berani pengarang lautan. Perburuan dimulai. Kerja sama yang baik dan pembagian peran yang sangat jelas antar awak *peledang* dan antar *peledang* membuat keberhasilan menikam paus cukup tinggi. Selain itu,

21 Keenam naskah kebijakan ini tersedia di www.perkumpulanpikul.org/2016/02/diseminasi-riset-air/.

22 Lamalera adalah sebuah desa yang berpenduduk sekitar 2,000 orang, yang terletak di pulau Lembata yang berbatu dan memiliki kegiatan pertanian yang sangat terbatas. Penduduknya bergantung pada sumber daya yang terdapat di laut dan sebagian besar masyarakat di Lembata berburu paus untuk memenuhi kebutuhan pokok saja (Barnes, 1984; Fortier, 2014).

ada keyakinan bahwa perdamaian di darat membuat perburuan berlangsung dengan baik di laut. Jika seorang *matros* berlayar tanpa terlebih dahulu berdamai dengan keluarga atau musuhnya, perahunya akan menghadapi masalah selama perburuan.

Inilah tradisi berabad-abad silam yang masih terpelihara di Lamalera²³. Biasanya, paus “berlabuh” pada medio April-November dalam perjalanan migrasi antara Samudera Hindia dan Pasifik. Ketika hewan-hewan laut raksasa melewati laut Sawu tepat di depan pintu pulau Lembata itulah, perburuan ikan paus pun dimulai. “Tapi di luar masa itu pun kerap ada paus,” kata Bona Bedding asal Lamalera.

Namun demikian, ada pertentangan yang terjadi antara perburuan paus, lembaga lingkungan hidup dan industri pariwisata. Untuk mendukung masyarakat setempat yang melakukan perburuan paus, Poros Photo memutuskan untuk menyampaikan pesan bahwa tradisi ini merupakan bagian integral dari cara hidup masyarakat dan benar-benar merupakan pandangan dunianya; menghapuskan tradisi ini tidak hanya akan menghilangkan mata pencaharian mereka, namun juga hal penting yang mendasari rasa kebersamaan sebagai masyarakat dan identitas mereka. Sebuah pameran foto dan film diselenggarakan, dan sebuah buku yang berisi esai foto diterbitkan untuk menyampaikan pesan bahwa praktik adat perburuan paus yang dilakukan oleh masyarakat berbeda dengan perburuan paus komersial.

Paus yang diburu hanya *sperm whale* (*Physeter macrocephalus*). Sedangkan paus Seguni jarang diburu karena sangat ganas dan paus biru -- yang memiliki semburan tepat di atas kepala mereka-- diyakini sebagai penolong warga Lamalera,”Kami tidak memburu kelaru karena itu perintah nenek moyang,” kata mereka.

Pembagian hasil buruan merupakan tradisi turun-temurun yang ditaati oleh semua orang Lamalera, sehingga dipastikan tidak ada

23 Menurut Barnes (1984), dokumen Portugis yang berasal dari tahun 1624 dan tidak diketahui penyusunnya menggambarkan penduduk pulau sedang berburu paus dengan harpoon untuk mendapatkan minyak paus, dan menyiratkan bahwa mereka mengumpulkan dan menjual ambergris

rebutan. Pembagian mengikuti struktur sosial yaitu dimulai dengan tuan tanah, pemilik rumah yang posisinya tepat saat perahu mendapatkan ikan pertama kali, dan pemilik perahu, kemudian juru tikam, dan akhirnya seluruh warga, “Semua mendapat bagian,” ujar Bona Bedding. Bahkan para pemilik perahu pun masih mengingat kebaikan orang-orang yang memberikan kayu-kayu untuk membuat *peledang*. Bona mengaku pernah disuruh ayahnya untuk memberikan daging ke seseorang yang pohonnya ditebang untuk dijadikan perahu.

Setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dari setiap paus yang ditangkap. Tidak hanya para lelaki yang bergabung dengan ekspedisi ini, tetapi janda, perempuan yang belum menikah, dan para istri yang suaminya tidak bisa lagi berlayar atau tidak memiliki kesempatan untuk menangkap paus juga menerima bagian. Untuk menerima berkah dari laut, masyarakat menukarnya dengan barang. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika paus dipotong (yaitu mekanisme pembagian dalam masyarakat selesai), beberapa perempuan duduk di sebelahnya dengan wadah yang diisi dengan barang-barang yang dapat ditukar dengan daging paus.

Proses ini menggambarkan bahwa sistem distribusi hasil perburuan didasarkan pada nilai-nilai budaya komunal dan bukannya akumulasi nilai-nilai ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi yang lebih besar, daging paus juga disimpan sebagai ‘tabungan’ untuk acara-acara penting, seperti pernikahan atau kematian. Yang lebih penting lagi adalah dendeng paus menjadi mata uang untuk perdagangan di Lamalera, yang kadang-kadang berfungsi sebagai alat barter yang utama. Pedagang di pasar cenderung memprioritaskan barter daripada menggunakan uang tunai atau melakukan jual beli dengan orang-orang yang datang ke pasar.

Poros Photo melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar membuat dokumentasi sederhana tentang pengamatan dan pengetahuan lokal melalui pameran interaktif dan multimedia. Pameran ini menyajikan peluang baru untuk merekam dan berbagi pengamatan dan pengetahuan lokal. Rekaman audio dan video ini mendokumentasikan pengamatan, pengetahuan, dan narasi seperti yang diceritakan oleh pemilik

pengetahuan lokal dan masyarakat dengan menggunakan bahasa masyarakat setempat dan mampu menyoroti pentingnya menghargai makna perburuan paus bagi masyarakat.

Studi Kasus 3: *Pranata Mangsa*: Ketika pengetahuan tradisional bertemu dengan sains – Pusat Kajian Antropologi, Universitas Indonesia (PUSKA UI)

Perubahan iklim dapat memicu efek domino pada atmosfer dunia. El Niño, yang melanda Afrika pada Februari 2015, telah menciptakan kekeringan sesudahnya. Namun, kehancuran yang disebabkan oleh El Niño tidak berhenti sampai di situ. Musim kering di beberapa wilayah tropis, seperti Indonesia, semakin lama semakin buruk. FAO menyatakan bahwa pada tahun 2015 dan 2016, El Niño menyebabkan kekeringan terburuk dalam 35 tahun.

Petani adalah salah satu kelompok yang secara langsung terpengaruh oleh perubahan iklim. Musim kemarau yang panjang, tingkat curah hujan yang tidak menentu dan suhu yang panas mengacaukan pola tanam yang telah mereka gunakan sejak lama. “Kita dapat merasakan perubahan iklim. Panasnya tak tertahankan sekarang,” kata Yusup, salah seorang petani padi di Indramayu yang terletak di pantai utara Jawa Barat, pada awal April 2016. Meskipun Indramayu merupakan salah satu penghasil beras utama di tingkat nasional, daerah ini tetap menjadi salah satu kawasan termiskin di Pulau Jawa, karena sebagian besar petani di sana tidak memiliki lahan dan hanya memperoleh sedikit keuntungan dari produksi beras. Mata pencaharian masyarakat secara bertahap berubah menjadi non-pertanian, dengan tingkat migrasi yang sangat tinggi, baik karena urbanisasi maupun karena menjadi buruh migran dengan upah murah di Asia Timur dan jazirah Arab.

Kecamatan Balongan di Indramayu mengalami gagal panen pada akhir tahun 2015 karena rendahnya curah hujan dan tidak adanya sumber air lain. Menurut Yusup, perubahan iklim telah menurunkan tingkat curah hujan di Indramayu. Musim hujan pun telah bergeser. “Hujan biasanya mulai turun pada bulan Oktober, tetapi tahun ini (2015),

musim hujan baru dimulai pada akhir November,” kata Yusup. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengkonfirmasi pengamatan Yusup dengan pernyataan mereka diakhir 2015 bahwa musim tanam untuk tahun 2015 tertunda karena pergeseran musim hujan.

Sebagian besar petani mengandalkan perhitungan tradisional untuk menentukan musim tanam. Petani di Indramayu akrab dengan kalender pertanian yang disebut *pranata mangsa*.²⁴ Petani di Lombok Timur menyebutnya *warige*, yaitu pedoman bertani yang menggunakan kalender peredaran bulan, menurut bulan Hijriyah. Jenis hujan yang akan turun diputuskan dengan melihat pada hari apa tanggal 1 Muharram jatuh. Sistem ini diwariskan secara turun temurun, dan menggunakan tanda-tanda alam, seperti posisi rasi bintang dan perilaku hewan untuk menentukan musim tanam.

Masalahnya adalah perubahan iklim telah membuat sistem tradisional seperti *pranata mangsa* dan *warige* tidak dapat diterapkan. Yusup mengatakan bahwa perhitungan musim tanam berdasarkan *pranata mangsa* bisa jauh berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. “Ketika musim tanam seharusnya sudah dimulai, kekeringan yang panjang masih terjadi,” kata Yusup. “Petani harus belajar beradaptasi.” Pada prinsipnya, petani adalah pembelajar sejati. Dari tahun ke tahun, musim ke musim, dan hari ke hari, mereka belajar dari proses penanaman yang mereka lakukan, dari keberhasilan dan kegagalan. Mereka juga belajar dari orangtua dan orang-orang bijak yang berbagi pengalaman mereka. Para petani ini saling berbagi pengetahuan dan belajar dari satu sama lain. Beberapa petani menyadari bahwa situasi telah berubah. “Umur saya 50 tahun, dan baru tahun ini saya tidak mengalami hujan selama *Bau Nyale*,” kata seorang petani di Lombok Timur. *Bau Nyale* adalah festival rakyat

24 *Pranata Mangsa* berasal dari dua kata, *pranata*, yang berarti peraturan, dan *mangsa*, yang berarti musim atau waktu. Jadi, *pranata mangsa* adalah peraturan yang digunakan oleh petani untuk memutuskan atau melaksanakan pekerjaan mereka. Peraturan ini dicetuskan oleh Raja Pakubuwono VII dan mulai digunakan pada 22 Juni 1856. Sistem ini digunakan, misalnya, untuk menjalankan usaha yang berhubungan dengan pertanian, misalnya bertani, atau menangkap ikan, bepergian ke luar daerah asal, dan berperang. *Pranata mangsa* adalah peraturan tentang musim berdasarkan kalender matahari.

yang merayakan kemunculan cacing laut *nyale* setiap tahun. Gerombolan manusia berduyun-duyun pergi ke laut untuk menangkap makhluk langka ini. “Biasanya, orang akan basah kuyup ketika mereka ingin menangkap *nyale*,” lanjut petani tersebut.²⁵ Sementara itu, petani yang biasanya menanam berdasarkan kalender tanam tidak bisa lagi menggunakannya, karena perkiraan musim tanam salah.

Sekolah resmi yang ditujukan bagi petani, yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), berdiri selama beberapa waktu melalui program-program penjangkauan yang dikelola oleh pemerintah, namun pendekatan yang digunakan adalah model *top-down* yang hanya berlangsung selama satu musim tanam dan hanya mencakup wilayah-wilayah tertentu selama pelatihan. Siregar dan Crane (2011) melaporkan bahwa kondisi spesifik di daerah setempat, seperti kondisi sosial dan teknis untuk produksi pertanian, memengaruhi kemampuan dan kemauan petani untuk menerapkan prakiraan iklim berdasarkan musim yang diajarkan melalui sekolah PPL. Sekolah-sekolah lapangan bermunculan sejak gerakan revolusi hijau (*green revolution*) melalui Bimbingan Masyarakat (BIMAS) dimulai pada tahun 1970-an oleh pemerintah pusat. Sayangnya, revolusi ini juga menyebabkan petani lebih mengandalkan paket pertanian komersial (benih, pupuk dan pestisida). Model *top-down* tidak berjalan dengan baik bagi petani lokal. Mereka menginginkan sekolah lapangan yang berkelanjutan dan partisipatif, sehingga mereka mendirikan kelompok tani dan kelompok pengukur curah hujan. Mereka tidak akan mempercayai sesuatu begitu saja sampai mereka melihat buktinya. Percobaan partisipatif yang melibatkan ilmuwan dan petani, serta yang dilakukan di antara petani saja diperlukan untuk menemukan metode penanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim.

25 Penduduk yang berasal dari suku Sasak di Lombok Timur percaya bahwa *Bau Nyale* adalah tanda bahwa musim hujan akan segera dimulai. Namun pada tahun 2015, upacara ini tidak diikuti oleh hujan, dan tidak ada cacing yang muncul. Ribuan orang berkumpul menunggu kemunculan cacing di permukaan laut, namun hanya beberapa dari mereka yang pulang membawa *nyale*.

Sejak tahun 2009, Kelompok Tani Indramayu, yang difasilitasi oleh PUSKA UI, telah belajar tentang agro-meteorologi di Warung Ilmiah Lapangan. Sejumlah kelompok tani, LSM lokal dan pakar agrometeorologi dari Indonesia, Belanda dan Afrika juga telah bekerja sama melalui program ini. Pada awal tahun 2015, program serupa diperkenalkan kepada petani di Lombok Timur, yang juga merupakan salah satu kabupaten yang sangat miskin dengan juga masalah migrasi tenaga kerja.

Belajar memantau dan mengukur curah hujan membantu petani menanggapi perubahan iklim. Melalui kerja sama dengan PUSKA UI, sejumlah komunitas menggabungkan metode ilmiah dengan pemantauan kondisi sawah, perilaku hewan, hama dan penyakit tanaman, yang mereka catat secara rutin. “Hasil pemantauan ini menghasilkan estimasi periode musim tanam,” kata Yusup, yang merupakan anggota Kelompok Pengukur Curah Hujan Indramayu. Petani kini mengembangkan perilaku baru: mereka telah menjadi peneliti. Petani yang sebelumnya membawa cangkul sekarang juga membawa pulpen dan buku. Mengukur curah hujan dan mengamati ekosistem sawah dapat membantu petani menentukan waktu musim tanam yang tepat. Metode ini dipraktikkan setiap hari oleh petani di Indramayu dan Lombok Timur. “Ini merupakan strategi adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim,” kata Yusup.

“Kami mengukur curah hujan.” Ini adalah cara petani mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota Kelompok Pengukur Curah Hujan Indramayu, yang merupakan suatu perkumpulan, jaringan dan organisasi yang mengumpulkan para petani dari seluruh kecamatan di Indramayu untuk mempelajari agrometeorologi. Dalam tujuh tahun sejak pertama kali diperkenalkan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Warung Ilmiah Lapangan telah didirikan sebagai lembaga sosial untuk mempelajari agrometeorologi. Warung Ilmiah Lapangan adalah pendekatan baru dalam pendidikan, yang menjadi wadah bagi petani, ilmuwan dan pendidik untuk terlibat dalam dialog tentang pertukaran pengetahuan. Melalui dialog ini, pengetahuan dialihkan dari ilmuwan ke petani agar dapat diterapkan oleh petani sebagai pengamat aktif dan pembelajar. Petani mengamati curah hujan dan kondisi agroekosistem setiap hari,

mengukur curah hujan, mendokumentasikan hasil-hasilnya, serta menganalisis, mendiskusikan dan mengevaluasi semuanya bersama-sama.

Di Lombok, petani menamakan tempat orang berkumpul dalam hubungan social, *beruqaq*. Masyarakat bertemu setidaknya satu kali dalam bulan untuk membahas hasil pengukuran curah hujan, pengamatan agrosistem dan skenario tentang musim. Para ilmuwan atau pendamping memberikan bantuan agar pengetahuan tentang agrometeorologi yang baru bagi petani dapat mereka terapkan. Alih pengetahuan dan teknologi komunikasi ini mencakup pengukuran curah hujan, perbandingan hasil panen dan upaya distribusi. Para ilmuwan mempelajari cara-cara agar sains dapat diterapkan dengan lebih baik dan memadukan pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah.

Pendekatan Warung Ilmiah Lapangan ini sangat berbeda dengan program penjangkauan pemerintah yang memiliki pendekatan *top-down*. Warung Ilmiah Lapangan menyediakan wadah pembelajaran interaktif antara petani dan fasilitator, membahas pengetahuan tradisional, pengetahuan empiris dan pengetahuan ilmiah. Pendekatan ini tidak berorientasi pada ‘bantuan’ atau ‘proyek’, namun memusatkan perhatian pada ‘pemberdayaan petani’ berdasarkan kondisi aktual dan kebutuhan petani, sehingga menjadi jauh lebih efektif. Pemerintah daerah di Indramayu dan Lombok Timur telah membahas tentang kemungkinan untuk melembagakan Warung Ilmiah Lapangan, yang membuat PUSKA UI bersemangat.

Studi Kasus 4: Kedaulatan menangkap ikan di *sasi lompa*, Haruku – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta

Sumber daya kelautan di wilayah Indonesia bagian timur sangat berlimpah, namun mendapat tekanan hebat, khususnya karena penggunaan teknik penangkapan ikan yang merusak yang telah terjadi sejak tahun 1980-an. Tekanan ekonomi dan pasar memberikan insentif yang kuat untuk lebih memperluas kegiatan perikanan. Para nelayan tradisional dengan perahu dan peralatan untuk menangkap ikan yang

berteknologi rendah serta pendidikan formal yang terbatas harus bersaing dengan kapal komersial yang membawa nelayan yang lebih muda dan lebih kuat. Pada saat yang sama, penegakan peraturan negara tentang perikanan lemah, dan instansi pengawasan pemerintah memiliki kelemahan yang serius dalam hal motivasi, koordinasi, pengetahuan, infrastruktur, dan pendanaan. Lembaga desa setempat, meskipun secara umum dihormati, kurang dipercaya oleh nelayan muda yang berorientasi komersial (Novacek et al, 2001: 5). Ambruknya perekonomian nelayan lokal, dan persaingan antara kelompok-kelompok masyarakat telah menciptakan konflik di antara masyarakat itu sendiri²⁶ dan antara masyarakat dengan sektor perdagangan yang tidak dapat dihindari apabila pengelolaan dan pengaturan resolusi konflik tidak disiapkan.

Untuk mengatasi tantangan ini, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Maluku Tengah bergantung pada *sasi*, yaitu serangkaian peraturan dan sanksi yang mengatur sumber daya alam dan kehidupan di wilayah tersebut. Di berbagai kelompok masyarakat di Maluku Tengah, *sasi* bahkan telah menjadi bagian dari adat dalam kehidupan mereka. *Sasi* terbagi menjadi empat jenis: *sasi* laut, *sasi* rumah tangga, *sasi* sungai dan *sasi* hutan. Setiap *sasi* memiliki peraturan dan sanksi yang berbeda. Sanksi ditetapkan oleh *Saniri*, atau majelis adat, yang beranggotakan perwakilan dari lima *soa* (suku). Penegakan peraturan dan sanksi dilakukan oleh *Kewang*, yaitu lembaga tradisional yang bertugas mengawasi penerapan aturan-aturan yang terkandung dalam *sasi*. “Raja telah membangun *sasi* sejak zaman dahulu,” kata Vecky Saijka, seorang penduduk pulau Haruku, salah satu kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 30.000 (data tahun 2012).

26 Sejarah di Maluku menunjukkan bahwa sentimen keagamaan dan adat seringkali dikaitkan dengan konflik kemasyarakatan. Tahun 1999-2002 konflik di Maluku menelan korban jiwa sedikitnya 13 ribu orang dan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 330 ribu jiwa. Dengan riwayat yang demikian, meningkatnya jumlah nelayan Muslim di daerah-daerah yang didominasi oleh kelompok Kristen di Pulau Haruku dapat memicu konflik karena hal ini juga menyangkut persoalan mata pencaharian. Untuk melihat gambaran singkat namun penting tentang asal mula konflik keagamaan di Maluku pada tahun 1999, lihat van Klinken (2000) dan Goss (2000).

Untuk menyoroti praktik lokal yang penting ini, PATTIRO mendokumentasikan upacara dan proses yang terdapat dalam *sasi*, serta melakukan analisis terhadap aktor-aktor kunci yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan peran khusus mereka. PATTIRO memfasilitasi sejumlah pertemuan yang menyepakati rekomendasi yang dihasilkan oleh penelitian untuk diubah menjadi makalah akademis guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang konsep, tujuan dan sasaran yang terkandung dalam *sasi*.

Pulau Haruku adalah salah satu kecamatan di Maluku Tengah yang menjunjung tinggi *sasi*. Di pulau ini, *sasi* yang paling populer adalah *sasi* lompas, yaitu *sasi* yang mengatur masyarakat yang membudidayakan dan memanen ikan lompas (*Trisina baelama*) yang hidup di sungai Learisa Kayeli dan laut Maluku. “*Sasi* lompas dibuat untuk mencegah agar masyarakat tidak kelaparan,” kata Soleman Latuharhary, “namun juga untuk melindungi sumber daya laut agar tidak terkuras habis.”

Sasi lompas adalah perpaduan antara *sasi* laut dan *sasi* sungai untuk mengatur budidaya ikan lompas. Pada siang hari (dari pukul 04.30 hingga 18.30), ikan lompas dan make berada di sungai Learisa, yang terletak 1.500 meter dari muara. Pada malam hari, mereka berenang ke muara menuju laut untuk mencari lebih banyak plankton.

Itu sebabnya ada dua jenis *sasi* dalam *sasi* lompas. Jika ikan berada di laut, masyarakat menggunakan *sasi* laut. *Sasi* ini mencegah masyarakat agar tidak menangkap ikan lompas di laut dalam. Ikan hanya boleh ditangkap di kawasan pesisir pada kedalaman air setinggi pinggang. *Sasi* ini juga melarang orang merusak terumbu karang tempat ikan lompas hidup. Di beberapa daerah, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh penggunaan dinamit untuk menangkap lompas.

Ketika ikan berada di sungai, masyarakat menerapkan *sasi* sungai, yang melarang penangkapan ikan lompas dengan menggunakan jaring atau *bore* (racun ikan). *Sasi* ini juga mengatur lalu lintas sungai. Masyarakat dilarang menggunakan perahu bermotor di sungai, karena tumpahan minyak dan limbah akan membunuh bibit ikan dan plankton. Masyarakat dilarang untuk menangkap ikan jenis lain jika ada ikan lompas di dekatnya.

Ikan Lompa dapat dipanen atau dikumpulkan setidaknya tiga kali setahun. Upacara ini disebut ‘menutup *sasi*’, yang dilambangkan dengan menutup daerah muara untuk kegiatan penangkapan ikan, dan ‘membuka *sasi*’, yang berarti orang dapat memanen ikan lompa sebanyak yang mereka inginkan. Upacara ini melibatkan masyarakat dari semua suku. ‘Penutupan *sasi*’ biasanya diadakan pada bulan April atau Mei, ketika ikan dapat dilihat karena jumlahnya yang berlimpah dan berkumpul di sekitar pantai. Ketika peristiwa ini terjadi, masyarakat dilarang menangkap ikan dalam jumlah besar, baik dari sungai maupun dari laut.

Setelah ‘menutup *sasi*’, acara dilanjutkan dengan ‘*sasi panas*’. Ini adalah upacara untuk memanggil ikan agar pergi ke sungai. Upacara ini dimulai pada pukul 2 pagi dan dengan diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh kepala *Kewang* yang juga bertanggung jawab untuk menghukum atau mendisiplinkan masyarakat yang melanggar aturan-aturan ini. Setelah itu, kepala *Kewang*, yang kemudian diikuti orang-orang lainnya membakar daun kelapa untuk menarik perhatian ikan dan berjalan menuju bebatuan *Kewang* di sungai,iringi oleh musik yang berasal dari genderang. Ketika genderang berhenti, mereka kemudian berteriak, “*Sirewei!*”, yang berarti janji dan sumpah. Kemudian kepala *Kewang* menyampaikan pidatonya kepada masyarakat dan memberi hormat kepada para leluhur, makhluk hidup lain dan arwah. Pada saat itu, ‘penutupan *sasi*’ secara resmi dilaksanakan.

Selama lima sampai tujuh bulan ke depan, ‘pembukaan *sasi*’ diadakan, biasanya setiap hari Jumat. Khusus untuk ‘membuka *sasi*’, Raja Haruku memiliki hak veto untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk memanen ikan. Tokoh-tokoh adat lainnya hanya mengawasi acara tersebut. “Raja memutuskan setelah berkonsultasi dengan pejabat pemerintahan, bukan *Kewang*,” kata Vecky Saijka. Waktu panen dan jumlah ikan yang dipanen adalah dua hal yang dipertimbangkan oleh raja ketika menentukan waktu yang tepat untuk ‘membuka *sasi*’.

Selama bertahun-tahun, *sasi* lompa dipatuhi. Akibatnya, selama acara pembukaan dan penutupan masyarakat dapat memanen berton-ton ikan. Pendapatan dari panen ikan ini memperkuat ekonomi rakyat di

Haruku. Dengan pola panen yang sesuai yang diatur oleh *sasi* mereka mempertahankan ketersediaan ikan, sementara di pulau-pulau tetangga terjadi kelebihan ikan.

Namun, kadang-kadang masyarakat tidak mematuhi *sasi* lompas, terutama kaum muda atau pendatang. Masyarakat sering melihat perahu bermotor melintas di sungai dan mengganggu ikan. Anak-anak muda kadang-kadang melanggar *sasi* dan terus mengambil ikan bahkan selama periode ‘penutupan *sasi*’. Pelanggaran yang dilaporkan pada umumnya diberi peringatan pertama dan kedua. Namun, apabila pelanggaran terjadi untuk ketiga kalinya, *Saniri*, yaitu majelis masyarakat adat, akan memanggil pelaku pelanggaran untuk diminta penjelasannya. “Kami akan memanggil pihak pelapor untuk memberikan kesaksian, jadi kami tidak membuat keputusan saat itu juga. Kami memberi kesempatan karena pelaku pelanggaran memiliki hak untuk membela diri. Terserah pada mereka apakah pembelaan mereka masuk akal atau tidak. Para saksi juga akan dimintai kesaksiannya,” kata Eliza Kissya, seorang pemimpin adat *Kewang*.

Studi Kasus 5: Sungai yang membawa kehidupan di kota – Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3), Banjarmasin, Kalimantan Selatan

*‘Sungai Martapura kalu tanang banyunya
(Sungai Martapura airnya tenang).
Hilir mudik kayuhan jukung-jukung’
(Perahu hilir mudik di sungai).*

Ini adalah baris pertama dari lirik lagu rakyat tradisional Banjar, Sungai Martapura. Membentang dari bendungan Riam Kanam di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sungai Martapura mengalir sepanjang 17 kilometer, membelah kota Banjarmasin sebelum bergabung dengan sungai Barito yang jauh lebih besar. ‘*Mancari nafakah rajaki nang halal, saharian hanyar bulik ka rumah*’ (mencari nafkah yang

halal seharian sebelum pulang ke rumah), demikian lirik lagu itu selanjutnya. Lagu ini merupakan penutup dalam film dokumenter, 'Sungai Kita, Hidup Kita' yang dibuat oleh Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3).

Sungai Martapura adalah salah satu prioritas utama tim LK3, karena jalur sungai ini sangat penting bagi kehidupan di kota Banjarmasin dan kabupaten di sekitarnya. Suku Banjar adalah kelompok etnis di Kalimantan Selatan yang berjumlah sekitar 3,5 juta orang, termasuk yang berdiam di Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan. Sebagian wilayah Banjarmasin berada di bawah permukaan laut, sehingga kota ini naik dan turun bersama pasang surut laut. *Lanting* (rumah panggung) berbaris di sepanjang berbagai aliran sungai yang membelah kota. Dengan menggunakan *klotok* kecil (perahu bermotor) untuk mengitari sungai dan kanal, berbagai kegiatan dapat terlihat: orang mandi, mencuci pakaian, bergosip, dan membeli buah, sayuran dan ikan dari pedagang perempuan di perahu kecil (Sjamsuddin, 2016).

Delta Martapura dianggap sebagai pusat kota dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Masyarakat bergantung pada sungai Martapura karena sungai ini berfungsi sebagai sarana transportasi dan interaksi, irigasi, drainase, ekologi dan sumber daya air untuk permukiman. Masalah utamanya adalah bahwa sungai ini sudah sangat tercemar akibat deforestasi dan sanitasi yang buruk, sehingga menyebabkan kerugian di bidang ekonomi dan ekologi.

Kondisi sungai yang tercemar bertambah buruk karena pemerintah daerah mengabaikan kearifan lokal. Tujuan film dokumenter yang diproduksi oleh LK3 tentang Martapura dan masyarakatnya adalah untuk menarik perhatian semua pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah setempat, akan pentingnya sungai dalam kehidupan masyarakat Banjar dan pentingnya kearifan lokal dalam mengelola sungai.

Sejarah orang Banjar adalah sejarah tentang sungai. Sebelum Kesultanan Banjar berdiri di muara sungai Barito pada tahun 1526, setiap penduduk desa menamai kelompok masyarakat yang mengurus bagian sungai mereka berdasarkan arah aliran sungai. *Sei*, yang artinya air atau

sungai dalam bahasa Banjar, menjadi ‘roh’ kehidupan mereka. Sayangnya, pusat kehidupan masyarakat ini semakin diabaikan dan semakin menyusut luasnya, dan beberapa sungai mengalami sedimentasi. Hal ini jelas memengaruhi kehidupan masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai sarana untuk mencari nafkah.

Selain sebagai masyarakat yang erat hubungannya dengan sungai, Masyarakat Banjar memiliki budaya dan latar belakang agama yang sangat kuat. Oleh sebab itu, pendekatan teologis sangat penting untuk mendorong partisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan di sekitar sungai. Bekerja sama dengan pemuka agama dan tokoh adat, di satu sisi LK3 berusaha untuk mengembalikan kesadaran akan kearifan lokal di Banjarmasin, sedangkan di sisi lain LK3 berupaya untuk menjadikan agama lebih dari sekadar masalah normatif.

Pertama adalah mitos tentang hantu yang hidup di sungai, misalnya makhluk tambun yang hidup di pusaran air, buaya kuning, dan hantu air (hantu banyu). Menurut sebagian besar masyarakat, mitos-mitos ini diturunkan dari generasi ke generasi, dari orangtua ke anak-anak. Masyarakat menyadari bahwa mitos-mitos tersebut, yang tersebar dari mulut ke mulut, melindungi sungai, khususnya mencegah orang membuang sampah ke sungai.

Aspek kedua yang terkandung dalam kearifan lokal adalah lagu-lagu tradisional dan puisi yang menunjukkan ikatan antara masyarakat dan sungai. Lagu-lagu ini dinyanyikan dan puisi dibacakan selama perjalanan untuk menangkap ikan atau untuk memuji sungai. Contohnya adalah lagu Sungai Martapura yang disebutkan di awal cerita ini. Selain bercerita tentang tempat yang mendukung mata pencaharian, lagu ini memberikan kebanggaan kepada masyarakat Banjar terhadap sungai Martapura yang menjadi tempat yang indah di malam hari, dengan ikan lokal yang melimpah: *jelawat*, *puyau* dan *sanggiringan*. Sayangnya, makna lagu ini memudar karena menyusutnya jumlah ikan dan pencemaran sungai.

Aspek ketiga yang terdapat dalam kearifan lokal adalah keberadaan rumah *lanting*, yaitu rumah terapung yang berlantai bambu. Pada zaman

keemasan Kesultanan Banjar, rumah-rumah ini berfungsi sebagai tempat beristirahat bagi para pedagang. Rumah *lanting* juga menjadi tempat bagi para pedagang untuk berinteraksi satu sama lain dan melakukan transaksi. Saat ini, fungsi rumah *lanting* bahkan telah berkembang menjadi rumah para nelayan. Rumah *lanting* mewakili identitas masyarakat Banjar dan merupakan media penting untuk menyatukan mereka. Jadi sudah seharusnya rumah *lanting* dilestarikan sebagai bagian dari budaya orang Banjar. Namun, pemerintah kota Banjarmasin melihat rumah-rumah *lanting* sebagai pemandangan yang berantakan, sehingga merasa rumah-rumah itu harus dirobohkan. Masyarakat berpendapat bahwa rumah *lanting* harus dilihat tidak dari segi fisiknya saja, tetapi juga dari nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada masyarakatnya.

LK3 menggelar acara dengar pendapat di Gedung DPRD Banjarmasin dan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah daerah dalam diskusi publik, seminar dan acara bincang-bincang televisi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya revitalisasi sungai dan kontribusinya terhadap kearifan lokal. Kekuatan jaringan dan advokasi LK3 membuka peluang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk mengkritik dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan revitalisasi sungai di Banjarmasin. Hasilnya, pemerintah telah membentuk komite pemeliharaan sungai berbasis masyarakat.

Yang menarik adalah upaya-upaya untuk mempelajari lagu-lagu dan puisi ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya revitalisasi sungai dan bersikap ramah terhadap budaya, agama dan lingkungan. Masyarakat bergotong royong membersihkan sungai dari limbah yang mencemarinya atau yang menyebabkan terbentuknya sedimentasi. Mereka melakukan kegiatan ini dengan tujuan agar dapat memperoleh air bersih dan ikan yang berlimpah, seperti di masa lalu. Inisiatif ini berlanjut selama beberapa minggu, karena masyarakat menyadari bahwa membersihkan sungai untuk memulihkan fungsinya tidak dapat dilakukan hanya sekali, tetapi harus terus menerus.

Studi Kasus 6: Kearifan menghindarkan bencana di Jawa Tengah – Bandung Institute for Governance Studies (BIGS)

‘Inilah desa kita.

Desa yang terletak di lereng gunung.

Ada sawah, ada bukit, namun hutannya sudah gundul.’

Narasi ini membuka film animasi yang diproduksi oleh BIGS yang berjudul ‘Lestarkan Hutan Kita’ (<https://youtu.be/RBVuui4REkQ>). Video berdurasi delapan menit ini bercerita tentang bencana yang terjadi karena hutan gundul, dari tanah longsor hingga banjir. Gambar beralih dari kawasan yang terkena bencana ke desa lain yang berbeda. Di desa ini ada juga sawah dan perbukitan, dan terletak di lereng gunung yang curam. Bedanya adalah hutannya masih utuh. Meskipun ditampilkan dalam bentuk animasi, desa ini benar-benar ada. Ini adalah desa Pakis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sinilah BIGS melakukan penelitian tentang bagaimana pengetahuan lokal mendukung pelestarian hutan Merangan yang terletak di sekitar desa.

Merangan digolongkan sebagai hutan rakyat, yang dimiliki secara perorangan oleh petani kecil. Jenis hutan ini sebagian besar terdapat di Pulau Jawa. Bentang alam ekologis dan sosiologisnya sangat berbeda dengan hutan perkebunan yang pada umumnya terletak di luar Pulau Jawa. Di daerah-daerah yang padat penduduknya seperti Kabupaten Kendal, dan kawasan berhutan lainnya di Jawa, hutan rakyat berlokasi di daerah perbukitan yang dikelilingi oleh hutan milik negara, yang dikelola oleh perusahaan hutan negara, atau Perhutani (Bratamihardja et al, 2005). Mata pencaharian sehari-hari penduduk desa bergantung pada perpaduan antara pertanian dan kehutanan, tetapi karena hutan diawasi oleh Perhutani, pendapatan petani sering tidak menentu.

Selain melakukan penelitian dan sistemisasi terhadap pengetahuan lokal yang hidup di masyarakat desa Pakis, BIGS menyebarluaskan temuan-temuannya kepada penduduk yang tinggal di desa-desa di sekitarnya, dan kepada para pembuat kebijakan dengan menggali dan

menampilkan kearifan lokal masyarakat Pakis. Hal ini tidak hanya berguna bagi masyarakat yang tinggal di sekitar desa Pakis dan Kendal, tetapi juga untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan di lokasi lainnya, khususnya di daerah-daerah yang padat penduduknya, seperti Pulau Jawa. Mereka dapat belajar dari pengalaman penduduk desa Pakis dalam mengelola hutannya.

BIGS menemukan pola perilaku masyarakat Pakis dalam mendukung konservasi hutan, yaitu dengan menggunakan pengetahuan lokal yang bersifat tradisional dan kontemporer. Ada berbagai cara yang menunjukkan cara-cara pengetahuan lokal berkontribusi untuk melestarikan hutan Merangan.

Pengetahuan lokal telah diwariskan secara turun temurun melalui kisah-kisah kepahlawanan oleh nenek moyang warga desa ketika berusaha mengendalikan aliran air. Kisah-kisah heroik ini terkait erat dengan berbagai pembatasan yang didukung oleh warga desa. Pembatasan ini termasuk larangan menebang pohon di hutan dan dorongan untuk memanen hasil hutan hanya jika diperlukan. Ada juga larangan bagi penduduk untuk memasuki hutan pada hari-hari tertentu.

Cara kedua yang menunjukkan kontribusi pengetahuan lokal dalam pelestarian hutan adalah perilaku yang harmonis masyarakat yang terhubung erat dengan alam. Cara ketiga adalah perjanjian antara petani dengan Perhutani untuk tidak merusak hutan. Perjanjian ini ditegakkan dengan menggunakan budaya tradisional rikuh (malu). Akibatnya, meskipun LSM kehutanan tidak aktif dan penjaga hutan tidak selalu ada untuk mengawasi, penduduk desa tidak merusak hutan karena mereka tidak ingin dipermalukan.

BIGS menuangkan temuan ini ke dalam film animasi, 'Lestarkan Hutan Kita' untuk digunakan sebagai landasan dalam melakukan sosialisasi dan advokasi ke desa-desa lain di sekitar Pakis di Kendal dan Semarang. Berdasarkan film ini, BIGS melakukan validasi eksternal untuk penelitian yang dilakukannya di Pakis dan mengumpulkan tanggapan tentang film tersebut dari warga desa yang menghadiri pemutarannya. BIGS menanyakan tanggapan warga desa terkait dengan konservasi

hutan di wilayah mereka.

Setelah kegiatan ini terlaksana, ada acara besar yang diselenggarakan pada pertengahan Februari 2016 untuk menghormati mata air, dan untuk mengingat peran penting hutan dalam melestarikan mata air ini. Upacara *Susuk Wangan* sangat meriah, karena dihadiri oleh warga desa dari seluruh daerah di sekitar Pakis dan pejabat dari tingkat desa dan kecamatan serta instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang dan Kendal. Melalui upacara ini, warga desa diingatkan tentang pentingnya pelestarian hutan, khususnya pengetahuan lokal dalam upaya pelestarian ini.

BIGS menandai upacara yang diselenggarakan di awal tahun ini sebagai perubahan simbolis dalam perilaku masyarakat dari tradisi dan kebiasaan lama (pengetahuan lokal) terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan. Sebelumnya, hanya segelintir warga desa yang terlibat dalam acara-acara yang berkaitan dengan lingkungan (mata air dan hutan), karena mereka merasa acara-acara tersebut tidak berhubungan dengan kehidupan mereka, dan karena beberapa orang percaya bahwa tradisi tersebut melanggar norma-norma agama Islam (*bid'ah*).

Kehadiran pejabat dari luar daerah wilayah program pada upacara *Susuk Wangan* menunjukkan bahwa konservasi hutan di Pakis tidak terbatas pada masalah administrasi saja. Kehadiran pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh penting menunjukkan bahwa pemerintah daerah setempat memahami pentingnya pengetahuan lokal, tradisi dan praktik-praktik yang ada di masyarakat. Dukungan dan tanggapan positif dari pemerintah daerah terhadap acara tradisional ini akan berlanjut dengan penerapan prinsip-prinsip pengetahuan lokal dalam proses penyusunan kebijakan daerah tentang konservasi hutan. Hal ini akan menciptakan perubahan yang berarti.

Studi Kasus 7: Menghidupan kembali *Keujruen Blang* – Pusat Kajian dan Pendidikan Masyarakat (PKPM), Aceh

‘Pangulee hareuket meugoe’

‘Pekerjaan yang paling penting adalah bertani’

Pepatah ini menggambarkan pentingnya sawah bagi orang Aceh. Sementara shalat adalah kegiatan ibadah yang utama, bekerja di sawah adalah mata pencaharian yang utama. Seperti kelompok etnis lain di Indonesia pada umumnya, masyarakat Aceh memiliki sistem berdasarkan adat istiadat mereka sendiri yang khusus ditujukan untuk mengelola sawah, yang disebut *Keujruen Blang*.

Keujruen Blang berasal dari kata *keurajeun* atau kerajaan, yang berarti kekuasaan teritorial, dan *blang*, yang berarti sawah. *Keujruen Blang* dapat diartikan sebagai kekuasaan di sawah. Hal ini juga menunjukkan bahwa *Keujruen Blang* telah ada sejak zaman kerajaan di Aceh. “Tugas mereka adalah mengatur pengairan air hingga menentukan waktu kapan musim tanam dimulai,” kata Syamsulrizal, Wakil Bupati Aceh Besar.

Dalam struktur pemerintahan setempat, *Keujruen Blang* adalah lembaga adat yang bertugas membantu *keuchik*,²⁷ kepala gampong (desa), dan *Imuem mukim*, pemimpin mukim (satuan masyarakat antara tingkat kecamatan dan desa) di bidang pertanian. Sebagai lembaga adat, pemimpin *Keujruen Blang* tidak diangkat oleh kepala desa (*keuchik*), tetapi dipilih oleh para petani melalui diskusi.

Struktur *Keujruen Blang* bertingkat. Pada tingkat mukim (wilayah administratif yang terdiri dari beberapa gampong dan berada di bawah tingkat kecamatan) disebut *Keujruen Cheik*. Di tingkat gampong atau desa, hal ini disebut *Keujruen Muda*. Jika sawah di tingkat gampong luas, maka ada juga *Peutua Blang*, yang bertindak sebagai ‘asisten’ untuk

27 Pemimpin masyarakat adat gampong yang mengatur masyarakat hukum di bawah tingkat kecamatan (disebut gampong atau setara dengan desa) dan memelihara hukum adat, perdamaian sosial, ketertiban, kesepakatan, keselarasan dan kesejahteraan. *Keuchik* bertanggung jawab langsung kepada camat.

Keujruen Muda.

Tidak semua daerah di Aceh mempraktikkan tradisi ini, bahkan Aceh Besar pun tidak. Bagi sebagian besar masyarakat Aceh, *Keujruen Blang* hanyalah sebuah nama belaka. “lembaga Ini tidak berfungsi sama sekali,” ujar fasilitator masyarakat Muhammad Ridha. Pada tahun 2015, sebuah organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Aceh, yaitu Pusat Kajian dan Pendidikan Masyarakat (PKPM), mewawancarai ratusan petani, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah untuk merevitalisasi *Keujruen Blang*. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya *Keujruen Blang*, dan untuk menggambarkan tata kelola *Keujruen Blang* dalam sistem pertanian Aceh yang berlaku, pengetahuan penting berdasarkan tipologinya, dan kaitannya dengan dinamika pembangunan dan pertanian. PKPM bekerja sama erat dengan pemerintah daerah setempat, Majelis Dewan Masyarakat (MAA), dan kantor dinas pertanian setempat untuk mensosialisasikan temuan penelitian mereka dan menggali potensi untuk melakukan kerja sama. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti dan menerapkan rekomendasi yang berasal dari penelitian tersebut.

Salah satu alasan mengapa keberadaan *Keujruen Blang* melemah adalah karena terbentuknya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), sebuah organisasi yang didirikan oleh pemerintah dengan peran serupa dengan *Keujruen Blang*. Pada tahun 1997, kabupaten Aceh Besar mendirikan 176 P3A. Namun P3A ini tidak bekerja secara optimal dalam mengelola sawah, dan gagal menggantikan fungsi *Keujruen Blang*. *Keujruen Blang* tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin di bidang pertanian, tetapi juga sebagai mediator jika terjadi konflik di antara para petani. P3A menjadi kurang efektif karena mengabaikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Misalnya, sebagian besar pimpinannya ditunjuk langsung tanpa melibatkan petani, dan akibatnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. “P3A tidak mengakar di masyarakat,” kata Ridha. Masyarakat juga sering bingung ketika membedakan *Keujruen Blang* dan P3A. Di beberapa daerah di Aceh Besar, P3A dianggap menggantikan *Keujruen Blang*. Di daerah lainnya,

Keujruen Blang masih ada, tetapi memiliki peran yang lebih sempit, yaitu hanya mengelola pengairan untuk sawah secara tradisional.

Namun, di daerah lain *Keujreun Blang* menjadi semakin relevan. Selain berfungsi sebagai modal sosial untuk menyatukan masyarakat, lembaga adat ini merupakan fasilitas untuk memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput. *Kejreun Blang* juga memiliki potensi untuk menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

PKPM melihat adanya peluang untuk menghidupkan kembali peran penting *Keujruen Blang* melalui UU Perdesaan yang baru (UU 6/2014). Undang-undang ini mengakui keberadaan lembaga daerah dalam masyarakat. Pemerintah Aceh juga telah membuat peraturan mengenai hal ini. Baru-baru ini, Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Nomor 45/2015 tentang ‘Pengelolaan Irigasi *Keujruen Blang*’. Dalam peraturan ini istilah P3A dihilangkan. “Sekarang ada kesadaran yang kuat terhadap kearifan lokal dan adat,” kata penyelenggara PKPM, Ridha. Namun, peraturan ini belum ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis yang diperlukan. “Belum ada strategi nyata dari pemerintah kabupaten,” lanjut Ridha.

PKPM menemukan bahwa masyarakat dan pejabat pemerintah di tingkat akar rumput berharap bahwa *Keujruen Blang* dapat dihidupkan kembali. Isu ini muncul karena selain pengelolaan sawah yang kurang baik, petani tidak ingin memperebutkan air untuk lahan mereka. Meskipun konflik yang terjadi tidak berarti, gesekan ini mengganggu hubungan dalam masyarakat. “Keinginan masyarakat harus ditanggapi dengan baik oleh pemerintah setempat,” kata Ridha. Wakil Bupati Aceh Besar, Syamsulrizal, siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghidupkan kembali *Keujruen Blang* dan mengatakan bahwa dia memiliki strategi untuk mewujudkan hal ini. Dia akan merangkul anggota-anggota *Keujruen Blang* yang lama dan orang-orang yang dihormati di masyarakat. Dia juga akan menyerahkan pemilihan pimpinan *Keujruen Blang* kepada para petani, sebagai janji kampanye agar dia dipilih kembali sebagai wakil bupati.

Studi Kasus 8: Anugerah dari *mawah* – Yayasan Kemaslahatan Umat (YKU), Aceh Besar

Min, seorang *keuchik* (kepala gampong), memulainya dengan memelihara sapi tetangganya. Sekarang dia adalah seorang bos peternakan di kota kelahirannya dan memiliki 40 ekor sapi setelah berkecimpung dalam bisnis ini sejak duduk di bangku sekolah menengah atas di Banda Aceh pada tahun 1990. Jumlah sapi *keuchik* ini bertambah setiap tahun, karena selalu ada sapi yang melahirkan. Pada tahun 2015, dia memiliki 12 ekor anak sapi. *Keuchik* memberikan beberapa ekor sapi yang dimilikinya kepada tetangganya untuk dipelihara. Sebagai imbalannya, *Keuchik* Min mengurus sejumlah sapi milik tetangganya. Mekanisme pembiayaan dan investasi tradisional ini disebut *mawah*, dan tidak hanya memiliki manfaat ekonomi. “*Mawah* efektif dalam menjaga hubungan baik dengan tetangga,” kata *Keuchik* Min.

Mawah adalah bentuk atau pola kerja sama ekonomi dan bisnis yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Sistem ini sering diterapkan di bidang pertanian dan yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya, untuk sapi *mawah*, pembagian keuntungan mempertimbangkan biaya operasional dan harga jual ternak yang dihitung berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk membesarkannya.

Masyarakat Lamteuba menjual sapi ketika mereka membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Ketika sapi yang dijual milik tetangga, keuntungan akan dibagi rata antara pemilik dan pemelihara sapi tersebut. Mata pencaharian masyarakat setempat bergantung pada pertanian dan ternak. “*Mawah* adalah praktik ekonomi yang sangat membantu rakyat,” kata *Keuchik* Min, yang sekarang menyediakan modal untuk sistem *mawah*.

Mawah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat miskin yang memiliki kesulitan untuk mengakses modal melalui program kredit mikro, karena mereka tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi kredit mikro. Sebagian dari mereka tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan, sementara sebagian lainnya tidak memiliki penghasilan tetap

untuk mengembalikan pinjamannya. Proses *mawah* dimulai dengan kepercayaan. Keberhasilannya sangat tergantung pada kejujuran para penerima manfaat.

Ada tiga tahap yang harus dilalui dalam *mawah*. Pertama adalah perjanjian lisan atau serah terima sesuai dengan kebiasaan setempat. Di gampong Saree, praktik *mawah* sudah sangat sering dilakukan, sehingga mereka berkomunikasi melalui pesan teks. Tahap kedua berkaitan dengan manajemen dan tahap ketiga menyangkut penjualan dan pembagian laba. Saat ini sistem bagi hasil yang digunakan adalah 70% untuk penerima *mawah* dan 30% untuk penyedia modal.

Pada umumnya masyarakat menggunakan praktik *mawah* mereka sebagai tabungan. Di Saree misalnya, para pemuda menggunakan laba yang diperoleh dari *mawah* untuk membiayai pernikahan mereka di masa yang akan datang. Di Pidie, para ibu menciptakan *mawah tiram* (tabungan) untuk ‘berjaga-jaga’ apabila suami mereka tidak dapat berlayar karena cuaca buruk. “*Mawah* juga bisa menjadi peluang investasi bagi penyedia modal eksternal untuk menjaga hubungan baik di antara masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Min.

Selama beberapa tahun terakhir, YKU, yaitu lembaga non-pemerintah yang berbasis di Aceh, telah bekerja sama dengan Yayasan Aceh Hijau dan pejabat pemerintah daerah untuk mengembangkan pedoman teknis untuk *mawah* dan indeks syariah. Keberadaan sistem pengetahuan ini terancam karena banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan ini hilang dalam bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004. YKU saat ini sedang menyusun pedoman operasional untuk menerapkan sistem *mawah* di Aceh Besar.

Lembaga Keuangan Mikro *Beng Mawah* didirikan di Aceh Besar pada tahun 2012 oleh sejumlah penggiat organisasi masyarakat sipil (termasuk YKU dan Yayasan Aceh Hijau), lembaga ini menyediakan akses terhadap modal bagi para anggotanya di bidang pertanian dan industri rumah tangga. Pinjaman diberikan tanpa agunan, dengan menggunakan sistem bagi hasil. Penerima pinjaman akan mendapatkan 70% dari keuntungan yang dihasilkan, sementara sisanya mengalir ke Lembaga Keuangan Mikro

Beng Mawah. Lembaga ini menciptakan sistem *mawah* yang lebih modern. Dalam program ini, selain memberikan pengetahuan tentang peningkatan ekonomi rumah tangga melalui sistem *mawah*, YKU telah berhasil menjalin kerja sama dengan para aktor utama, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, yang telah melakukan penelitian tentang masalah ini. Kerja sama ini secara resmi tertuang dalam nota kesepahaman antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Islam (UIN) yang berlokasi di Banda Aceh dan LSM lokal yang peduli dengan masalah lingkungan, yaitu Yayasan Aceh Hijau. *Mawah* juga telah diadopsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Studi Kasus 9: Tanpa kompromi di Torong Besi – Pusat Studi Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (POLGOV UGM)

Asosiasi Masyarakat Adat di Torong Besi, Kabupaten Manggarai, yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, telah menjadi simbol penolakan masyarakat terhadap eksploitasi bijih mangan di daerah tersebut. Didirikan pada tahun 2007, asosiasi ini adalah bagian terpenting dari *Forest Circle Society Network* yang secara aktif menolak proyek penambangan, karena proyek ini merusak lahan pertanian dan mengurangi aset produktif milik masyarakat. Di daerah ini sebanyak 75% dari rumah tangga mencari nafkah sebagai petani dan nelayan.

Sejak 2013 tidak ada lagi kegiatan penambangan. Namun, melalui asosiasi ini masyarakat setempat tetap waspada terhadap kemungkinan kembalinya para penambang. “Sikap kami jelas, kami menolak semua kegiatan penambangan,” kata Simon Suban Tukan, salah satu tokoh masyarakat di Torong Besi. Masyarakat setempat juga mendirikan koperasi untuk memberdayakan ekonomi daerah, sehingga mereka tidak bergantung pada investasi asing, khususnya di sektor pertambangan. Melalui koperasi, masyarakat membudidayakan babi serta sapi dan kerbau. Setiap anggota secara sukarela memberikan sumbangan yang besarnya berkisar antara Rp 50.000 dan Rp 100.000 (US\$ 4 hingga US\$ 8) per bulan untuk modal koperasi. Dengan menggunakan sistem simpan pinjam, modalnya sering digunakan untuk membantu nelayan setempat.

Gambaran di atas adalah potret tentang bagaimana masyarakat lokal muncul dengan inisiatif untuk menyuarakan penolakan mereka, yang dimulai dengan membentuk sebuah perkumpulan, kemudian meminta dukungan advokasi dari organisasi yang peduli dengan masalah lingkungan serta mendirikan koperasi untuk membangun kemandirian ekonomi. Mereka memiliki tujuan mulia: melakukan pencegahan penambangan di kawasan hutan lindung sejak awal. Inisiatif lokal yang dijelaskan di bawah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk menolak proyek penambangan di daerah mereka yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (POLGOV UGM) telah mendokumentasikan dan mendukung perlawanan lokal terhadap penambangan selama beberapa tahun terakhir. POLGOV dan organisasi masyarakat sipil lainnya melibatkan para pemuka agama untuk memengaruhi proses penyusunan kebijakan di Manggarai. POLGOV juga mendukung masyarakat yang terkena dampak untuk bekerja sama dengan beberapa jaringan LSM nasional.

Eksplotasi pertambangan di Torong Besi dimulai pada tahun 1994 dengan masuknya perusahaan seperti P.T. Arumbai dan Istindo Mitra Oerdan (Colbran, 2010). Torong Besi terkenal karena menghasilkan mangan, dan cadangannya pada saat itu mencapai jutaan ton. Masalahnya adalah kegiatan penambangan terletak di kawasan hutan lindung, yang secara tradisional dimiliki oleh desa adat Gendang Locé dan Gendang Kerkuak. Setelah P.T. Sumber Jaya Asia mulai beroperasi di kawasan tersebut dan menambang bijih mangan secara besar-besaran pada awal 2007, masyarakat mulai melihat dampak negatifnya. Penambangan mangan menghancurkan mata pencaharian para nelayan, karena mencemari pantai. Kegiatan penambangan juga menyumbat sejumlah mata air di kawasan tersebut, sehingga menyebabkan kekeringan. Orang-orang mulai menderita penyakit hati karena menghirup debu mangan. Pada awal 2008, setidaknya ada tiga orang masyarakat setempat yang meninggal karena penyakit ini. “Tidak ada lagi kenyamanan di sini, yang ada hanya kemarahan,” kata Yakobus Daud, seorang tokoh

adat di desa Robek ketika menggambarkan situasi pada saat itu.

Karena sudah tidak mampu lagi menahan dampak penambangan yang semakin memburuk, pada awal tahun 2008 sejumlah tokoh masyarakat adat mengumpulkan masyarakat Torong Besi. Mereka sepakat untuk melaporkan hal ini ke pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Manggarai. Kunjungan mereka tidak diacuhkan sama sekali hingga beberapa kali. “Kami menuntut penutupan perusahaan tambang yang beroperasi di daerah,” kata Gaspar Sales, kepala kampung adat Gincu di desa Robek.

Mereka akhirnya mengubah strategi mereka dengan meminta dukungan dari jaringan masyarakat sipil nasional yang terkenal, antara lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Komposisi aktor lokal bervariasi. Di Manggarai, dengan budaya Kristennya, gereja memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali pengetahuan lokal tentang pelestarian ekologi dalam konteks norma-norma agama. Gereja berperan aktif dalam memfasilitasi proses politik yang mengkonsolidasikan tindakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan penambangan. Gereja juga membentuk aliansi strategis dan koalisi dengan AMAN, WALHI dan JATAM. Di bawah Keuskupan Ruteng, jaringan advokasi ini terhubung di tingkat lokal, nasional dan global.

Adanya dukungan ini membuat masyarakat setempat mampu mengembangkan keterampilan advokasi yang lebih baik. Selain demonstrasi, jaringan tersebut juga menyiapkan berbagai strategi advokasi, mulai dari pembentukan opini di media massa hingga gugatan *class action*. Misalnya, Simon Suban Tukan, mantan anggota DPRD Provinsi yang terkenal di Nusa Tenggara Timur, membantu upaya advokasi di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten.

Perlawanan ini akhirnya menunjukkan hasil. Pemerintah Kabupaten Manggarai menghentikan kegiatan penambangan P.T. Sumber Jaya Asia di Torong Besi. Tekanan kuat dari masyarakat mendorong Bupati Manggarai, Christian Rotok, untuk mencabut izin usaha perusahaan

pada tahun 2009. Bupati juga mengatur penghentian semua kegiatan eksploitasi di kawasan hutan lindung Torong Besi. Sejak itu, masyarakat Torong Besi berkomitmen untuk tidak pernah berkompromi dengan kegiatan penambangan apa pun, khususnya yang dilakukan di hutan lindung. Masyarakat Torong Besi mengoptimalkan prinsip kepemilikan komunal dan adat sebagai tekanan untuk memengaruhi kebijakan.

Studi Kasus 10: Asuransi tradisional – Lembaga Advokasi HIV/AIDS (LAHA)

Di Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), nilai kegotongroyongan tidak mengenal arti kehilangan. Mereka menyebut hal ini *melesi*, yang artinya berbagi beban atau meringankan beban satu sama lain dalam suka maupun duka. *Melesi* diambil dari bahasa yang digunakan oleh kelompok etnis Tolaki yang terdapat di Konawe Selatan. Bantuan diberikan untuk masyarakat yang tertimpa musibah (seperti kematian), atau untuk biaya pendidikan tetangga yang melanjutkan sekolah di luar daerah, atau untuk biaya pernikahan. “Kami umumnya datang membawa uang atau kelapa,” kata Haryanto Yunus, seorang organisator masyarakat.

Menurut Haryanto, tradisi *melesi* berasal dari semangat kebersamaan dan gotong royong. Tradisi ini bersifat intrinsik dalam kehidupan sosial masyarakat setempat dan telah dilestarikan secara turun temurun. Gagasan ini membuat sejumlah kelompok masyarakat ingin melembagakan *melesi* sebagai kebijakan formal. Salah satu bentuk konkretnya adalah dengan mewujudkan *melesi* ke dalam skema jaminan kesehatan masyarakat yang dibiayai oleh mereka sendiri.

Pada Agustus 2015, LAHA menyelenggarakan diskusi kelompok tentang pengintegrasian *melesi* sebagai unsur pelengkap dalam jaminan kesehatan formal. Diskusi ini dilakukan di empat desa di kecamatan Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan. Panitia diskusi meminta peserta untuk berbagi pengalaman mereka dalam menggunakan jaminan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat setempat.²⁸ Misalnya, apakah

28 Keinginan untuk memiliki jaminan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat dapat dilihat sebagai reaksi terhadap masalah operasional (misalnya, sistem rujukan yang ketat dan

mereka masih harus membayar biaya di luar yang dicakup oleh skema jaminan kesehatan tersebut?

Hasilnya menunjukkan bahwa hampir semua peserta membayar biaya tambahan di luar yang tercakup dalam jaminan kesehatan. Mereka masih menggunakan *melesi* ketika tetangga mereka tertimpa musibah. Oleh karena itu, mereka menyampaikan gagasan bahwa *melesi* harus diintegrasikan ke dalam sistem jaminan kesehatan yang berlaku di Sulawesi Tenggara dan dikaitkan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Kami ingin *melesi* memiliki dasar hukum,” kata Haryanto.

Proses untuk memberikan status hukum untuk *melesi* pada awalnya tidak berjalan mulus, dengan beberapa kelompok masyarakat menolak gagasan tersebut. Mereka mencurigai kegiatan ini hanya untuk menggalang dana untuk kepentingan pribadi. Sosialisasi tentang *melesi* kemudian lebih ditingkatkan lagi di sejumlah lokasi guna meyakinkan masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif mereka dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Haryanto menjelaskan bahwa mereka perlu mendapat jaminan bahwa *melesi* akan memberikan manfaat bagi mereka ketika mereka membutuhkannya.

Setelah beberapa waktu, proses ini mulai berjalan relatif lancar, dan pada bulan September 2016 skema jaminan kesehatan mendapat dukungan berupa keputusan agar semua instansi pemerintah menandatangani perjanjian untuk mendukung jaminan kesehatan desa yang didasarkan pada *melesi*. “Kuncinya adalah jaminan bahwa *melesi* didukung oleh lembaga pengawas yang dipilih oleh rakyat,” kata Haryanto.

Pemerintah desa mengatur premi untuk *melesi*. Premi yang harus

proses yang lambat) yang terjadi dalam skema jaminan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Jamkesda) yang diperkenalkan pada pertengahan tahun 2000an setelah desentralisasi dan pilkada secara langsung dilaksanakan. Skema jaminan kesehatan yang populer mengundang keberhasilan di tempat pemungutan suara dan menjadi aset elektoral selama pilkada. Lihat Pisani et al, 2016, untuk pembahasan lebih lanjut tentang perjalanan politik program jaminan kesehatan universal Indonesia.

dibayar oleh kepala keluarga ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Satu-satunya hal yang membedakan *melesi* dari asuransi formal adalah manfaat yang dibayarkan. Dalam asuransi formal, pemerintah atau penyedia asuransi menentukan jumlah manfaat yang dibayarkan, namun berdasarkan *melesi*, Haryanto mengatakan bahwa masyarakat yang menetapkan jumlahnya, “tergantung pada hasil diskusi antara warga desa”.

Haryanto berpendapat bahwa *melesi* juga dapat memberikan manfaat lain bagi desa-desa yang menerapkannya. Misalnya, dana yang tercakup dalam jaminan kesehatan yang tidak digunakan oleh anggota *melesi* dalam jangka waktu tertentu dapat diubah menjadi deposito. Jika tidak digunakan, dana ini dapat digunakan untuk mengembangkan badan usaha milik desa. Badan-badan usaha ini kemudian akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produktif di desa. “*Melesi* mengajarkan kemandirian dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa,” kata Haryanto.

Sejak Oktober 2015, dengan bantuan LAHA, sejumlah desa telah mulai menyusun rancangan ‘Peraturan Desa tentang Budaya Lokal *Melesi*’. Salah satu narasumber yang diundang untuk membantu penyusunan rancangan peraturan ini adalah Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Pemerintah Konawe Selatan, Risman Kudaso. Setelah rancangan selesai, pimpinan desa mensosialisasikannya dan membentuk badan pengawas di setiap desa.

Risman mendorong setiap desa untuk menyusun peraturan desa agar *melesi* mendapat status hukum. “Dengan cara ini desa-desa lain dapat mereplikasi *melesi*,” kata Risman. Dalam diskusi tersebut, sejumlah lembaga adat mengharapkan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dalam bentuk stimulus untuk pembiayaan awal. Menurut Haryanto, salah satu tantangan untuk menerapkan sistem asuransi berdasarkan *melesi* berkaitan dengan kapasitas pengelolaan dana. Dia berpendapat bahwa perangkat desa masih membutuhkan dukungan untuk jangka waktu tertentu. “Itu sebabnya dukungan dari pemerintah dan tokoh-tokoh desa sangat penting,” ujarnya.

Risman Kudaso mengatakan bahwa *melesi* merupakan penafsiran dari Peraturan Daerah Nomor 22/2013 tentang *Mandara Mendidoha Desa* (Desa Sehat dan Cerdas). Menurut Risman peraturan ini dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi pelaksanaan jaminan kesehatan desa yang berdasarkan *melesi*. Dia mencatat bahwa *melesi* baru saja diterapkan di kecamatan Ranomeeto Barat, dan semakin banyak desa yang menerapkannya.

BAB 5.

Kemunculan dan perkembangan pengetahuan lokal

Dua bab berikut akan membahas bagaimana pengetahuan dikembangkan, dikelola dan digunakan pada waktu yang sesungguhnya oleh aktor yang sebenarnya, dan dalam konteks politik yang nyata. Kami menyusun laporan yang dihasilkan oleh 10 penerima hibah untuk proyek KSI yang akan sering dikutip dalam bentuk teks yang diidentasi. Bab 5 memusatkan perhatian pada pengembangan, kodifikasi dan pengelolaan pengetahuan lokal, sedangkan Bab 6 memusatkan perhatian pada penggunaan dan penerapan pengetahuan lokal oleh para pembuat kebijakan.

Berkembangnya pengetahuan lokal

Masyarakat dan lembaga memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dalam melahirkan pengetahuan lokal; untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar mereka; untuk merekomendasikan pilihan-pilihan guna menyelesaikan berbagai masalah; untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul; atau untuk melestarikan kearifan lokal. Beragam peran ini ditentukan oleh perbedaan kapasitas organisasi yang bersangkutan dalam memahami isu-isu lokal dan mengetahui konteks politik setempat, termasuk para pemangku kepentingan yang berkaitan.

Sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan prinsip *melesi* di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, misalnya, mencerminkan adanya solidaritas masyarakat yang terus berlanjut dengan beberapa perbaikan dalam hal tata kelola keuangan yang

menangani masalah-masalah kesehatan yang bermunculan. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kontribusi terhadap sistem jaminan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang masih terus berkembang. Sistem ini dapat berjalan dan bertahan karena dibangun berdasarkan sejarah masyarakat tersebut, yaitu modal sosial dan kearifan lokal mereka, namun juga sekaligus seiring dengan perkembangan skema asuransi kesehatan moderen. Sistem lokal dibangun atau diselaraskan dengan sistem kepercayaan yang ada, yang bukan merupakan sesuatu yang sama sekali baru, dan tidak seperti menciptakan suatu lembaga yang baru. Dalam hal ini, landasan untuk membangun strategi lokal untuk pembiayaan kesehatan adalah nilai-nilai tradisi saling membantu (*melesi*) yang sudah ada, dan bukannya solusi pembiayaan yang berdasarkan pada hal-hal teknis dan rasional:

Pengadaan jaminan kesehatan tingkat desa di Konawe Selatan diwujudkan dengan menerapkan 'melesi'. Berdasarkan melesi, setiap kepala keluarga wajib membayar premi secara rutin kepada Bapan Pengelola yang dibentuk oleh pemerintah desa. Jumlah premi tersebut ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat perdesaan, bukan berdasarkan risiko. 'Melesi' merupakan bagian dari warisan budaya lokal yang berasal dari nilai-nilai persatuan dan tolong menolong, atau 'samaturu medulu ronga mepokoo aso'. Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat di tingkat desa ini menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai tersebut. Selain itu, skema jaminan kesehatan tingkat desa yang mengadopsi 'melesi' dapat menjadi dasar bagi pembentukan lembaga usaha milik desa, sekaligus berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro di tingkat desa yang membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap modal untuk pengembangan usaha produktif di desa. Skema jaminan kesehatan yang berdasarkan melesi ini adalah model yang dapat diterapkan oleh masyarakat desa, karena didasarkan pada nilai-nilai gotong royong dan solidaritas, adanya akses terhadap fasilitas kesehatan rujukan yang mahal dan kesenjangan ekonomi yang lebar di desa.

Skema ini juga akan mengajarkan kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. (LAHA)

Pengetahuan lokal tertanama dalam sikap, perbuatan, moralitas dan spiritualitas. Pengetahuan lokal memiliki peran penting dalam hubungan sosial dan timbal balik dalam masyarakat, serta dalam kesatuan antara masyarakat dan alam. Keujruen Blang, yang merupakan pendistribusian air melalui sistem irigasi di Aceh Besar, berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendistribusikan air dan juga sebagai tempat untuk menyelesaikan konflik secara lebih luas di kalangan masyarakat. Mekanisme ini merupakan kebijakan bersama yang telah terbukti dan berjalan secara efektif, yang berakar pada struktur budaya masyarakatnya. Mekanisme ini memberikan penyelesaian terhadap konflik yang dapat diterima secara budaya (berbeda dengan mekanisme yang bersifat formal dan berdasarkan hukum yang disediakan oleh perkumpulan pengairan yang dikelola oleh pemerintah). Seperti yang dilaporkan oleh PKPM Aceh, pada akhir tahun 1990an pemerintah telah mendirikan 176 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) guna mengelola sistem irigasi, yang merupakan suatu mekanisme formal dan berdasarkan regulasi pemerintah. P3A bertujuan untuk membuat pengelolaan sistem pengairan yang modern pada tataran masyarakat. Namun demikian, di Aceh Besar, hanya beberapa dari perkumplan tersebut yang masih berjalan, sehingga menimbulkan konflik di antara para petani. Pada saat yang sama, pertikaian yang berkaitan dengan masalah pengairan di kalangan petani di daerah yang memiliki Keujruen Blang pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan dan tanpa konflik.

Masyarakat di Aceh memiliki pengetahuan yang telah dipraktikkan secara turun temurun dalam mengelola dan mengurus sawah. Pengetahuan ini membentuk karakteristik sistem persawahan yang dikelola oleh masyarakat Aceh. Keberadaan lembaga tradisional Keujruen Blang yang merupakan kearifan lokal sangat penting, karena sebagian besar masyarakat Aceh memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sumbangan terbesar bagi

perekonomian setempat berasal dari sektor pertanian. Keujruen Blang memainkan peran penting dalam penanganan tata kelola dan sistem pertanian untuk persawahan. Peran ini tidak hanya mencakup pengelolaan irigasi dan distribusi air, yang mengarah pada pelaksanaan kegiatan masyarakat tradisional, serta pembuatan kesepakatan bersama di kalangan petani tetapi juga dalam menyikapi isu-isu penting yang sulit diatasi, seperti penyelesaian konflik di antara para petani. Peran-peran ini memiliki kepentingan yang sangat kuat dalam pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian dan agenda pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas, karena prinsip dan praktik-praktik Keujruen Blang dapat memperkuat modal sosial dan demokratisasi lokal, mendukung ketahanan pangan, menciptakan keselarasan dan perdamaian, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. (PKPM Aceh)

Interaksi dan adaptasi dengan lingkungan sekitar

Kami telah mengemukakan bahwa ada interaksi yang erat antara pengetahuan lokal dan lingkungan alamnya. Studi kasus yang kami kemukakan berbagi pemahaman yang sama tentang pengetahuan lokal dalam masyarakat sebagai hasil evolusi yang terjadi secara bersamaan antara masyarakat dan lingkungannya. Evolusi bersama ini berfungsi sebagai landasan dan hasil dari mata pencaharian dan budaya masyarakat setempat. Pengetahuan lokal, seperti sistem pengelolaan air bersih berbasis klan di Kupang (Nusa Tenggara Timur) yang didokumentasikan oleh Pikul, menampilkan saling ketergantungan antara ranah sosial ekonomi dan ranah ekologi. Saling ketergantungan ini menjelaskan mengapa pengelolaan air bersih secara tradisional di Kupang lebih efektif dan berjalan dengan baik dibandingkan dengan mekanisme yang bersifat teknokratik yang dibangun oleh pihak luar dan dilaksanakan oleh proyek pemerintah di bidang infrastruktur air dan sanitasi masyarakat, PAMSIMAS (lihat studi kasus 1)

Warung Ilmiah Lapangan yang dikelola PUSKA UI merupakan tempat

terselenggaranya dialog dan tukar pikiran tentang pengetahuan interdisipliner dan transdisipliner. Di tempat ini, para petani, pakar antropologi, pakar agrometeorologi dan mahasiswa dari berbagai latar disiplin ilmu belajar dari satu sama lain dan terlibat dalam diskusi tentang kerentanan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bersama-sama mereka menyusun strategi adaptasi yang dapat dilakukan. Meskipun di sini para petani belajar tentang metode ilmiah, mereka tidak meninggalkan sistem pengetahuan tradisional. Para petani masih tetap mengacu pada hal-hal yang telah mereka ketahui sejak lama guna memprediksi musim tanam. “Keberadaan cicadas menunjukkan bahwa musim kemarau telah tiba, sedangkan kemunculan tunas-tunas bambu dapat mengindikasikan datangnya musim hujan.” ujar seorang fasilitator masyarakat dari PUSKA UI. “Perpaduan antara metode tradisional, metode empiris dan metode ilmiah telah membantu para petani mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap pertanian,” lanjutnya. Petani masih berkumpul secara teratur setiap bulan untuk berdiskusi tentang agrometeorologi dan menganggap bahwa kegiatan ini merupakan proses pembelajaran yang penting.

Dalam beberapa kasus yang kami kaji, pengetahuan lokal dan lembaga daerah terkait juga mendapat tantangan dari perubahan yang terjadi dengan cepat dalam bidang sosial ekonomi dan lingkungan. Berbagai kejutan dan tren dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal secara signifikan, misalnya seperti yang terjadi pada peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004.

Di Aceh, konflik dan tsunami telah meluluhlantakkan sumber daya alam (sawah, perkebunan, empang ikan, empang garam, ternak dan tumbuhan) dan sumber daya fisik (infrastruktur publik). Konflik dan tsunami telah melemahkan sumber daya manusia (kematian, kehilangan, hilangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, penyakit/cidera) dan menghancurkan sumber daya sosial (kepercayaan, keharmonisan sosial, budaya tolong menolong, saling peduli pada sesama, semangat kebersamaan). (PKPM Aceh)

Tantangannya adalah untuk mengakses apa yang masih tersisa (atau selamat) di antara perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat pada banyak kelompok masyarakat. *Sasi*, yang merupakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di Pulau Haruku, Maluku Tengah, menggambarkan hal ini. *Sasi* adalah pengakuan terhadap peran masyarakat dalam mengelola dan memelihara mosaik bentang alam dan keanekaragaman hayati. Berdasarkan prinsip-prinsip *sasi*, mencari ikan bukan hanya sekadar kegiatan untuk mencari penghidupan, namun juga percampuran antara hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan lingkungan hidup. *Sasi* diterima dengan baik dan ramah lingkungan, karena praktik ini menjamin distribusi sumber daya yang adil secara budaya kepada masyarakat. Kegiatan penangkapan ikan dibimbing oleh prinsip-prinsip konservasi. *Sasi* memberi kontribusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di sektor perikanan, karena mekanismenya membuat kegiatan penangkapan ikan dilakukan selektif mungkin, yaitu dengan tetap menangkap jenis-jenis spesies yang menjadi sasaran dengan ukuran yang tepat tanpa mengganggu spesies-spesies lainnya atau ikan-ikan muda dari spesies sasaran. Praktik ini juga bersifat ramah masyarakat, karena membantu menjaga keseimbangan yang diperlukan demi kegiatan perekonomian yang stabil dan dapat dipredisk. Namun demikian, *sasi* bersifat dinamis dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah:

Prinsip ‘sasi’ adalah: ‘Segala sesuatu pasti ada masanya’. Praktik ‘sasi’ merupakan gagasan yang berasal dari masyarakat adat yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dengan membatasi eksploitasi sumber daya dan melarang pemanenan sebelum waktunya. Misalnya, jika kelapa dipetik sebelum masak, meskipun bernilai ekonomis, hal ini tidak akan menumbuhkan buah kelapa baru. Demikian pula halnya penambangan pasir dan batu akan mengurangi kualitas air laut di pesisir. Masyarakat lokal di perdesaan tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan tradisi dan norma-norma yang ditujukan untuk menjadi pegangan bagi perilaku mereka bersama.

Hal disebabkan karena mereka telah tercabut dari akar kebudayaannya. Keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak terpenuhi karena masyarakat lokal tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam semua tahapan sumber daya alam. Perjuangan untuk melestarikan sumber daya alam akan semakin berat apabila izin untuk mengelola sumber daya alam diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengeruknya tanpa mempedulikan kelestarian dan keberadaan 'sasi' sebagai kebudayaan lokal yang pantas untuk dipertahankan. (PATTIRO)

Dalam banyak kasus, pengetahuan tradisional tergerus oleh modernisasi.

Saat ini pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara tradisional di pulau Timor sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang dikelola sudah tidak ada lagi atau telah berubah karena berbagai pembangunan yang terjadi atau proyek-proyek yang mengeruk sumber daya alam yang belum tentu disetujui oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pengetahuan lokal tentang musim tanam, musim panen, lumbung pangan masyarakat dan perlindungan alam tidak dapat lagi diterapkan; peran ketua adat tidak lagi diakui. Peran para sesepuh adat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat besar. 'Tobe' akan melakukan upacara-upacara untuk membuka lahan, memutuskan waktu tanam dan waktu panen, mengumpulkan hasil-hasil panen sebagai cadangan pangan, dan menetapkan batasan-batasan tentang perburuan dan pengambilan hasil-hasil hutan selama waktu-waktu tertentu. Namun demikian, dengan adanya penetapan tata kelola perdesaan yang seragam melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, peran ini tidak lagi diakui. Perlahan-lahan, hanya ada beberapa desa yang masih menggunakan pengetahuan lokal dan mengakui lembaga lokal untuk melestarikan alam dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam. (Pikul)

Interaksi antara bentuk-bentuk pengetahuan

Pada Bab 2, kami telah menekankan pentingnya sifat saling melengkapi antara berbagai sistem pengetahuan, serta perlunya untuk tidak lagi menerjemahkan pengetahuan menjadi satu hal yang diterima secara umum. Kasus tentang adaptasi terhadap iklim di kalangan para petani di Indramayu, Jawa Barat, menunjukkan adanya sifat pengetahuan lokal yang melengkapi. Para ilmuwan dari Universitas Indonesia bekerja sama dengan petani lokal untuk memahami iklim dan dampaknya terhadap kegiatan pertanian. Studi yang dilakukan oleh PUSKA UI menunjukkan bahwa kita perlu mengajukan ‘pendekatan berdasarkan bukti yang beragam’ alih-alih menggunakan satu pemahaman yang berasal dari sains formal. Sistem pengetahuan tradisional, lokal dan ilmiah menghasilkan bukti-bukti yang sama sahnya, saling melengkapi dan sama manfaatnya untuk menafsirkan kondisi, jejak-jejak perubahan dan dalam beberapa kasus hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan tata kelola ekosistem dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan (Tengö et al, 2014). Studi kasus menegaskan bahwa pendekatan berdasarkan keragaman bukti membutuhkan partisipasi masyarakat lokal yang lebih besar seperti yang disoroti di bawah ini:

Sejak tahun 2009, Kelompok Tani Indramayu, yang difasilitasi oleh PUSKA UI, telah mempelajari agrometeorologi di Warung Ilmiah Lapangan. Sejumlah kelompok petani, LSM daerah dan pakar di bidang meteorologi dari Indonesia, Belanda dan Afrika telah menjalin kerja sama melalui program ini. Berawal dari pengakuan para petani lokal bahwa sistem ramalan cuaca tradisional telah menyesatkan dalam beberapa tahun terakhir, mereka belajar untuk memantau dan menghitung curah hujan, memadukan metode ilmiah dengan pemantauan kondisi sawah, perilaku binatang, hama dan penyakit tanaman yang mereka catat secara teratur. “Pemantauan ini menghasilkan estimasi periode penanaman,” kata Yusup, salah satu anggota Kelompok Pengukur Curah Hujan Indramayu. Para petani tengah mengembangkan perilaku baru: mereka kini telah menjadi peneliti. Petani yang dulu

membawa cangkul kini juga membawa pulpen dan buku. (PUSKA UI)

Di pulau Timor, Pikul membawa pengetahuan lokal di pengelolaan air bersih kepada komunitas akademik karena pengetahuan ini memberikan informasi yang penting tentang pengelolaan air bersih di daerah. Perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut, yaitu Universitas Kristen Artha Wacana, mencatat bahwa temuan yang berasal penelitiannya memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh gereja Masehi Injil di Timor, yang merupakan salah satu gereja protestan terbesar di pulau Timor.

Dalam berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan, dukungan dari masyarakat ilmiah merupakan persyaratan yang tidak dapat diabaikan. Dukungan dari perguruan tinggi dan ilmuwan berjalan beriringan dengan tujuan pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, sehingga pengetahuan lokal memperoleh legitimasi ilmiah dan metodenya dapat dipertanggungjawabkan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa dukungan dari perguruan tinggi/masyarakat ilmiah membuat pengetahuan lokal dapat didengar oleh para pembuat kebijakan yang memiliki masih pengetahuan tentang kelembagaan dalam paradigma klasik/konvensional. Berdasarkan pengalaman Pikul, masyarakat ilmiah agak terinspirasi oleh pengetahuan lokal dalam mengembangkan suatu pengetahuan baru guna mengatasi masalah secara efektif. Masyarakat ilmiah juga telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pengembangan dan penyempurnaan metodologi pengembangan pengetahuan lokal. Selain itu, sejumlah kebijakan internasional (misalnya Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB) telah mendukung penerapan pengetahuan lokal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini memperkuat berbagai hikmah yang dipetik dari pengembangan pengetahuan lokal dalam arti bahwa pengetahuan lokal dapat dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan. (Pikul)

Beberapa mitra memasukkan unsur-unsur keyakinan yang berasal dari suatu agama dalam advokasi yang mereka lakukan. Contoh yang jelas dalam hal ini adalah LK3, yaitu organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Banjarmasin. Salah satu yang menjadi pusat perhatian LK3 adalah mendukung pengetahuan tradisional guna memperkuat pemahaman tentang Islam dalam masyarakat. Gagasan ini dijelaskan secara terperinci oleh LK3 melalui sejumlah kegiatan, seperti pemantauan dan advokasi tentang proyek pembangunan masyarakat, serta program-program tentang kesadaran lingkungan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, LK3 bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Wahid Institute yang berbasis di Jakarta, dalam menangani isu-isu tentang demokrasi, pluralisme, perempuan dan kebudayaan lokal. Film 'Haragu Sungai Kita' merupakan salah satu keluaran dari program LK3 yang memusatkan perhatian pada peremajaan budaya sungai dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dalam film tersebut, pengelolaan sungai menjadi indikasi adanya hubungan yang erat antara kearifan lokal, agama, kehidupan sehari-hari dan lingkungan fisik.

Sungai, dalam konteks masyarakat Banjar, mengandung banyak cerita. Cerita-cerita tersebut berisi tentang perjuangan, gagasan dan perilaku masyarakat Banjar dalam menafsirkan fungsi sungai sebagai sumber kehidupan. Dari proses dialog dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan advokasi revitalisasi sungai, LK3 menemukan sejumlah kisah yang berkaitan sangat erat dengan hubungan antara masyarakat dengan sungai. Salah satu kisahnya adalah tentang nabi Khaidir sebagai pelindung sungai. Seperti yang diceritakan oleh seorang pengamat budaya di Banjarmasin, kisah ini bercerita tentang:

"Dalam kepercayaan masyarakat Banjar, sejumlah nabi mengawasi sungai. Itu sebabnya mengapa ketika kita pergi ke sungai, kita diminta untuk mengucapkan salam dan doa, serta bertingkah laku sopan dan baik kepada sungai, karena sungai akan selalu menunjukkan kemarahannya apabila diperlakukan dengan buruk. Orang yang dipercaya melindungi sungai hingga saat ini adalah

nabi Khaidir. Sungai akan selalu memberikan doa yang terbaik bagi orang-orang yang memperlakukannya dengan baik dan begitu pula sebaliknya.”

Cerita lain yang mirip adalah bahwa sungai memiliki tasbih dan akan mendoakan siapapun yang bersikap ramah terhadapnya. Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan, ada ayat-ayat yang dikenal dengan sebutan kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berisi tentang hal-hal yang tidak terlihat. Lingkungan, termasuk sungai dengan segala isinya, termasuk dalam ayat kauniyah sebagai bukti kebesaran Tuhan. (LK3)

Dalam cerita rakyat ini, kita melihat bahwa sungai sangat berarti bagi masyarakat di sekitar Banjarmasin. Meskipun cerita rakyat mungkin dipandang sebagai mitos belaka, keberadaannya mencerminkan suatu bentuk kearifan lokal yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan lingkungannya, yang merupakan peta kognitif untuk beradaptasi dengan lingkungan. Cerita-cerita tersebut dihasilkan berdasarkan perjuangan panjang rakyat Banjar dalam menanggapi perubahan alam dan lingkungan di sekitar mereka. Cerita-cerita ini sudah jarang terdengar lagi dan hanya ada dalam kisah-kisah yang disampaikan oleh para sesepuh yang pernah hidup berdampingan secara damai dengan sungai. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan pembangunan yang semakin pesat, serta meningkatnya kedatangan orang dari luar daerah, cerita-cerita ini semakin lama semakin jarang terdengar. Menghargai cerita ini merupakan bentuk lain dari cara menghargai pengetahuan lokal.

Lokalitas dan asal usul

Di tingkat desa, tantangan yang dihadapi adalah, ‘Sejauh mana lokalitas pengetahuan lokal?’ Beberapa unsur dalam pengetahuan lokal benar-benar berasal dari daerah setempat dan sebagian lagi diadopsi/diadaptasi dari luar daerah. Kasus yang kami kaji mengidentifikasi dimensi pengetahuan lokal, baik yang unik maupun yang bersifat umum.

Di satu sisi, para mitra telah mengumpulkan berbagai bentuk pengetahuan lokal yang tidak hanya unik dalam setiap budaya atau masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini, namun juga menunjukkan variasi di dalam masyarakat. Di sisi lain, temuan tersebut memiliki beberapa kesamaan dan pola. Melihat dari 10 kasus yang kami kaji, kami dapat menemukan sebuah pola: bahkan pengetahuan yang dianggap spesifik di suatu daerah pun memiliki prinsip dan praktik yang mirip dengan pengetahuan yang terdapat di daerah lain, bahkan di daerah yang memiliki latar belakang sosial budaya yang sangat berbeda. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Cahyadi, 2012) dan penelitian lainnya (Benda-Beckmann et al, 1992; Nikijuluw, 1998) menunjukkan praktik-praktik yang mirip dengan *sasi* di luar kepulauan Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan perikanan pesisiri berdasarkan adat yang terkandung dalam *sasi* juga ditemukan di daerah lain, seperti Sulawesi dan Papua. *Mawah*, yang merupakan mekanisme pembagian keuntungan dan pembagian hasil berbasis masyarakat di Aceh, serta *melesi*, yang merupakan skema jaminan kesehatan masyarakat di Sulawesi Tenggara mengandung prinsip gotong royong yang sama yang juga banyak ditemukan di wilayah lain di Indonesia dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Semua ini membuat kita bertanya tentang apa artinya menjadi 'lokal', dan bagaimana kita menetapkan batasan berdasarkan tempat dan lokasi suatu pengetahuan lokal.

Hanya satu dari kasus yang kami kemukakan (*sasi* di Maluku) yang menyebutkan perkiraan periode yang menunjukkan kapan praktik tersebut mulai dilakukan (yaitu pada tahun 1600-an). Penelitian lain tidak memiliki informasi yang spesifik tentang asal muasal suatu pengetahuan lokal. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menyebutkan bahwa suatu pengetahuan dan praktik diwariskan oleh nenek moyang, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti halnya artefak yang tidak berwujud, misalnya pengetahuan dan praktik vernakular, verifikasi terhadap asal usul yang berkaitan dengan kapan dan dari mana suatu praktik berasal sulit, jika tidak mungkin, untuk

dipastikan. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan kentalnya budaya lisan di Indonesia (Heryanto, 2015) yang sulit dilacak silsilahnya.

Dimensi lain yang membuat asal usul dan keaslian pengetahuan lokal semakin kompleks adalah kenyataan bahwa pengetahuan lokal - seperti halnya semua jenis pengetahuan - bersifat dinamis, karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus berubah. Karena pengetahuan lokal berkembang dari waktu ke waktu, sulit untuk melacak dari mana asalnya, dan kapan mulai muncul, siapa aktor yang terlibat dalam proses pembentukan pengetahuan lokal, dan bahkan sulit untuk memutuskan apakah suatu praktik atau sistem pengetahuan lokal berasal dari daerah setempat, diadopsi dari luar daerah, atau merupakan perpaduan antara komponen lokal dan komponen yang diperkenalkan. Dalam sebagian besar kasus yang dilaporkan oleh para mitra, kemungkinan yang terakhir yang paling besar terjadi.

Sangat lama, masyarakat Aceh mengembangkan dan mempraktikkan 'mawah' di daerah perdesaan sebagai strategi penanggulangan untuk mendapatkan akses terhadap modal. Praktik 'mawah' didasarkan pada modal sosial (hubungan keluarga, saling menjaga, semangat saling membantu, kepercayaan), yang kemudian memfasilitasi akses terhadap modal finansial atau modal sumber daya. Dalam konteks ekonomi, 'mawah' menyatukan pihak-pihak yang memiliki aset yang berlebih namun memiliki tenaga kerja dan waktu yang terbatas, dengan pihak-pihak yang memiliki aset terbatas namun tenaga kerja berlebih. 'Mawah' menggabungkan dua faktor penting dalam kegiatan produksi: pemilik modal kerja ('ureung po atra') dan tenaga kerja ('ureung keurija'/'pubuet' atau 'pemawah'). Dalam kerja sama 'mawah', pemawah biasanya menyumbang fasilitas penunjang pekerjaan, seperti alat-alat pertanian untuk 'mawah' pertanian atau lumbung untuk 'mawah' peternakan. Faktor kerentanan yang dibahas sebelumnya menuntut masyarakat untuk mengadopsi cara-cara baru untuk menghasilkan mata pencaharian atau memodifikasi pendekatan terhadap mata

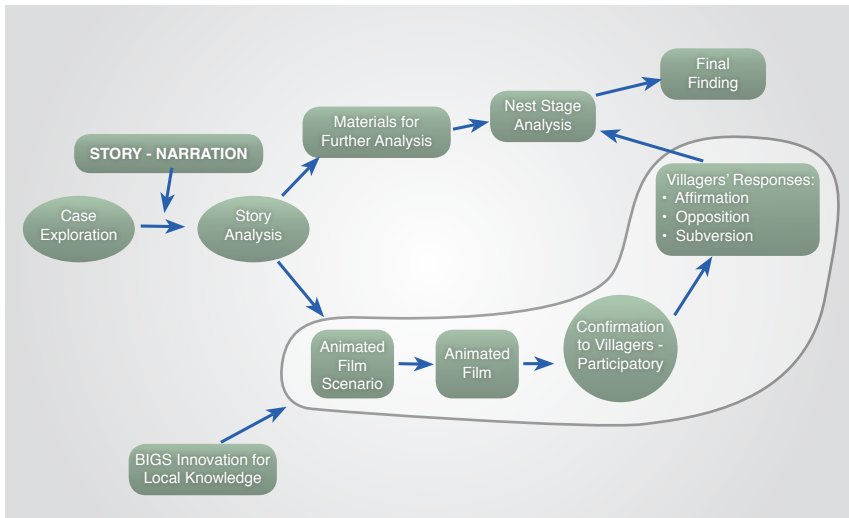
pencaharian sebelumnya. Faktor-faktor tersebut juga mengurangi kesempatan masyarakat yang terlibat dalam 'mawah tradisional' untuk pertanian, perkebunan dan peternakan. Konsep 'mawah' sebagai strategi penanggulangan tradisional di daerah perdesaan diterapkan kembali untuk mata pencaharian baru, dan bahkan diterapkan juga di daerah perkotaan. Masyarakat mulai menerapkan konsep 'mawah' pada praktik usaha modern yang mereka lakukan, seperti mengelola properti atau usaha, antara lain kafe, toko dan tempat pencucian mobil dan motor. Di perusahaan berbentuk kerja sama ini, pemilik modal dan manajer sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha yang mereka lakukan bersama sebagaimana yang berlaku pada 'mawah' tradisional. Dalam 'mawah' modern, masyarakat di perkotaan mulai menggunakan kesepakatan tertulis, atau bahkan notaris. (YKU)

Fakta bahwa pengetahuan lokal digambarkan sebagai hal yang didasarkan pada pengalaman hidup sehari-hari mengandung makna bahwa pengetahuan lokal melekat di tempat fisik yang menjadi tempat tinggal masyarakat, tempat mereka bekerja dan bertindak. Oleh karena itu, para pelaku yang bukan berasal dari daerah tersebut menemui hambatan alami untuk mendokumentasikan dan menerjemahkan pengetahuan lokal. Menurut Relph (1976: 45), tempat memiliki identitas dan makna bagi masyarakat yang tinggal di sana. 'Identitas suatu tempat adalah ekspresi adaptasi yang berasal dari asimilasi, penyesuaian dan sosialisasi antara pengetahuan yang satu dengan yang lain.' Dengan pemahaman ini, konsep tempat berarti hal yang berbeda untuk masyarakat yang berbeda tergantung pada hubungan pribadi mereka dengan tempat tersebut. Peneliti yang berasal dari luar daerah mungkin menampilkan 'sikap yang tidak tulus terhadap tempat', yang berarti tidak melibatkan pemahaman tentang suatu tempat atau makna simbolis, identitas dan nilai-nilainya karena mereka berasal dari luar daerah tersebut (*outsideness*) (Seamon and Sowers, 2008), serta tidak melibatkan pula upaya-upaya untuk mematuhi metodologi penelitian

yang membutuhkan 'sikap objektif'. Tempat malah dipandang sebagai latar belakang untuk suatu aksi, situasi dan lingkungan tempat kegiatan penelitian dilakukan. Sementara para politisi dan pengambil keputusan sering memandang tempat dengan cara seperti ini (suatu tempat merupakan koordinat geografis, angka, data - yang disebut sebagai '*objective outsidersness attitude*' oleh Seamon dan Sowers, 2008), para peneliti pengetahuan lokal yang ingin mendokumentasikan dan menerjemahkan pengetahuan lokal perlu memahami secara mendalam makna, nilai dan identitas yang terkait dengan tempat fisik. Sebagai pengamat yang objektif, peneliti perlu menjalani kehidupan di tempat tersebut (*insideness*) (dikenal sebagai 'pendekatan emis' dalam antropologi). Peneliti yang memiliki hubungan lebih dalam dengan penduduk lokal bisa memiliki empati yang menuntut 'kemauan untuk bersikap terbuka terhadap makna suatu tempat, merasakannya, mengetahui dan menghormati simbol-simbolnya' (Relph, 1976: 54). Dengan cara ini, peneliti dapat mulai mengatasi pembatasan-pembatasan yang dikenakan terhadap mereka sebagai orang yang berasal dari luar daerah tersebut.

Kebutuhan untuk menjadi inovatif sebagai upaya agar dapat mendokumentasikan kearifan lokal mungkin dibutuhkan, sehingga dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan kebijakan. Cerita tentang BIGS dengan pengelolaan hutan di Jawa Tengah merupakan salah satu contoh yang bagus. BIGS berinovasi dengan menyajikan hasil penelitiannya secara visual melalui sebuah film animasi, yang kemudian ditayangkan kepada warga desa. Mensosialisasikan gagasan melalui film ini memberi kesempatan bagi warga desa untuk menanggapi, mengkritisi dan memuji video tersebut. Cara ini juga menghasilkan ide-ide baru dan gagasan lain yang didasarkan dan berkaitan dengan animasi yang ditampilkan. Tanggapan warga desa tidak hanya bermanfaat sebagai validasi dari pihak luar terhadap hasil penelitian, namun juga sebagai bahan untuk menyusun kebijakan. Ide-ide baru dan kisah-kisah lainnya tentang konservasi hutan berbasis budaya yang disampaikan oleh penduduk desa sebenarnya sangat kaya untuk membuat berbagai pilihan

kebijakan untuk konservasi lingkungan berdasarkan pengetahuan lokal, seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Inovasi BIGS untuk pengetahuan lokal

Kondisi politik-ekonomi untuk melahirkan dan mengelola pengetahuan lokal

Mendokumentasikan pengetahuan lokal saja tidak cukup. Yang tidak kalah pentingnya adalah memahami bagaimana pengetahuan tersebut beradaptasi, berkembang dan berubah (atau tidak berubah) seiring berjalannya waktu, bagaimana sumbangan pengetahuan tersebut bagi kesetaraan atau ketidaksetaraan, seberapa inklusif pengetahuan lokal tersebut, siapa yang memperoleh manfaat karena memiliki pengetahuan lokal, dan siapa yang merugi karena tertinggal. Selain itu, dalam hal proses perubahan dari pengetahuan menjadi kebijakan lokal, bagaimana pengetahuan ini dikomunikasikan dan oleh siapa, baik di dalam maupun di luar masyarakat, juga merupakan hal yang sama pentingnya. Hal-hal inilah yang menjadi kerumitan sosial dalam pengetahuan lokal. Dari sudut pandang kritis, pengetahuan lokal berada, tumbuh dan dimiliki

melalui relasi sosial ekonomi, sehingga sifat ‘keadilannya’ dari sudut pandang teori kritik dan inklusi sosial mungkin dipertanyakan. Pada umumnya, pengetahuan lokal yang didokumentasikan dalam penelitian kami dimiliki oleh kaum elit. Kerangka kerja yang dikembangkan oleh FAO (FAO, 2004), yang kami sebutkan di Bab 2 adalah titik awal yang berguna untuk menavigasi data di seluruh studi kasus kami: pengetahuan umum (*common knowledge*) dimiliki oleh sebagian besar masyarakat; pengetahuan bersama (*shared knowledge*) dimiliki oleh banyak orang, namun tidak oleh semua masyarakat sebagai bagian dari pembagian kerja dan peran; dan pengetahuan khusus (*specialised knowledge*) dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pelatihan atau wewenang khusus. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, ‘pengetahuan khusus’ dikuasai oleh beberapa orang yang mungkin memiliki posisi khusus (misalnya, klan yang menguasai sistem air bersih di Kupang), atau ‘pengetahuan umum/bersama’ yang dikuasai oleh banyak orang, namun tidak oleh semua anggota masyarakat (misalnya, penduduk gampong di Aceh yang memelihara ternak akan memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang peternakan secara umum dan sistem *mawah* dibanding dengan mereka yang tidak memiliki ternak). Hanya dua kasus studi (sistem jaminan kesehatan berbasis masyarakat di Sulawesi dan konservasi hutan di Jawa Tengah) yang mengidentifikasi pengetahuan lokal sebagai ‘pengetahuan umum’ yang dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh POLGOV tentang resistensi lokal terhadap pertambangan menunjukkan adanya campuran antara penggunaan pengetahuan khusus dan pengetahuan umum: pengetahuan khusus tentang isu-isu keagamaan (gereja dan masjid), advokasi lingkungan (LSM) dan masyarakat lokal bersatu dalam gerakan perlawanan terhadap proyek-proyek pertambangan.

Potensi ketidakadilan dalam pengetahuan lokal ini memiliki implikasi penting terhadap penelitian dan upaya-upaya pembangunan (FAO, 2004). Untuk mengetahui apa yang diketahui oleh masyarakat, posisi politik-ekonomi dan masyarakat yang tepat harus diidentifikasi, karena memiliki pengetahuan merupakan konsekuensi dari posisi politik

ekonomi yang dimiliki masyarakat. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang penataan sosial ekonomi dalam masyarakat tersebut; dalam beberapa kasus, hal ini tertutup oleh struktur dan tradisi formal. Kadang-kadang kita menarik kesimpulan yang salah apabila kita bekerja dengan informan yang salah - karena pengambilan sampel mengikuti struktur formal atau pekerjaan dalam kerangka kerja yang diberikan. Analisis tentang pengetahuan lokal, dengan mengidentifikasi siapa pemiliknya serta bagaimana mereka mengaktualisasikan dan mengkomunikasikannya, bukanlah tugas yang sederhana; tugas ini memerlukan pengetahuan yang memadai tentang struktur sistem pengetahuan formal dan informal di balik wakil-wakil masyarakat yang diberi wewenang untuk menguasai pengetahuan lokal. Misalnya, di Aceh Besar para pemuda yang menggembala ternak, sehingga mereka mungkin lebih tahu lokasi penggembalaan yang terbaik dibanding ayah mereka atau pemilik ternak. Apabila kita meminta ayah mereka untuk menunjukkan padang rumput yang baik (karena seorang peneliti biasanya akan mendatangi orang-orang tua terlebih dahulu) kemungkinan kita hanya mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Memilih kepala rumah tangga (ayah) sebagai informan adalah contoh pengambilan fakta yang ada di depan mata, karena mengikuti struktur rumah tangga konvensional. Pendekatan pengetahuan ini terkait dengan sistem kepercayaan tentang peran kepala keluarga dalam masyarakat berbasis pertanian dan relasi hubungan kekuasaan dalam rumah tangga di Aceh. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan politik ekonomi tidak hanya akan melihat hal ini dari sudut pandang spesialisasi atau pembagian kerja berdasarkan usia dalam masyarakat, namun dari pemahaman (politik) yang lebih luas tentang sistem pengetahuan dan di mana pengetahuan khusus berada

Pengetahuan lokal tidak dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan, antara tua-muda, dan antara elite dan kaum miskin. Masing-masing kategori ini memiliki pengetahuan yang berbeda dan saling melengkapi. Banyak kasus, seperti sistem pengelolaan air bersih berbasis klan di Kupang, perburuan ikan paus di Lembata dan pengelolaan

perikanan *sasi* di Maluku, yang menunjukkan bahwa individu, garis keturunan atau klan yang ditunjuk berdasarkan budaya dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang tertentu. Cerita dari Aceh Besar tentang revitalisasi asosiasi petani adat adalah salah satu contohnya.

Perempuan memainkan peran yang luar biasa penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga petani di Aceh Besar. Petani perempuan memainkan peran dominan dalam kegiatan yang berhubungan dengan sawah, seperti membuat persemaian, menabur benih, menebarkan pupuk, menanam benih dan menanam padi. Petani perempuan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa air mengalir ke sawah, dan mencegah agar air tidak berlebihan dan mengganggu pertumbuhan padi, sehingga rentan terhadap serangan hama. Untuk menjamin ketersediaan air, perempuan berjaga hingga larut malam untuk mengawasi pasokan air, karena petani lain bisa menutup jalur air atau mungkin ada kebocoran di irigasi, sehingga airnya tidak mengalir hingga ke sawah. Perempuan juga memainkan peran penting dalam menengahi konflik yang berkaitan dengan distribusi air yang terjadi di antara petani. (PKPM Aceh)

Seringkali ada peran untuk masyarakat “non-elit”, seperti perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas untuk mentransmisikan, melestarikan dan menjelaskan pengetahuan lokal secara terperinci. Misalnya, perempuan sering menjadi pengelola atau pengumpul utama sumber daya alam, seperti air minum, atau pengelola sepetak kecil lahan agroforestri atau atau tanaman obat. Mereka juga merupakan pemilik utama pengetahuan tentang sumber daya tersebut. Namun, seringkali mereka tidak hadir dalam peristiwa pengambilan keputusan mengenai distribusi sumber daya bersama ini. Oleh sebab itu perhatian khusus harus diberikan untuk melibatkan perempuan dan kelompok-kelompok lainnya yang kurang terwakili.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk merevitalisasi pengelolaan

sungai di Banjarmasin, LK3 selalu melibatkan kelompok perempuan, bahkan seringkali jumlahnya lebih banyak daripada kelompok laki-laki. Partisipasi perempuan penting untuk memulai beberapa kegiatan, seperti mengajukan usulan dan mengkoordinasikan aksi sosial untuk membersihkan sungai. LK3 menyadari bahwa perempuan seringkali lebih terdampak daripada laki-laki; oleh karena itu melibatkan perempuan di ruang publik dan dalam proses penyusunan kebijakan publik menjadi hal yang sangat penting. Laki-laki tidak mendominasi kehadiran pada acara diskusi publik. Selama acara berlangsung, perempuan bersikap aktif dalam menanggapi narasumber dan dalam menyampaikan isu-isu dari lingkungan mereka. Pada satu acara, peserta perempuan berasal dari berbagai organisasi keagamaan dan sosial di kota Banjarmasin, dan dari tingkat regional dan kota, seperti Muslimat, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan Nasyiatul Aisyiah. Organisasi perempuan lainnya termasuk Badan Koordinasi Organisasi Perempuan, Perempuan Kristen Indonesia, Perempuan Katolik Indonesia, Wandani, WHDI, Aisyiah dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini merupakan bagian dari jaringan LK3 dan mereka selalu terlibat ketika LK3 menyelenggarakan acara. (LK3)

Akses terhadap pengetahuan diatur oleh peraturan dan prosedur yang spesifik secara budaya. Masyarakat sering menganggap jenis pembagian kerja berdasarkan gender dan hierarki sosial ini bukan sebagai masalah relasi kekuasaan, namun sebagai pendekatan budaya, yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi. Penelitian yang kami lakukan mengakui bahwa hal ini menghasilkan pengetahuan, kebutuhan, perhatian, prioritas dan peran yang berbeda dalam masyarakat. Perhatian terhadap keseimbangan gender dan inklusi sosial dalam semua proses pengetahuan lokal sangat penting untuk memahami pengetahuan itu sendiri dan bagaimana pengetahuan tersebut dimanfaatkan untuk tujuan penyusunan kebijakan.

Metode dan instrumen untuk mengkodifikasi informasi dan pengetahuan

Sekarang mari kita lihat bagaimana mitra-mitra kami mengkodifikasi pengetahuan lokal. Hal ini penting karena pengetahuan lokal - sebagai salah satu jenis pengetahuan - perlu dikembangkan dan dikodifikasi agar dapat menjadi bagian dari sektor pengetahuan. Bagaimana hal ini dilakukan akan berdampak terhadap cara pengetahuan tersebut dimanfaatkan. Dengan menggunakan kerangka kerja FAO (Gambar 1), metode dan instrumen untuk mengumpulkan pengetahuan lokal berbeda-beda tergantung pada jenis pengetahuannya. Untuk 'pengetahuan umum' seperti mitos dan tradisi rakyat, metode yang digunakan adalah mendongeng dan analisis aktor utama (sistem *mawah*, *melesi*, mitos dalam konservasi hutan dan sebagainya). Untuk 'pengetahuan bersama', metode yang biasanya digunakan adalah pengamatan terhadap kejadian atau proses penting. Misalnya, dalam sistem perikanan pesisir yang berdasarkan *sasi* di Maluku, PATTIRO mengamati ritual dan proses, dan melakukan analisis terhadap aktor utama yang terlibat dalam peristiwa tersebut serta peran khusus mereka.

Tantangan lain dalam menerapkan 'sasi' muncul karena banyak orang yang berpikir bahwa 'sasi' hanya wajib dilaksanakan oleh masyarakat lokal, dan tidak berlaku untuk 'orang luar' yang diatur oleh peraturan formal (pemerintah). Akibatnya, masyarakat dan kelompok adat berjuang agar 'sasi lomp'a' dapat didukung secara formal sesuai dengan warisan nenek moyang mereka. "Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah beserta Pemerintah Provinsi bermaksud untuk menyusun rancangan, mensosialisasikan dan menerbitkan peraturan daerah tentang 'sasi'. Inilah kesempatan bagi kami untuk memberi masukan, sehingga Raja Haruku terlibat," ujar Haji Abdullah Latarissa, salah seorang pemimpin lokal. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pengetahuan lokal berbasis tradisi dapat dikodifikasi sehingga banyak pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dapat memahaminya. (PATTIRO)

Proses kodifikasi ini sangat penting untuk mengatasi perbedaan pemahaman di antara kelompok masyarakat; manfaat pokok kodifikasi *sasi lomp*a adalah untuk memperkuat kohesi sosial dan melestarikan sumber daya perikanan demi kepentingan masyarakat. Jika proses kodifikasi bersifat partisipatif, masyarakat dapat melihat apakah pemahaman mereka sama dengan masyarakat lainnya. Tahapan ini penting karena pengetahuan lokal tidak dapat dipisahkan dari ‘pemilik’ pengetahuan tersebut. Ada banyak aktor yang berkontribusi terhadap pengetahuan lokal dan kasus-kasus yang kami hadapi menunjukkan keberagaman pencipta dan pengguna pengetahuan.

Lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil: Di Manggarai, lembaga keagamaan mendefinisikan kembali norma-norma sosial dan memperkayanya dengan norma-norma agama, serta menempatkannya agar relevan dengan konteks saat ini. Misalnya, gereja membuat jaringan masyarakat adat di sekitar tambang mangan. Tujuannya adalah untuk merevitalisasi dan mengkonsolidasikan pengetahuan masyarakat dan membangun aliansi strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti AMAN, WALHI dan JATAM. (POLGOV)

Koalisi masyarakat sipil: Upaya terus-menerus dilakukan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil di Banyuwangi guna menyelamatkan ekologi di kawasan Tumpang Pitu dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan emas. Koalisi ini terdiri dari Forum Pembelajaran Lingkungan Banyuwangi, atau Forum Peduli Masyarakat Nelayan Banyuwangi, dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. (POLGOV)

Pemerintah dan para pemangku kepentingan: Penelitian yang kami lakukan melibatkan berbagai mitra, termasuk pemerintah daerah (Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan dan BAPEDAL), perwakilan masyarakat lokal dan masyarakat adat (termasuk Dewan Adat dan Kewang), asosiasi nelayan, dan perusahaan ekstraktif yang beroperasi di Kabupaten Maluku Tengah. (PATTIRO)

Dalam hal pendekatan, terdapat dikotomi mendasar yang dapat diamati pada kesepuluh kasus yang kami kaji ketika mengumpulkan data yang melibatkan aktor yang memiliki pengetahuan lokal. Kelompok pertama menggunakan proses yang merupakan hasil kerja sama antara peneliti akademis dan praktisi profesional; para praktisi tersebut dapat terlibat dalam penelitian atau melaksanakannya sendiri dengan dukungan peneliti profesional. Contoh pendekatan ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan di PUSKA UI tentang adaptasi perubahan iklim yang melibatkan petani di Indramayu, dan di POLGOV UGM tentang advokasi sengketa tanah yang melibatkan masyarakat di Manggarai. Pendekatan tersebut melibatkan aktor-aktor yang menggunakan pengetahuan lokal dan ‘berpihak pada penelitian’ dalam pengumpulan data dan proses analisis.

Prosesnya melibatkan kodifikasi praktik lokal ke dalam kerangka kerja konseptual yang memiliki tiga komponen penting: 1) melakukan penelitian partisipatif (ilmuwan penelitian dan petani lokal); 2) melakukan penelitian berorientasi pada lokasi (ilmuwan penelitian, penyuluh dan petani); dan 3) melakukan validasi terhadap eksperimen petani (petani dan penyulu pertanian). (PUSKA UI)

Melalui sudut pandang ini, para peneliti mengumpulkan dan memvalidasi data di lokasi secara partisipatif, dengan peran aktor yang memiliki pengetahuan lokal terbatas sebagai informan. Dengan demikian, metodologi ini dapat dianggap sebagai pengetahuan hegemonik (Bergold dan Thomas, 2012). Alasannya adalah proses penelitian dimulai dari luar dan berkisar tentang masyarakat (Russo, 2012).²⁹

Pendekatan lain ditemukan pada kelompok kedua yang lebih besar, yang terdiri dari delapan penelitian dan dilakukan secara langsung dengan pemilik pengetahuan lokal. Tujuannya adalah untuk

29 Mengingat mandat akademis yang mereka miliki, agak mengherankan bahwa kedua penelitian tersebut yang menggunakan sudut pandang ini dilakukan oleh Lembaga yang berbasis di perguruan tinggi.

merekonstruksi pengetahuan dan kemampuan mereka dalam proses pemahaman dan pemberdayaan. Kedelapan penelitian ini dilakukan dengan masyarakat yang bersangkutan dan membahas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan dan pertanyaan penelitian tidak dikembangkan berdasarkan perpaduan dua sudut pandang - yaitu sudut pandang sains dan praktik, namun sebagai penelitian tentang pengetahuan lokal dan kontekstualisasi pertanyaan penelitian yang diberikan. Apa yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian lainnya merupakan upaya untuk memahami, mengkomunikasikan dan memberdayakan pengetahuan lokal - upaya yang dilakukan untuk mengatasi sifat pengetahuan lokal yang secara teknis menggunakan berbagai bentuk ekspresi, serta jenis pengetahuan lainnya, khususnya pengetahuan ilmiah.

Pemetaan penyebaran pengetahuan lokal akan membuat kita dapat menganalisis sumber-sumber pengetahuan lokal yang akan mengarah pada analisis relasi kekuasaan. Keberadaan peta aktor dalam sistem *mawah* di Aceh Besar, misalnya, membantu YKU untuk mengidentifikasi struktur kepemilikan lahan dan struktur sosial ekonomi masyarakat.

Secara global, kredit mikro (micro credit) telah menjadi pendekatan yang paling populer untuk mengatasi kemiskinan di daerah perdesaan. Strategi ini juga telah diterapkan oleh pemerintah di Aceh dan beberapa lembaga donor selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-tsunami. Pendekatan ini telah memberikan sumbangan bagi pengembangan sektor keuangan mikro di Aceh dalam 10 tahun terakhir. Namun, pendekatan 'socio-collateral' yang digunakan dalam kredit mikro tidak mengakomodasi konteks sarana bagi mata pencaharian masyarakat miskin di daerah perdesaan, yang bergantung pada hasil pertanian, peternakan dan kelautan, dengan pendapatan yang tidak tetap serta ketidakmampuan untuk membayar angsuran secara rutin dan teratur setiap minggu atau setiap bulan. Orang-orang ini tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan. Penelitian ini menemukan beberapa kasus di daerah penelitian yang

menunjukkan bahwa ketidakmampuan suatu kelompok (pada umumnya orang miskin) untuk membayar angsuran telah menimbulkan konflik dengan kelompok lainnya. Hal ini disebabkan karena 'hukuman' atas kegagalan membayar berdampak pada kelompok secara keseluruhan - tidak ada kelompok yang akan mendapatkan pinjaman lagi, dan gampong tersebut tidak akan menerima dana untuk pembangunan infrastruktur. Akibatnya, kelompok miskin diejek dan tidak lagi terlibat dalam kegiatan keuangan mikro. Dalam beberapa kasus, orang miskin yang telah mengambil kredit mikro dari program yang didanai pemerintah harus mengambil pinjaman berbunga tinggi dari rentenir untuk membayar cicilan kredit mikro, karena pendapatan mereka yang tidak tetap dan tidak teratur. Dengan demikian, alih-alih memberdayakan, program ini sebenarnya menjebak orang-orang miskin dalam siklus hutang dan kemiskinan yang lebih dalam. (YKU)

Sifat sosial ekonomi yang terkandung dalam pengetahuan lokal memerlukan metode pengumpulan data dalam konteks khusus dan pendekatan sampling yang mencerminkan struktur sosial ekonomi di daerah setempat, seperti dalam kasus berikut yang disampaikan oleh POLGOV.

Pengetahuan mulai dikonsolidasikan, disusun dan didokumentasikan dengan cara yang lebih teratur. Pengetahuan lokal telah berubah menjadi pengetahuan terbuka atau pengetahuan umum. Melalui proses yang memiliki agenda, pengetahuan lokal yang telah tersusun dapat ditingkatkan menjadi basis pembuktian untuk isu-isu publik, agenda publik dan agenda kelembagaan. Kesadaran dan pengetahuan kolektif mengarah pada diskusi di media publik, sehingga menjadi isu publik yang dapat berubah menjadi isu kebijakan ketika pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses kebijakan, khususnya aktor formal, mulai memandang isu-isu tersebut sebagai isu publik yang perlu ditangani. Apabila agenda politik tersebut ditampung dan menjadi

bagian dalam proses pembuatan kebijakan formal, maka agenda ini akan menjadi agenda publik: isu publik yang secara umum diakui oleh komunitas politik atau pembuat kebijakan sebagai agenda yang perlu dipertimbangkan dan dikelola melalui otoritas publik terkait. (POLGOV)

Metode dan instrumen untuk mengelola informasi dan pengetahuan

Setelah dikodifikasi, pengetahuan perlu dikelola. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menggunakan dan menyesuaikan praktik agar aset pengetahuan mereka yang ada dapat dimanfaatkan dan budaya berbagi dan belajar dapat dikembangkan. Dalam banyak kasus, pengetahuan lokal yang dikodifikasi tidak memiliki informasi tentang konteks sosial budaya, yaitu situasi yang menempatkan pengetahuan lokal pada tingkat instrumental. Membawa kehidupan sehari-hari suatu masyarakat ke dalam perdebatan tentang konsep yang lebih luas memerlukan ketersediaan metadata pengetahuan yang memadai: pengumpulan data tentang ‘siapa, apa, di mana, kapan dan bagaimana’.

Dalam meneliti sistem *mawah* di Aceh Besar, misalnya, para peneliti menemui kesulitan dalam mengidentifikasi struktur sosial ekonomi yang mendasarinya, yang membuat mekanisme ini berfungsi. Hal ini mengharuskan peneliti untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang struktur aset komunal di Aceh Besar, evolusi pembagian kelas sosial ekonomi di Aceh, dan sebagainya. Singkatnya, tantangan yang dihadapi adalah tentang bagaimana memiliki pengetahuan yang memadai sehingga pengetahuan lokal dapat dipahami. Beberapa tingkat pimpinan masyarakat di Aceh merupakan tokoh penting dalam penggalan pengetahuan lokal. Mereka juga bertindak sebagai perantara yang dapat mengkomunikasikan pengetahuan lokal kepada pemerintah.

Akibatnya, ketika ditampilkan tanpa konteks lokal dan budaya yang menjadi latar belakang pengumpulan pengetahuan tersebut, pengamatan dan pengetahuan lokal dapat kehilangan nilainya, sedangkan kemungkinan yang terburuk adalah pengetahuan lokal tersebut

menyesatkan. Misalnya, sistem jaminan kesehatan masyarakat yang didokumentasikan oleh LAHA di Sulawesi Tenggara dapat diterapkan, karena adanya konteks budaya *melesi*, yaitu praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan masalah kemiskinan/harta bersama. *Melesi* adalah konteks yang menjadi tempat keberadaan sistem jaminan kesehatan. Ketika LAHA melakukan advokasi untuk memperluas sistem jaminan kesehatan ini, masalah pengelolaan pengetahuan menghambat upaya ini. Data yang dibawa ke tingkat kabupaten sebagai dasar untuk membuat peraturan daerah tentang jaminan kesehatan mengandung risiko yang tinggi atas hilangnya informasi kontekstual yang sesuai akibat kurangnya informasi terperinci tentang asal-usulnya, bagaimana pengumpulannya, batasan penggunaannya, spesifikasi terperinci untuk format data, dan pengaturan data. Untuk meningkatkan representasi data yang lebih lengkap, dan untuk memastikan bahwa data mudah ditemukan, akses terhadap data tersebut serta penyimpanan data dan metadata (selengkap mungkin) harus dikumpulkan. Beberapa komponen metadata ini mungkin lebih dikenal daripada yang lain.

Untuk mendukung terselenggaranya jaminan kesehatan ‘melesi’ di Sulawesi Tenggara, kami mewawancarai kepala desa terkait dan jaringan potensial melalui diskusi kelompok terarah dengan masyarakat di empat desa. Data yang terkumpul adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Keterbatasan yang dapat diidentifikasi sejak awal program adalah kurangnya dukungan pemerintah. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program bertepatan dengan pemilihan bupati Konawe Selatan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa program tersebut merupakan bagian dari proses politik. (LAHA)

Untuk memastikan bahwa data bermanfaat bagi masyarakat lokal dan pembuat kebijakan, informasi kontekstual harus dikumpulkan bersama dengan data itu sendiri demi kekuatan kodifikasi. Bagi pemilik pengetahuan dan penyedia data (yang mungkin saja orangnya sama), hal

ini dapat berarti suatu upaya yang besar, namun mereka yang paling akrab dengan konten dan konteksnya harus menyusun informasi ini. Melalui proses yang menggambarkan bentuk pengamatan dan pengetahuan lokal yang terdokumentasi dengan menggunakan metadata, penyedia data membantu memastikan bahwa data yang diberikan dapat dipahami, dikelola dan didistribusikan dengan tepat, disertai informasi kontekstual yang sebanyak mungkin. Pengetahuan lokal memberi makna pada fenomena sosial.

Tantangan pertama dalam memproses pengetahuan lokal pada umumnya berhubungan dengan ruang dan maknanya, bahwa pengetahuan lokal pada umumnya tersembunyi, dipahami tanpa diucapkan, dan tidak aktif di dalam masyarakat (Campbell dan Marshall, 2000). Peneliti seringkali tidak percaya diri dalam menentukan informan, tindakan dan situasi yang tepat yang akan mengarahkan mereka ke informasi penting. Studi yang dilakukan oleh BIGS menyoroti peran mitos dalam konservasi hutan di Jawa Tengah dan melaporkan bahwa mereka harus mengubah deskripsi tentang mitos karena berbagai informan tidak memberikan informasi yang konsisten tentang keberadaan mitos di masyarakat: apa, kapan, di mana, siapa dan mengapa mitos ada di masyarakat.

Di lapangan, peneliti perlu beradaptasi agar menjadi bagian dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi, karena pada awalnya masyarakat tidak akan bersikap terbuka. Peneliti perlu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemikiran dan perasaan yang sama dengan masyarakat, agar mereka bersedia memberikan informasi. Misalnya, ketika orang luar bertanya apakah ada mitos di desa, penduduk desa tidak akan mengungkapkan informasi itu. Namun, karena peneliti lapangan kami adalah organisator lokal yang tidak hanya mengerti, tapi juga melindungi budaya lokal di lokasi penelitian, maka informasi tentang 'mitos' dibagikan. (BIGS)

Tantangan kedua berhubungan dengan keragaman bahasa dan aspek

linguistik. Hal ini bukan hanya soal komunikasi dan interpretasi. Masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki nomenklatur dan taksonomi yang khas sehubungan dengan keanekaragaman hayati; leksikon ini secara teknis seringkali sulit untuk digunakan dalam pembicaraan tentang pengamatan, petunjuk dan bukti (Thaman et al, 2013). Pengetahuan tentang iklim di Indramayu, Jawa Barat, tertanam dalam konsep masyarakat adat dan masyarakat lokal. Konsep ini tidak dapat dipahami atau disampaikan dengan tepat melalui terjemahan sederhana ke dalam konsep ilmiah. Penelitian dari lokasi lain melaporkan adanya tantangan serupa.

Peran lain yang dimainkan oleh masyarakat sipil adalah menerjemahkan pengetahuan lokal ke dalam bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembuat kebijakan, termasuk mendukung terciptanya ruang dialog agar masyarakat lokal dapat mendapatkan kembali kendali atas ruang dan sumber daya alam mereka. Masyarakat sipil memiliki kewajiban untuk memperkenalkan pengetahuan lokal sehingga pembuat kebijakan dapat memahaminya. Ini bukan tugas yang mudah. Sejumlah metodologi ilmiah, seperti pemetaan, etnografi partisipatif, studi partisipatif tentang perdesaan, 'barefoot engineering', 'barefoot observation' dan fenomena rekaman ('recording phenomena') melalui bahasa lokal adalah metode yang digunakan secara umum oleh masyarakat sipil untuk mengkomunikasikan pengetahuan lokal kepada pihak luar, khususnya kepada para pembuat kebijakan. (Pikul)

Dalam praktiknya, upaya untuk beradaptasi dengan budaya masyarakat dapat dilakukan dengan mengenakan pakaian yang sama, berbicara/menggunakan bahasa yang sama dan menghormati budaya masyarakat lokal. Karena peneliti kami memahami budaya lokal, mereka dengan mudah menyesuaikan pendekatan penelitian mereka (dalam hal bahasa, pakaian atau cara untuk menghubungi informan). Mereka menggunakan visualisasi sebagai alat untuk mengumpulkan pengetahuan dari

warga desa. BIGS membuat film animasi berdasarkan temuan penelitian mereka. Film ini dipertontonkan kepada masyarakat untuk mendapatkan, antara lain, masukan mereka tentang kesahihannya. Visualisasi telah terbukti menstimulasi kegembiraan masyarakat sehingga mereka bersedia untuk segi memberikan pendapat dan masukan. (BIGS)

Tantangan ketiga berkaitan dengan fakta bahwa pengetahuan juga tercakup dalam bidang-bidang yang ‘berbasis nilai’, seperti moralitas dan spiritualitas. Tantangan ini membuat mitra dari luar berada situasi yang sulit. Misalnya, dalam kasus perburuan ikan paus di Lembata, nelayan berhadapan dengan pertentangan antara tradisi berburu ikan paus sebagai mata pencaharian, dan gerakan konservasi laut yang muncul, yang keduanya mereka anggap penting.

Ada dua perdebatan penting sehubungan dengan tradisi perburuan ikan paus dengan industri pariwisata. Pertama adalah konflik antara kepentingan perburuan ikan paus dan konservasi budaya. Sebagian orang menganggap pelestarian budaya perburuan ikan paus sangat penting, karena tradisi ini tidak bersifat komersial. Perburuan paus dilakukan untuk semua orang di Lembata, tidak hanya untuk individu tertentu. “Kami tidak mengabaikan lingkungan, namun budaya juga perlu dikembangkan,” kata mereka. Perburuan paus di desa Lamalera merupakan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Meskipun mendapat kritikan dari para pemerhati lingkungan, masyarakat memandang budayanya sebagai suatu kewajiban, karena seluruh dimensi sosial dan budaya masyarakat Lembata diabadikan dalam tradisi berburu paus ini. Menghilangkan praktik budaya ini sama saja dengan menghancurkan tradisi sosial ekonomi masyarakat Lembata. Gagasan tentang konservasi ikan paus di kalangan masyarakat Lamalera adalah ‘sesuatu yang asing’, sedangkan konservasi budaya adalah ‘pengetahuan lokal’.

Perdebatan kedua menyangkut persaingan antara nilai-nilai tradisional bersama dan bersifat nonkomersial dengan logika pariwisata berorientasi pasar. Kebijakan pemerintah tentang pariwisata di Lamalera dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional masyarakat. Tradisi yang relatif bebas dari konflik dalam pendistribusian hasil-hasil perburuan berbeda dengan pendistribusian ‘uang’ yang berasal dari industri pariwisata. Masyarakat telah belajar untuk menjadi komersial ketika berurusan dengan industri pariwisata. Misalnya, berdasarkan diskusi dengan masyarakat adat pada tahun 2015, pengunjung yang membawa kamera video dikenakan biaya sebesar Rp 3 juta (US \$ 225), dan pengunjung yang membawa kamera dikenakan Rp 150.000 (US \$ 11). Mereka yang melihat kegiatan menangkap ikan, bahkan sekilas, akan dikenakan biaya sebesar Rp 150.000 (USD \$ 11). Masalahnya terletak pada sistem distribusi, karena struktur distribusi tradisional tidak berlaku dalam sistem yang berhubungan dengan uang (Poros Photo)

Dari segi posisi dan peran pengetahuan lokal, perdebatan ini menunjukkan kerentanan pengetahuan lokal saat berhadapan dengan pengetahuan dari luar atau logika ekonomi. Banyak orang yang telah mengkodifikasi pengetahuan lokal tentang tradisi ini, namun tantangannya terletak pada proses selanjutnya, yaitu bagaimana orang dapat terlibat dalam dialog dari sudut pandang yang berbeda (misalnya konservasi paus), dan juga instrumen pasar seperti industri pariwisata. Dalam kasus ini, masyarakat mungkin membutuhkan ‘penengah’ untuk menjembatani dialog dan proses adaptasi.

Kesimpulan

Mitra-mitra kami mengidentifikasi lima hal yang bisa “mengguncang” kegunaan dan kelestarian pengetahuan lokal berdasarkan kerangka kerja yang diperkenalkan oleh Blaikie, sebagaimana dikutip FAO (tidak ada tanggal):

1. Daerah-daerah dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat,

diringi dengan pengurangan sumber daya yang disebabkan oleh tekanan eksternal, mungkin memerlukan adaptasi terhadap teknologi baru untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi mata pencaharian. Adaptasi perubahan iklim di Indramayu dan sistem perikanan pesisir berdasarkan *sasi* di Maluku adalah contoh tantangan yang tercipta karena cepatnya perubahan yang terjadi di bidang sosial ekonomi dan lingkungan. Adaptasi ini membuat masyarakat harus mempelajari keterampilan baru dengan cepat. Dalam situasi ini, pengetahuan lokal harus berkembang, dan beradaptasi dengan sangat cepat pula, untuk menanggapi tantangan tersebut.

2. Studi yang dilakukan oleh POLGOV tentang masyarakat lokal dan pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang dilakukan oleh LK3 tentang masyarakat berbasis sungai di Kalimantan Selatan menyoroti keadaan yang menunjukkan bahwa pesatnya perpindahan penduduk ke wilayah tertentu berarti bahwa kumpulan pengetahuan untuk produksi pertanian dan ternak serta konservasi lingkungan tidak sejalan dengan kondisi lingkungan, peluang dan kendala baru. Struktur sosial ekonomi yang menciptakan pengetahuan ini menghadapi perpecahan dan penambahan yang kontradiktif saat pendatang baru tiba. Program perpindahan penduduk yang diperkenalkan oleh pemerintah kota Banjarmasin merupakan salah satu contoh yang mencerminkan keadaan ini. Orang menemukan dirinya dalam situasi baru, yang membuat pengetahuan lokal yang mereka ketahui tidak lagi sesuai. Jenis guncangan ini dapat menyebabkan lenyapnya pengetahuan lokal yang ada (baik dalam masyarakat lama maupun masyarakat baru).
3. Bencana dan peristiwa ekstrem lainnya menyebabkan terputusnya keterkaitan dengan pengetahuan lokal, baik secara material maupun budaya. Hal ini sering menyebabkan guncangan pada sistem pengetahuan. Kasus semacam itu bersifat oportunistik dan membatasi. Contoh yang relevan adalah dua studi kasus di Aceh (YKU dan PKPM) yang keberadaan sistem pengetahuannya terancam

karena banyak orang yang memiliki pengetahuan hilang dalam tsunami tahun 2004; Pada saat yang sama, peristiwa ini juga menjadi pemicu revitalisasi dan pengenalan berbagai inisiatif berbasis masyarakat, yang sering diperkenalkan oleh mitra pembangunan internasional.

4. Proses perubahan lingkungan yang berjalan lambat juga terjadi, misalnya perubahan iklim, deforestasi yang meluas atau degradasi lahan, yang menantang ketahanan dan kemampuan sistem pengetahuan lokal untuk beradaptasi. Program adaptasi terhadap perubahan iklim bagi petani di Indramayu, masyarakat berbasis sungai di Kalimantan Selatan, konservasi hutan di Jawa Tengah, eksploitasi pertambangan di Flores dan pengelolaan air bersih di Kupang, Nusa Tenggara Timur, adalah contoh-contoh adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dalam situasi tersebut, proses inovasi dan adaptasi harus dilakukan untuk menyesuaikan sistem dengan tantangan yang muncul. Ini adalah contoh yang menunjukkan bagaimana masyarakat setempat dapat menyesuaikan praktik dan pengetahuan mereka terhadap perubahan lingkungan; Seringkali hasilnya adalah keragaman yang lebih besar karena proses adaptasi sangat kontekstual dan merupakan proses evaluasi bersama, disertai dengan perubahan lingkungan fisik dan sosial.
5. Komersialisasi dan guncangan ekonomi yang cepat juga dapat merusak pengetahuan lokal. Kasus perburuan paus di Lembata, Nusa Tenggara Timur dan perikanan pesisir di Maluku menegaskan adanya pengaruh komersialisasi yang berlangsung dengan cepat serta guncangan ekonomi terhadap pengetahuan lokal, yang menimbulkan ketegangan antara kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan pengusaha.

Potensi ketidakadilan dalam pengetahuan lokal ini memiliki implikasi penting terhadap metodologi penelitian dan pemanfaatannya untuk pembangunan, termasuk penyusunan kebijakan (lihat halaman 86). Akses terhadap pengetahuan diatur oleh peraturan dan prosedur budaya yang tidak kebal terhadap ancaman ketidaksetaraan. Perhatian terhadap

kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam semua proses yang berkaitan dengan pengetahuan lokal sangat penting untuk memahami pengetahuan itu sendiri, dan bagaimana menggunakannya untuk menyusun kebijakan.

Semua aspek ini memberikan tantangan terhadap sistem pengetahuan lokal, termasuk metodologi untuk mendokumentasikan dan memprosesnya. Namun, dampaknya tidak hanya negatif. Inovasi petani di Indramayu dalam agrometeorologi, dan sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat di Sulawesi Tenggara adalah contoh keberhasilan adaptasi dan inovasi yang disebabkan oleh adanya tantangan eksternal. Tantangan yang dijelaskan sebelumnya akan berujung pada adaptasi. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan keragaman jenis pengetahuan dan aktor yang memilikinya. Pelajaran yang paling penting dari tantangan ini adalah bahwa keberadaan pengetahuan yang memadai tentang konteks yang lebih luas harus dipertimbangkan saat mencoba memahami pengetahuan lokal yang ada. Memahami konteks sosial budaya dan lingkungan yang lebih luas sangat penting untuk memberi makna tentang orang-orang yang memiliki pengetahuan lokal, atau keterampilan, acara, upacara dan perilaku di daerah tersebut.

Memanfaatkan pengetahuan lokal dalam penyusunan kebijakan

Kebijakan yang diterapkan seringkali bukan merupakan kebijakan terbaik yang direkomendasikan menurut bukti-bukti teknis, bahkan bukan pula kebijakan yang terbaik kedua. Kebijakan dibuat tidak hanya berdasarkan bukti teknis, namun juga di bawah pengaruh kekuatan nonteknis, seperti tekanan publik dan politik. Sebagaimana dibahas pada Bab 2, kebijakan harus diterapkan dalam masyarakat yang bagaimanapun harus menyesuaikan kepentingan berbagai tekanan dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan khusus. Pengaruh faktor nonteknis ini, baik di negara berkembang maupun negara maju berperan penting, dan sifatnya agak kurang transparan dan tidak sistematis. Latar belakang faktor-faktor teknis dan non-teknis yang berpengaruh ini menciptakan hambatan dan sekaligus kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan dalam penyusunan kebijakan.

Bagaimana pengetahuan lokal dikomunikasikan?

Pengetahuan lokal jauh lebih rumit dan beragam dibanding pengetahuan ilmiah. Pengetahuan lokal bisa tidak diungkapkan secara langsung, bisa juga bersifat eksplisit, bisa dimiliki oleh perorangan maupun kolektif, sehingga lebih sulit untuk dikomunikasikan dalam proses penyusunan kebijakan yang bersifat legalistik formal. Fitur ini menentukan cara mitra peneliti mengkomunikasikan pengetahuan lokal untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Strategi pertama yang dilakukan oleh para mitra dalam mengkomunikasikan pengetahuan lokal adalah melalui proses

‘reproduksi pengetahuan lokal’, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkodifikasi berbagai jenis dan ungkapan pengetahuan lokal menjadi produk nyata yang ‘ramah komunikasi’. Hasil ini kemudian diberikan kepada berbagai pengguna akhir, di antaranya masyarakat setempat, ilmuwan, pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Masing-masing kelompok pengguna ini mungkin memiliki tingkat akses yang berbeda dan membutuhkan informasi dalam bentuk yang berbeda.

Pemanfaatan pengetahuan lokal bergantung pada jenis produk pengetahuan dan kumpulan data yang terdokumentas. Kumpulan data dan produk pengetahuan lokal beragam: tabel pengamatan, karya seni (grafis, musik dan pahatan), foto, koran lokal, kamus lokal dan materi linguistik lainnya, data stasiun cuaca lokal, peta dan transkrip rekaman. Terlepas dari keragaman ini, seperti yang dilaporkan oleh mitra, sebagian besar pengetahuan lokal yang dimanfaatkan terdapat dalam bentuk teks, artikel dan media audio visual, karena yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat dan pemerintah/pembuat kebijakan.

Dalam studi tentang pengelolaan air bersih di Timor, kami mencatat bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman dan dialog antar masyarakat (antara klan yang berbeda), dan antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. Isu-isu yang menonjol meliputi pengaturan pengelolaan air secara kolektif, mekanisme resolusi konflik dan pengakuan minimum terhadap hak atas pengelolaan, manajemen berjenjang, pengetahuan tentang sejarah sumber air, dan penerapan struktur pengelolaan sumber daya air. Di dalam isu-isu ini ada tantangan untuk melibatkan lembaga lain untuk melakukan penilaian kolaboratif dan kolektif, serta untuk mengubah paradigma para pengambil keputusan agar memahami dan menerima bahwa pengetahuan lokal tentang pengelolaan air bersih berbasis masyarakat mengandung berbagai nilai, norma dan keyakinan positif yang menjaga keberlanjutan pengelolaan air bersih, baik di hulu maupun di hilir. (Pikul)

Strategi komunikasi yang dijalankan oleh mitra-mitra yang dijelaskan dalam laporan mencakup beragam media, bahasa, forum dan proses komunikasi untuk memaksimalkan partisipasi dan pembelajaran dari dan oleh pemilik pengetahuan tradisional dan pengetahuan lokal. PKPM di Aceh menyebutkan bahwa kegiatan dengar pendapat publik yang pertama kali dilaksanakan untuk advokasi kebijakan dengan pemerintah daerah dikendalikan dengan menggunakan penggunaan bahasa formal, yang mencakup istilah teknis dan pola komunikasi tertentu.

Kami secara intensif menciptakan pendekatan pribadi dan kelembagaan dengan pembuat kebijakan dan meyakinkan mereka bahwa apa yang sedang diperjuangkan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang lebih penting dan memiliki nilai tambah dalam proses ini adalah kekuatan ikatan emosional. Ikatan emosional ini menghancurkan jajaran birokrasi yang kadang-kadang mempersulit diskusi. Pendekatan informal dalam situasi tertentu akan mempermudah proses penyusunan kebijakan. Beberapa upaya komunikasi yang kami lakukan dengan lembaga terkait dan DPRD tingkat Kabupaten telah membuahkan hasil. DPRD tingkat kabupaten sangat mendukung upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal tentang persawahan ke dalam kebijakan daerah. (PKPM Aceh)

Melalui format ini, mereka mengetahui bahwa jajaran birokrasi tidak memahami bahasa informal yang digunakan sehari-hari oleh orang awam yang memiliki pengetahuan lokal. Sebaliknya, bahasa informal menciptakan gangguan komunikasi dalam proses konsultasi kebijakan yang membuat orang-orang dengan status sosial yang lebih tinggi menggunakan pendapat para pakar untuk menandingi pengetahuan lokal dan pendapat masyarakat setempat. Distorsi komunikasi ini menyebabkan pengetahuan lokal sering tersingkirkan. Banyak kelompok masyarakat yang menahan diri, karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengekspresikan pengetahuan mereka sendiri di hadapan para pakar yang terkadang mengolok-olok pengetahuan lokal.

Untuk mengatasi hal ini, PKPM mengubah format dan tata cara pertemuan, sedangkan fasilitator masyarakat memainkan peran lebih besar dalam memfasilitasi dialog.

Dalam struktur politik yang kurang mendukung, pendekatan pribadi dan komunikasi individu adalah dua kunci penting agar berhasil memengaruhi kebijakan. Bukti-bukti penelitian yang bermutu tinggi tidak cukup untuk mempengaruhi kebijakan. Harus ada dinamika yang berperan dalam struktur politik. Bahkan dalam konteks lokal, hal ini menjadi pelajaran penting dalam memengaruhi kebijakan. Aktor kebijakan dapat mendukung hasil penelitian ini dan menjadi aktor penting dalam pandangan kami. Kami melakukan pendekatan secara teratur kepada ketua DPRD Aceh Besar, wakil bupati, dan beberapa direktur serta staf kantor terkait. Melalui hubungan individu yang akrab, para aktor kebijakan ini mengemukakan isu-isu di forum yang melibatkan mereka, termasuk dalam diskusi tentang program antara lembaga eksekutif dan legislatif. (PKPM Aceh)

Dalam hal advokasi kebijakan, para mitra menyebutkan penyelenggaraan dengar pendapat publik sebagai alat untuk memasukkan pengetahuan lokal ke dalam proses perencanaan pemerintah. Meskipun saluran yang digunakan untuk mendekati pemerintah berbeda-beda di berbagai wilayah (misalnya di Aceh dengan Bappeda, di Sulawesi Tenggara melalui Biro Hukum, dan di Kendal, Jawa Tengah, melalui DPRD), pendekatan yang membingkai pengetahuan lokal sama, yaitu 'sentimen lokal'. Sentimen lokal ini menyimpan kearifan lokal dalam budaya politik otonomi daerah yang sering menghormati masyarakat lokal.

Pendekatan lain yang dilakukan oleh mitra lokal untuk berkomunikasi dengan pembuat kebijakan agar mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam kebijakan adalah dengan menekankan bahwa pengetahuan lokal tidak hanya membingkai batas-batas dan peluang kebijakan lokal, namun juga membentuk interpretasi tentang legitimasi kebijakan. Namun

demikian, pendekatan ini memiliki kendala struktural dan administratif untuk mendorong pemanfaatan pengetahuan lokal dalam memutuskan suatu kebijakan. Kendala ini mencakup prosedur formal untuk mekanisme penyusunan kebijakan, masalah representasi dan prosedur penganggaran, seperti dalam kasus berikut yang dilaporkan oleh YKU di Aceh.

Perubahan yang menguntungkan bagi orang-orang yang menyumbang tenaga untuk kegiatan pembangunan ekonomi dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro 'Beng Mawah'. Perubahan tersebut diprakarsai oleh penggiat dari organisasi masyarakat sipil di Aceh. Lembaga Keuangan Mikro Beng Mawah menyediakan akses terhadap modal bagi para anggotanya untuk memulai usaha di bidang pertanian atau industri rumah tangga. Pinjaman modal diberikan tanpa agunan, dengan pembagian keuntungan sebesar 70:30, lebih tinggi daripada pembagian keuntungan yang umumnya berlaku, yaitu 50:50. Lembaga Keuangan Mikro Beng Mawah telah mendistribusikan dana sekitar Rp 333 juta (US \$ 25.000) kepada 45 anggotanya. Meskipun terus berkembang, lembaga ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan modal, yang berarti bahwa masyarakat harus menunggu lebih dari satu siklus simpan pinjam (satu tahun) untuk mengajukan kredit. Selain itu, skala usaha yang terbatas menyebabkan pendapatan lembaga terbatas, dan tidak mampu membayar staf secara profesional. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh perlu mendorong pemerintah gampong untuk menyusun peraturan gampong guna memastikan bahwa pembagian keuntungan bersifat profesional, jujur, adil dan sesuai dengan hukum syari'ah Islam. (YKU)

Isu lain yang didokumentasikan oleh mitra penelitian adalah motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik. Lembaga mitra melaporkan bahwa masyarakat baru bertindak ketika mereka merasa bahwa posisi mereka terancam karena adanya kebijakan publik. Hal ini menjelaskan mengapa pengetahuan lokal

tentang pengelolaan ekosistem air berkelanjutan di Torong Besi, Nusa Tenggara Timur, menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menanggapi kebijakan pemerintah yang mengizinkan kegiatan penambangan di kawasan mata pencaharian mereka. Masyarakat di Torong Besi kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah (dikenal sebagai musrenbang), karena forum tersebut tidak mencerminkan pengetahuan lokal, dan dalam beberapa kasus bahkan bertentangan dengan kondisi setempat. Di dalam sistem perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up*, seperti musrenbang, aspirasi masyarakat setempat pada tingkat yang lebih tinggi seringkali tidak terlihat, sehingga muncul pertanyaan: praktik partisipatif mana yang paling efektif untuk menjaring pengetahuan lokal dan mengintegrasikannya ke dalam rencana? Kasus yang diperoleh dari BIGS di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dapat memberikan kontribusi normatif terhadap perencanaan lingkungan dan pembangunan, dan terhadap peningkatan demokrasi prosedural. Hal ini disebabkan oleh penggabungan pendapat-pendapat yang sebelumnya tidak dianggap dan terpinggirkan ke dalam penelitian teknis dan proses pengambilan keputusan, khususnya dalam proses pembuatan keputusan yang bersifat teknokratik yang cenderung membuat para pakar mengabaikan masyarakat.

Yang menjadi pusat perhatian adalah sejarah sosial dan budaya masyarakat Kendal. Bentuknya merupakan peringatan ulang tahun Kabupaten Kendal dan festival seni. Nilai-nilai tradisional, termasuk penghargaan terhadap alam dan upacara belum tersimpan; menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hal ini disebabkan karena tidak adanya mitra lokal yang dapat diajak bekerja sama dan menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk mempromosikan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meminta agar tim BIGS di Kendal mendirikan sebuah lembaga adat. Lembaga ini akan dijadikan sebagai mitra. Tahun berikutnya, lembaga ini akan menerima dana dalam bentuk dukungan untuk kegiatan budaya.

BIGS memandang hal ini sebagai kesempatan yang menjanjikan untuk meningkatkan advokasi pelestarian hutan berbasis budaya dan kelembagaan di Kabupaten Kendal. (BIGS)

Dalam mengkomunikasikan pengamatan yang dilakukan dan pengetahuan lokal, para mitra menunjukkan pemahaman yang sama, yaitu bahwa mereka perlu melampaui 'eksotisme' kearifan lokal hingga meraih manfaatnya dalam mengelola kehidupan masyarakat. Apabila hanya semata-mata mencoba untuk menangkap hasil pengamatan dan pengetahuan lokal serta mempublikasikannya, maka pengetahuan lokal mungkin tidak dapat dijelaskan secara memadai, dan bahkan hal ini akan mengarah pada 'komodifikasi' pengetahuan lokal, seperti pengalaman berikut ini yang disampaikan oleh PUSKA UI:

Menuangkan argumen ilmiah, temuan dan bukti ke dalam sebuah naskah kebijakan untuk mengembangkan pembelajaran di antara para pembuat kebijakan tidaklah mudah. Tanpa dukungan yang kuat dari para pakar agrometeorologi berupa argumen ilmiah dan temuan tentang perubahan iklim serta implikasinya terhadap pertanian, dan kenyataan yang ditunjukkan oleh petani itu sendiri, mustahil untuk meyakinkan pembuat kebijakan tentang pentingnya mengenalkan warung lapangan ilmiah (science field shop). Perubahan iklim bukanlah subjek yang dapat dinegosiasikan. Perubahan iklim adalah kenyataan, namun berada di luar pemahaman masyarakat awam, tanpa alih pengetahuan dan layanan iklim yang diberikan oleh ilmuwan dan pihak yang bertanggung jawab (misalnya, Badan Nasional Meteorologi, Klimatologi dan Geo-Fisika). Bagi pembuat kebijakan, bersikap fleksibel dengan cara menyesuaikan kebijakan dalam keadaan yang muncul secara tiba-tiba, tidak terduga atau tidak biasa bukanlah bagian dari 'habitus'. Pertanyaannya adalah sejauh mana 'tata kelola yang responsif dan fleksibel' telah menjadi bagian dari budaya birokrasi untuk menanggapi fenomena yang muncul seperti perubahan iklim, yang telah berdampak pada lingkungan dan mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu,

kami menyadari bahwa menerjemahkan fenomena yang kompleks ke dalam bahasa yang dipahami oleh pembuat kebijakan merupakan masalah yang mendesak. Sekali lagi, hasil kerja para pakar agrometeorologi sangat penting, dan kerja sama antara disiplin ilmu harus dilakukan. Menerjemahkan penjelasan ilmiah ke dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami dan disajikan secara naratif juga merupakan pekerjaan yang sangat menuntut, yang membutuhkan pengalaman dan pembelajaran dalam waktu yang lama.

Tantangan yang dihadapi oleh peneliti terkait dengan pengetahuan lokal adalah bagaimana mengkomunikasikan temuan penelitian secara efektif kepada pembuat kebijakan. Warung Ilmiah Lapangan tidak hanya memberikan solusi praktis kepada petani, namun juga menjadi penengah antara pihak-pihak yang terkait dari berbagai tingkatan dalam sistem. Misalnya, Warung Ilmiah Lapangan perlu meyakinkan pemerintah dan pembuat kebijakan bahwa menyediakan layanan iklim dan layanan lainnya kepada petani dengan cara yang tepat dan tepat waktu membuat mereka mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. PUSKA UI, bekerja sama dengan Klub Pengukur Curah Hujan Indramayu, mengadakan lokakarya dan mengkomunikasikan Warung Ilmiah Lapangan kepada pemerintah daerah. Komunikasi ini bisa dilakukan melalui radio masyarakat, media sosial, video atau naskah kebijakan. Kegiatan ini memperkuat jaringan dan melibatkan pembuat kebijakan. Petani dapat mengantisipasi dan melakukan beberapa perubahan, namun menyusun kebijakan dan memengaruhi kebijakan tidak dapat mereka lakukan sendiri. Mereka memerlukan bantuan untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan dan memengaruhi pemerintah.

Kami [PUSKA UI] memprakarsai gerakan peningkatan dan sosialisasi Warung Ilmiah Lapangan serta pembelajaran tentang agrometeorologi melalui siaran radio masyarakat di desa Nunuk, Indramayu. Kami meneruskan kegiatan ini dengan memulai siaran

baru di wilayah barat laut Indramayu. Di Lombok Timur, para petani sudah memiliki tradisi untuk melakukan pertemuan di sebuah pondok terbuka yang disebut Berugaq. Alih pengetahuan dari petani ke petani telah terjadi sejak terbentuknya Klub Pengukur Curah Hujan Indramayu melalui jaringan komunikasi perdesaan. Selain alih pengetahuan tentang perdesaan dan teknologi komunikasi yang dikembangkan dalam enam bulan terakhir, kami juga memprakarsai pembuatan akun media sosial dan produksi video. Petani juga menggunakan Facebook dan Instagram, yang membuat petani-petani lainnya dan masyarakat umum dapat mengakses skenario tentang musim, serta berita dan kegiatan di seputar pembelajaran agrometeorologi. PUSKA akan membuat rencana editorial bulanan, yang dapat diakses oleh PUSKA dan Sirius Labs (sebuah organisasi informasi dan media sosial dari Amerika Serikat). Nantinya, Sirius Labs akan mengunggah foto, artikel dan skenario tentang musim sesuai dengan rencana editorial di Facebook dan Instagram. (PUSKA UI)

Menetapkan pengetahuan lokal sebagai ‘praktik yang baik’ tanpa konteks menimbulkan risiko hilangnya informasi sosial dan budaya yang penting tentang asal-usul pengetahuan, bagaimana data diciptakan, dan penggunaan data yang sesuai dan dapat diterima. Contoh yang bagus adalah penelitian yang dilakukan oleh Poros Photo tentang tradisi perburuan paus di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Mereka mencoba mengkomunikasikan pesan bahwa tradisi ini merupakan bagian penting dalam cara hidup masyarakat dan cara pandang dunia mereka. Menghapus tradisi ini bukan hanya akan menghilangkan mata pencaharian mereka, tetapi juga hal yang sangat penting yang menjadi landasan pembangunan rasa kebersamaan sebagai masyarakat dan identitas mereka. Poros Photo mengikuti kehidupan sehari-hari penduduk desa Lamalera dan mengambil foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan perburuan paus. Sebuah pameran foto dan film diselenggarakan dan sebuah buku berisi esai tentang foto-foto tersebut diterbitkan untuk menyampaikan pesan bahwa praktik perburuan paus

yang dilakukan oleh masyarakat adat berbeda dari perburuan paus komersial. Tanggapan terhadap pameran dan publikasi Poros Photo bervariasi. Beberapa menganggap bahwa strategi komunikasi tersebut efektif. Dengan membuat sesuatu yang lebih dari sekadar dokumentasi sederhana tentang pengamatan dan pengetahuan lokal, penggunaan pameran interaktif dan multimedia menghadirkan kemungkinan baru untuk merekam dan berbagi pengamatan dan pengetahuan lokal. Rekaman audio dan video mendokumentasikan pengamatan, pengetahuan dan narasi seperti yang diceritakan oleh pemilik pengetahuan dan masyarakat dalam bahasa pilihan mereka sendiri. Untuk menambah dimensi visual, Poros Photo menyertakan foto-foto dan visualisasi lainnya untuk melengkapi proses dokumentasi pengetahuan. Untuk memperkuat pesan dan gerakan yang mendukung, berkarya melalui media (termasuk media sosial) adalah strategi komunikasi lainnya yang efektif.

Siapa yang harus dipengaruhi

Secara umum, dalam usaha untuk memengaruhi penyusunan kebijakan, mitra jarang secara langsung melibatkan pembuat kebijakan utama. Sebagai gantinya, mereka bekerja sama melalui orang yang berada di sekitar pembuat kebijakan utama, seperti legislator dan administrator yang berpengaruh, serta pengambil keputusan di masyarakat atau pemimpin lokal dan masyarakat yang berpengaruh. Keterlibatan agen perubahan yang bekerja sama dengan mitra bervariasi dalam hal posisi dan peran dalam proses integrasi pengetahuan ke dalam kebijakan. Di daerah yang memiliki struktur dan lembaga tradisional yang masih berpengaruh, agen perubahan utama yang harus dipengaruhi adalah pemimpin dan dewan masyarakat adat. Kelompok-kelompok ini bertugas sebagai organisasi perantara untuk menjangkau pembuat kebijakan. Jika pembuat kebijakan percaya bahwa masyarakat perlu dididik agar memiliki cara pandang dan pengetahuan seperti para pakar agar dapat memberikan partisipasi yang berarti dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan, maka

mitra harus terlebih dahulu mempengaruhi ilmuwan dari perguruan tinggi lokal untuk membangun kerja sama guna memperkuat legitimasi ‘ilmiah’ mereka. Apa yang mereka tawarkan kepada ilmuwan dari perguruan tinggi adalah legitimasi sosial dan akses terhadap data di masyarakat.

Meskipun mekanisme yang kami gunakan mendukung upaya-upaya kami untuk memengaruhi pembuat kebijakan, ini tidak berarti bahwa pembuat kebijakan akan menerima argumen dan bukti-bukti yang kami ajukan. Petani secara tradisional dianggap ‘objek dan sasaran’ dari semua program pemerintah, dan bukannya mitra pemerintah dalam mencapai tujuan nasional atau lokal dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, cerita dan bukti-bukti yang diberikan oleh petani tidak serta merta diterima. Dalam menanggapi argumen para ilmuwan dan petani, pembuat kebijakan akan mengacu pada persepsi, gagasan dan program mereka sendiri, yang di mata mereka terbukti ‘benar’ dan ‘efektif’ untuk menghasilkan perubahan dalam praktik pertanian. Kritik dan komentar sering dilontarkan oleh pembuat kebijakan alih-alih mendengarkan dan mencoba memahami argumen para ilmuwan dan petani. Meskipun di satu sisi mereka menerima pentingnya isu perubahan iklim, di sisi lain mereka memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan utama - meningkatkan produktivitas. Baik ilmuwan maupun petani dalam presentasinya harus mempertimbangkan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang pentingnya mengatasi ‘bahaya’ dan ‘ancaman yang akan segera terjadi’ yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dengan didukung oleh bukti, meskipun hal ini bertentangan dengan tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu meraih produktivitas tinggi. Media visual, seperti penayangan film, pameran foto dan produk petani itu sendiri, berikut presentasi PowerPoint dari para ilmuwan, adalah cara yang tepat untuk memengaruhi pembuat kebijakan. Namun, tanpa keterlibatan petani sendiri, setiap usaha untuk memengaruhi pembuat kebijakan tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. (PUSKA UI)

Lokalitas dan tempat merupakan hal yang berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan lokal, khususnya dalam upaya melembagakan pengetahuan lokal yang spesifik dalam kebijakan publik. Hal ini karena ‘lokal’ hanya dipandang sebagai latar belakang suatu tindakan. Misalnya, *melesi*, mekanisme masyarakat untuk berbagi beban di Sulawesi Tenggara, awalnya diterapkan di Kecamatan Ranomeeto dan kini akan diterapkan di Konawe Selatan melalui peraturan daerah. Kasus lain melibatkan kantor Bappeda Aceh Besar, yang mengembangkan pedoman operasi untuk menerapkan sistem *mawah* di kabupaten tersebut.

Berbagai pemangku kepentingan dan aktor penting yang memiliki informasi dilibatkan dalam berbagai tahapan. Mereka antara lain adalah kepala gampong, pemuka agama (Imuem Mukim, keuchik, keujruen, MAA, P3A) dan penyuluh pertanian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi secara komprehensif, sesuai dengan fakta di lapangan. Imuem Mukim (pemimpin tingkat kecamatan) dan keuchik (gampong) adalah tokoh penting untuk menggali pengetahuan lokal. Mereka juga bertindak sebagai perantara yang dapat mengkomunikasikan pengetahuan lokal kepada pemerintah. Bappeda tingkat Provinsi Aceh, Dewan Adat Aceh dan dinas terkait telah membahas mekanisme penerapan mawah dalam kebijakan tentang pengentasan kemiskinan, pendistribusian dana desa dan bantuan tunai desa dari pemerintah provinsi, serta program pemberdayaan ekonomi gampong dari instansi terkait. Pemerintah Aceh mengakui dan mendukung keberadaan mawah dengan menyusun Qanun (Peraturan Daerah), sehingga mawah, sebagai warisan Aceh, tidak terpinggirkan di tempat asalnya. (YKU)

Ketika proses penyusunan kebijakan dan konteks politik lokal bersifat tertutup, organisasi mitra mencoba memengaruhi masyarakat melalui ‘pendidikan populer’ guna menciptakan tekanan publik terhadap pembuat kebijakan, seperti dalam kasus di bawah ini.

Dalam struktur politik yang monolitik, dengan aktor politik yang

relatif homogen dan elite politik yang sangat dominan, proses penyusunan kebijakan ditentukan oleh segelintir orang. Dalam situasi ini, kami memberikan pendidikan populer untuk menciptakan tekanan publik yang semakin kuat dan konsolidasi antara berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang sama terhadap aksi kolektif. Konsolidasi aksi kolektif berguna sebagai proses pendidikan. Pengalaman yang diperoleh dari Belu dan Manggarai menunjukkan bahwa sejumlah aktor dan perantara memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan mengubah pengetahuan lokal menjadi kebijakan di bidang industri ekstraktif. Perantara ini melakukan lebih dari sekadar mentransformasikan pengetahuan lokal dari pengetahuan yang tidak diungkapkan secara langsung menjadi pengetahuan yang bersifat eksplisit; mereka berusaha untuk mengkonsolidasikan tindakan kolektif untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam di wilayah masing-masing (POLGOV)

Seperti yang kita lihat di Bab 2 dan 5, agama bisa menjadi unsur penting dalam membentuk pengetahuan lokal, yang berfungsi untuk menjaga keutuhan kelompok, sekaligus menjadi media yang mencerminkan dan menangani konflik identitas. Sejauh mana para pemimpin agama terlibat dalam proses penyusunan kebijakan sangat bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Misalnya, laporan dari POLGOV menunjukkan bagaimana Uskup Agung Ruteng (dan jaringan internasional Gereja Katolik) adalah salah satu kelompok yang lebih berpengaruh dalam proses penyusunan kebijakan di Manggarai dan Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, dalam upaya yang berkaitan dengan advokasi kebijakan anti-penambangan, POLGOV dan organisasi masyarakat sipil lainnya melibatkan para pemuka agama untuk memengaruhi proses penyusunan kebijakan di Manggarai. Aceh adalah salah contoh lainnya yang menggambarkan dengan baik bagaimana mitra dapat memperoleh dukungan dari kelompok agama dan kelompok adat.

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah salah satu pemangku kepentingan dalam struktur organisasi Pemerintah Aceh. MAA secara aktif mempromosikan Islam dan pengetahuan lokal dalam kebijakan pemerintah. Contohnya terjadi pada tingkat provinsi: MAA telah mempromosikan pengetahuan lokal dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 45/2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam pengelolaan irigasi. Dalam peraturan ini, istilah P3A dihilangkan dan digantikan dengan Keujruen Blang, yang menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur ini telah mengakui keberadaan pengetahuan lokal. Selanjutnya, MAA memasukkan pemberdayaan lembaga tradisional Keujruen Blang sebagai salah satu fokus programnya untuk tahun 2016. (PKPM Aceh)

Konteks politik dalam perubahan dari pengetahuan lokal menjadi kebijakan

Mitra-mitra kami menunjukkan mekanisme yang berbeda-beda dalam menggunakan pengetahuan lokal dan memahami konteks politik daerah untuk memengaruhi proses penyusunan kebijakan di berbagai situasi politik ekonomi. Secara umum, mereka menerapkan strategi dan pendekatan berikut:

Pengaruh berbasis hubungan

Mitra dan masyarakat kadang-kadang memobilisasi jaringan pribadi dalam melakukan pendekatan terhadap pembuat kebijakan dan orang-orang di sekitar mereka, membangun kepercayaan dan kemudian mengikuti proses hukum untuk memformalkan perubahan kebijakan. Dengan pendekatan ini, kredibilitas dan kekuatan argumen mereka didasarkan pada kekuatan pribadi perantara, seperti dalam kasus berikut.

Kami secara intensif menciptakan pendekatan pribadi dan kelembagaan dengan pembuat kebijakan dan meyakinkan mereka bahwa apa yang sedang kami perjuangkan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang lebih penting dan memiliki nilai tambah dalam proses ini adalah kekuatan ikatan emosional. Ikatan

emosional ini menghancurkan jajaran birokrasi yang kadang-kadang mempersulit diskusi. Pendekatan informal dalam situasi tertentu akan mempermudah proses pembuatan kebijakan. Beberapa upaya komunikasi yang kami lakukan dengan lembaga terkait dan DPRK telah membuahkan hasil. DPRK sangat mendukung upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal tentang persawahan ke dalam kebijakan daerah. (PKPM Aceh)

Komunikasi tatap muka pribadi dengan para pembuat kebijakan yang dimaksud terbukti bermanfaat dan efektif dalam membangun sikap saling pengertian dan dalam menetapkan landasan bersama guna mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung Warung Ilmiah Lapangan. Kami merasakan hal ini setelah melakukan komunikasi pribadi dengan wakil Bupati Lombok Timur, dan kepala Dinas Pertanian di Indramayu. (PUSKA UI)

Melalui wawancara, kami membangun komunikasi dan melakukan pendekatan yang tidak dilakukan selama jam kerja. Terkadang kami berkomunikasi di rumah orang yang diwawancarai, sehingga prosesnya menjadi lebih lancar dan rileks. Intensitas komunikasi dilakukan melalui pendekatan pribadi terhadap pemangku kepentingan terpilih di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD, yang juga menyusun kebijakan. Komunikasi dilakukan di luar kegiatan formal, misalnya dengan berkunjung ke kantor mereka. Hal ini bertujuan untuk mendukung usulan usulan yang sedang dikembangkan, dan untuk mengetahui tanggapan dan pandangan para pemangku kepentingan. Mitra lokal yang berasal dari masyarakat sipil dan jaringannya dapat memainkan peran penting dalam membantu membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, baik dengan pemerintah daerah maupun pemimpin adat. Kami menyerahkan naskah kebijakan dalam diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang disambut positif oleh para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam diskusi, seperti staf sekretariat daerah, Bappeda, Bapedal, Dinas Kelautan dan Perikanan, anggota DPRD, tokoh adat dan pemuka agama. Diskusi

tersebut menyetujui rekomendasi yang berasal dari penelitian ini, dan meminta tim untuk menindaklanjuti rekomendasi ini dengan mengkonversikannya menjadi makalah akademis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep, tujuan dan sasaran. (PATIRO)

Pengetahuan lokal sebagai aset pilkada

Dalam pemerintahan yang terdesentralisasi seperti Indonesia dengan pemilihan kepala daerah langsung, pengetahuan lokal dapat digunakan untuk meyakinkan pengambil keputusan tentang praktik-praktik yang terjadi di masyarakat. Advokat mengandalkan dimensi politik pengetahuan lokal sebagai manifestasi aspirasi kelompok yang berkepentingan, dan bukannya faktor penjelasan teknis ('efisiensi'). Ketika Pikul mengajukan bukti kepada pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur bahwa sistem irigasi lokal lebih efektif, bukti tersebut diterima bukan karena solusi teknis yang ditawarkan lebih baik, namun lebih karena sistem tersebut diterima oleh sejumlah besar orang yang mewakili pemenang pilkada. Pesan ini membuat politisi lokal menjadi lebih sadar tentang solusi yang berasal dari daerahnya sendiri.

Dalam banyak kasus, praktik lokal dikomunikasikan sebagai aspirasi atau kepedulian bersama para pemilih pembuat kebijakan. 'Politisasi' pengetahuan lokal ini bisa terjadi karena pengetahuan lokal dapat berfungsi sebagai identitas sosial, yang merupakan salah satu basis utama dukungan politik.

Dalam proses integrasi pengetahuan ke dalam kebijakan, dibutuhkan kapasitas untuk mengidentifikasi, melahirkan dan menyebarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh, dari dan melalui masyarakat, namun hal ini saja tidak cukup. Pengalaman sering menunjukkan bahwa kemampuan untuk membangun strategi dan taktik politik merupakan faktor penentu. Di satu sisi, kapasitas politik semacam ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang untuk masuk ke dalam struktur politik, terlibat dalam pendidikan politik di tingkat

akar dan membangun kesadaran serta tekanan publik melalui tindakan kolektif. Di sisi lain, ini adalah kemampuan bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait dan berpengaruh terhadap proses kebijakan. Kemampuan politik ini sama pentingnya dengan kemampuan teknokratis untuk menghasilkan pengetahuan yang akan dijadikan bukti dalam proses kebijakan melalui serangkaian metode ilmiah yang dianggap sah dan logis. (POLGOV)

Pemahaman pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya pengetahuan lokal dalam merumuskan kebijakan telah meningkat. Contohnya adalah keterlibatan Wakil Bupati Aceh Besar dalam kerja sama dengan berbagai pihak untuk merevitalisasi Keujruen Blang. Keterlibatannya termasuk membuka akses dan jalur politik agar PKPM lebih mudah melakukan advokasi tentang hasil penelitian. Berdasarkan wawancara dengan peneliti PKPM, Wakil Bupati bersedia memberikan dukungan, karena hal ini akan memberinya kesempatan untuk meningkatkan popularitasnya dalam pemilihan berikutnya. DPRK Aceh Besar memasukkan catatan kebijakan PKPM dalam program legislasi 2017, dan Ketua DPRK memerintahkan DPRK untuk kerja sama dengan PKPM dalam menyusun peraturan daerah (Qanun) tentang Pemberdayaan Keujruen Blang. (PKPM Aceh)

Kearifan lokal merupakan unsur yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun kebijakan untuk membangun kota yang ramah lingkungan yang beradaptasi dengan perubahan iklim global. DPRD Banjarmasin sepakat untuk mendengarkan saran-saran LK3 dalam beberapa kesempatan terkait dengan isu-isu seperti pengelolaan sungai, rumah lanting, izin mendirikan bangunan dan gedung, pengaturan dan penggunaan batas sungai, termasuk bekas sungai. Peraturan daerah ini, seperti yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh LK3, perlu direvisi sesuai karakteristik budaya masyarakat Banjar.

Namun, pendekatan ini mengandung risiko. Dalam ranah politik, ada garis tipis antara lokalisme, populisme dan diskriminasi. Meskipun kami

tidak menemukan contoh yang jelas di kesepuluh lokasi penelitian kami, hal ini merupakan fenomena umum di Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh organisasi yang bergelut dengan hak asasi manusia Indonesia (ELSAM, 2008) menyajikan penerapan peraturan daerah di tiga kabupaten (Garut, Bulukumba dan Padang). Penelitian ini menemukan banyak peraturan, meskipun menggunakan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal sebagai rujukan utama, yang seringkali bersifat eksklusif dan diskriminatif. Misalnya, Perda No 6/2003 yang diterapkan di Bulukumba memaksa masyarakat adat Toraja untuk memeluk agama Islam agar mereka dapat memiliki tanah atau menikah. Apa yang kami temukan dalam penelitian kami, bagaimanapun, adalah contoh yang menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dimonopoli oleh kelompok masyarakat tertentu dan mengesampingkan kelompok lainnya, sehingga mempertajam ketidaksetaraan. Pola pengumpulan, pengkodean, analisis dan penerjemahan pengetahuan lokal ke dalam kebijakan publik dapat menarik pengetahuan lokal ke dalam perangkat kelembagaan, yang menjauh dari konsep lokalitas yang terkandung dalam pengetahuan lokal, dan masuk ke dalam konsep populisme dan diskriminasi terhadap kelompok pendatang. Kita harus berhati-hati agar tidak mengubah pengetahuan lokal, atau menerimanya begitu saja.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang penerapan kebijakan

Masyarakat dan mitra dapat menekan para penyusun rencana agar mereka menemukan cara-cara baru guna memadukan keahlian ilmuwan dengan wawasan dari pengetahuan lokal yang berasal dari masyarakat. Mitra bekerja sama dengan masyarakat yang menghadapi risiko lingkungan yang paling serius untuk menggugat pembedaan antara pakar dan orang awam.

Pada dasarnya, kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan bukti. Secara tradisional, sebagian besar bukti berasal dari organisasi atau lembaga yang sudah diakui kepiawannya dalam mengidentifikasi

dan melahirkan pengetahuan dengan cara yang logis dan ilmiah, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga ‘think tank’ dan lain-lain. Kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa bukti mungkin berasal dari pengalaman orang melalui berbagai latar belakang mereka, baik yang terlatih secara formal dan yang belajar dari pengalaman sehari-hari. (POLGOV)

Fasilitator dari LAHA mendirikan ‘Jaring Aspirasi Masyarakat’ melalui berbagai pendekatan (mengadakan diskusi kelompok, mewawancarai pasien rawat inap di rumah sakit dan melakukan survei rumah tangga) untuk memperoleh bukti dan pengalaman tentang kebijakan pendanaan asuransi kesehatan pemerintah (BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). LAHA mengumpulkan data tentang biaya riil yang dibayarkan oleh peserta BPJS, kemudian menyerahkannya sebagai bukti untuk dinegosiasikan dengan petugas BPJS, kantor dinas kesehatan dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi pembiayaan kontekstual. Kegiatan ini mendorong pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan antara perhitungan biaya kesehatan BPJS dan kebutuhan riil masyarakat dengan memberikan layanan pelengkap untuk asuransi kesehatan di daerah. (LAHA)

Ada juga kasus yang menunjukkan bahwa pandangan yang menonjol dalam pengetahuan di masyarakat melengkapi hasil kerja para pakar. Tugas mitra adalah meyakinkan pembuat kebijakan dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, dan dalam prosesnya, seperti yang dibahas pada Bab 2 Bagian 3, meningkatkan mutu kebijakan publik dan peluang untuk penerapannya. Mitra memfasilitasi ‘hibridisasi’ wacana profesional dengan pengalaman lokal, dan pada akhirnya mendukung ‘pengilmiahian’ pengetahuan lokal di satu sisi dengan legitimasi demokratis yang lebih luas untuk kepastian ilmiah di sisi lain. Strategi ini dipilih karena mendukung pesan bahwa pengetahuan lokal itu baik dan tidak selalu mudah. Mitra melaporkan beberapa tanggapan kritis yang

menanyakan, “Jika pengetahuan tradisional begitu baik, mengapa masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut begitu miskin?”

Sejak melakukan penelitian, peneliti PUSKA UI telah bekerja sama dengan masyarakat. Mereka telah menggunakan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lokal yang ada untuk menerapkan aksi-aksi adaptasi yang tepat terhadap perubahan iklim. Hal ini telah menyebabkan terjadinya peningkatan pengetahuan dan kesadaran berkat materi-materi yang dihasilkan terkait dengan adaptasi terhadap perubahan iklim berbasis masyarakat yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dan lokal, misalnya demonstrasi lapangan, video dan poster. Anggota masyarakat dan pejabat pemerintah bertemu di Warung Ilmiah Lapangan untuk membahas hasil-hasil penelitian dan penerapannya dalam kebijakan dan praktik. Hal ini sangat penting mengingat fluktuasi suhu dan curah hujan yang tidak menentu yang menimbulkan kekhawatiran bagi petani. Pertemuan ini juga menciptakan peluang untuk menghubungkan pengetahuan yang bersifat ‘bottom-up’ dengan dukungan yang bersifat ‘top-down’. Kami memahami bahwa advokasi dalam mempromosikan Warung Ilmiah Lapangan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah perlu didukung dengan kuat oleh bukti-bukti ilmiah. Bukti-bukti ini didasarkan pada fenomena empiris lokal yang baru yang akrab bagi petani dan pembuat kebijakan, serta tidak semata-mata didasarkan pada pengetahuan komparatif dan penemuan dari daerah manapun di dunia. Penemuan petani sendiri merupakan bagian penting untuk memperkuat argumen dan gagasan para ilmuwan. (PUSKA UI)

Sebagai bagian dari strategi advokasi tentang kegiatan lingkungan dan penambangan di Belu (Nusa Tenggara Timur), POLGOV mendukung masyarakat yang terdampak untuk bekerja sama dengan beberapa jaringan LSM nasional: kelompok hak-hak masyarakat adat (AMAN), lingkungan (WALHI) dan anti-pertambangan (JATAM). Mereka menemukan beberapa mekanisme yang efektif dalam memengaruhi

kebijakan, seperti menggunakan jaringan lokal yang ada, di antaranya jaringan ilmuwan lokal, jaringan LSM lokal dan jaringan staf penyuluh pertanian lokal. Petani sendiri sering memainkan peran penting.

Pilihan untuk menyelenggarakan forum komunikasi dalam bentuk 'lokakarya' dan bukannya 'seminar' memberikan peluang untuk menyampaikan pengetahuan berbasis bukti di forum, dan untuk memberikan kesempatan berdialog di antara semua pihak. Keterlibatan pihak-pihak yang melahirkan pengetahuan itu sendiri, baik dari komunitas ilmuwan maupun petani, dalam menyampaikan pengalaman, pengetahuan dan bukti-bukti, serta menyuarakan pendapat mereka dalam dialog dengan para pembuat kebijakan terbukti bermanfaat dalam memengaruhi pemikiran, pengetahuan dan sudut pandang pembuat kebijakan. Ajang untuk menyajikan bukti dan mendiskusikan alasan-alasannya bukan merupakan hal yang biasa terjadi dalam tradisi alih teknologi yang bersifat 'top-down' saat birokrat bermaksud untuk mengalihkan teknik dan bukannya pengetahuan. (POLGOV)

Mekanisme lain yang digunakan oleh mitra untuk memengaruhi proses penyusunan kebijakan adalah memberikan *'reality check'* atau umpan balik kepada pembuat kebijakan mengenai dampak kebijakan yang sudah ada. Salah satu pendekatan berdasarkan mekanisme ini adalah memberikan bukti empiris tentang 'keadilan distributif'. Mitra menyoroti masalah, alternatif, peluang dan solusi. Misalnya, dengan mengungkapkan siapa yang mendapatkan apa dan berapa banyak dari industri pariwisata di Lembata, masyarakat dapat menyoroti beban dan manfaat yang tidak berimbang yang mereka peroleh dari industri pariwisata setiap hari. Ketika masyarakat bertanya apakah kebijakan Pemerintah kabupaten Lembata tentang pariwisata mendistribusikan manfaat dan beban secara adil, mereka menanyakan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang dirugikan, sehingga hal ini memberikan *reality check* tentang dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pemerintah Lembata

mengeluarkan peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata untuk melindungi mekanisme pembagian pendapatan daerah. Dalam kasus *melesi* di Sulawesi Tenggara, mitra mengumpulkan data dan pengalaman dari masyarakat tentang penggunaan skema asuransi BPJS Kesehatan. Mereka kemudian menyelenggarakan seminar dengan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan perspektif masyarakat mengenai pelaksanaan BPJS. Seminar tersebut memberikan bukti empiris tentang keterbatasan dan tantangan kebijakan BPJS Kesehatan dan bagaimana sistem lokal *melesi* dapat melengkapi sistem formal.

Kesimpulan: Memperbaiki kebijakan publik dengan memanfaatkan aset lokal

Penggunaan pengetahuan dan bukti dalam kebijakan publik telah menjadi topik diskusi yang populer selama dekade terakhir. Banyak penelitian dan proyek yang memusatkan perhatian pada bagaimana bukti dapat digunakan dengan lebih baik dalam kebijakan publik untuk meningkatkan potensi keberhasilannya. Pembuat kebijakan tidak hanya mengandalkan bukti untuk mengambil keputusan. Mereka harus mempertimbangkan masalah politik serta tekanan dari masyarakat, sektor usaha dan golongan oposisi. Namun ketika mereka sungguh-sungguh mengandalkan bukti, mereka cenderung mengutamakan bukti ilmiah. Akibatnya, pemilik pengetahuan lokal harus mengambil tindakan strategis agar pesan mereka disertakan dalam proses penyusunan kebijakan.

Literatur tentang kebijakan yang dipengaruhi oleh bukti secara umum memusatkan perhatian pada bukti ilmiah formal: bagaimana bukti tersebut digunakan, bagaimana sains dapat mengkomunikasikan bukti-buktinya dengan lebih baik agar dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, bagaimana pembuat kebijakan mendapat informasi yang lebih baik agar dapat mencari bukti dan menafsirkannya? Meskipun beberapa orang mengakui bahwa jenis bukti lainnya juga harus dipertimbangkan, cara untuk memperoleh bukti tersebut atau apa yang kita maksud dengan jenis bukti lainnya kurang mendapat perhatian. Pengecualian penting dalam hal ini adalah hasil penelitian yang didukung oleh *Centers for Disease Control* di Amerika Serikat (Puddy and Wilkins,

2011), yang menggolongkan tiga jenis bukti: bukti penelitian terbaik dan paling tepat (apa yang kita sebut pengetahuan ilmiah); bukti penelitian berdasarkan pengalaman yang paling luas dan keahlian (pengetahuan profesional); serta nilai-nilai dan perspektif orang atau masyarakat yang terkena dampak intervensi (pengetahuan lokal). Menurut kami, penggolongan tersebut tidak cukup luas, karena pengetahuan lokal diperlakukan sebagai nilai-nilai dan sudut pandang, dan bukannya sumber pengetahuan yang sesungguhnya.

Buku kami, yang didasarkan pada pengalaman yang dihasilkan melalui 10 studi kasus yang sangat beragam mengenai pengaruh pengetahuan lokal tentang kebijakan publik, merupakan sumbangan untuk memulai diskusi tentang apa yang kita maksud dengan jenis pengetahuan lainnya dan bagaimana pengaruhnya dihasilkan dari pengetahuan tersebut.

Kami memulainya dari premis yang mengatakan bahwa pengetahuan lokal merupakan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan publik, dan kami ingin lebih memahami bagaimana hal tersebut menjadi penting dan dari situ apa yang dapat kami pelajari tentang potensi pengetahuan lokal agar dapat menumbuhkan pengaruhnya. Kami menempatkan pengetahuan lokal sebagai salah satu dari tiga jenis pengetahuan: ilmiah, profesional dan lokal. Setiap jenis pengetahuan menggunakan basis bukti yang berbeda dan masing-masing memiliki peran. Bukti ilmiah berasal dari penelitian dan program percontohan yang menunjukkan nilai-nilai intervensi tertentu. Pengetahuan profesional berasal dari gabungan antara bukti-bukti dari sains, pengalaman para profesional, dan pengetahuan mereka tentang sistem formal dan informal - dengan kata lain menyatukan bukti dan konteks. Pengetahuan lokal berasal dari sejarah dan pengalaman warga dan masyarakat tentang bagaimana bertahan dan tumbuh dalam lingkungan mereka sendiri. Kami ingin lebih memahami mengapa hal itu penting dan apa implikasinya untuk masa depan guna meningkatkan kontribusi pengetahuan sehingga tercipta kebijakan publik yang lebih baik.

Perdebatan tentang bagaimana pengetahuan memengaruhi kebijakan publik semakin mengakui bahwa hal ini bukan hanya tentang 'apa yang

berhasil' sehingga kita tahu kebijakan mana yang dapat kita terapkan, tetapi juga tentang kebijakan apa yang berhasil untuk siapa dan dalam konteks apa (Pawson, 2006; Carden, 2009; Cartwright dan Hardie, 2012). Ini merupakan pengakuan bahwa konteks dan kekuasaan sangat penting dalam kebijakan publik. Tempat dan masyarakat yang berbeda, bahkan kelompok yang berbeda dalam masyarakat – laki-laki dan perempuan, muda dan tua, kaya dan miskin – semua terpengaruh oleh kebijakan baru dalam kadar yang berbeda. Apa yang kita lihat melalui studi kasus ini adalah bahwa pengetahuan lokal dapat memberikan kontribusi besar untuk lebih memahami konteks dan dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat yang berbeda dan di lokasi yang berbeda, khususnya bila ada kepentingan dan dukungan yang kuat untuk bersama-sama melahirkan pengetahuan.

Pengakuan tentang perlunya keragaman bukti dan pandangan dalam penyusunan kebijakan semakin penting di Indonesia, karena negara ini beralih ke sistem pemerintahan yang jauh lebih terdesentralisasi dengan semakin meningkatnya kekuasaan di tingkat daerah. Ada tuntutan terhadap kebijakan yang memperhitungkan kondisi lokal, dan toleransi yang rendah terhadap kebijakan nasional yang berlaku untuk semua daerah, terutama di negara dengan keragaman seperti di Indonesia, yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis di seluruh nusantara dengan lebih dari 17.000 pulau. Kesempatan dan kebutuhan untuk mengintegrasikan pengetahuan agar dapat menghasilkan kebijakan lokal yang sesuai sangat penting dalam konteks ini.

Menurut definisi, pengetahuan lokal tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Ada unsur politik dan kekuasaan yang harus dipertimbangkan. Kami melihat kasus yang menempatkan suatu klan atau keluarga dalam posisi berkuasa atas klan lain berdasarkan pengetahuan lokal yang dimilikinya. Selain itu, ada situasi-situasi yang membuat interpretasi terhadap pengetahuan lokal memperkuat kekuasaan satu kelompok masyarakat (biasanya laki-laki) atas kelompok yang lain, sehingga mempertajam ketidakadilan. Pengetahuan lokal tidak selalu tersebar dengan baik; apa yang sesuai untuk masyarakat yang satu belum tentu

sesuai untuk masyarakat lainnya, sehingga penerapan pengetahuan lokal terhadap suatu kebijakan tanpa pertimbangan yang matang dapat berakibat negatif, seperti yang dibahas dalam kasus peraturan daerah yang diskriminatif pada Bab 6.

Seperti halnya semua jenis pengetahuan, pengetahuan lokal berkembang perlahan-lahan dan dipengaruhi oleh dunia di sekitarnya. Pengetahuan lokal tidak kembali ke masa lalu, tetapi menjadi pengetahuan yang sangat modern, hidup, dan berkembang sehingga menjadi panduan dalam evolusi masyarakat. Bahkan dalam kasus yang dapat menelusuri pengetahuan hingga ke tahun 1600-an, perubahan selalu ada. Pengetahuan lokal dipengaruhi oleh peristiwa dan bencana yang terjadi secara mendadak, seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang menyapu bersih masyarakat sehingga pengetahuan lokal yang mengarahkan pola-pola ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya turut lenyap. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang mengancam pola pertumbuhan tradisional. Perpindahan penduduk, kedatangan kelompok dari budaya lain, dapat menimbulkan dampak: apakah norma-norma dan aturan yang dikodekan dalam pengetahuan lokal di suatu lokasi berlaku untuk pendatang dari wilayah lain? Bagaimana mereka belajar dan menyesuaikan peraturan ini dengan cara hidup mereka? Bagaimana benturan antara nilai-nilai diatasi ketika perburuan paus berubah menjadi tujuan wisata?

Tidak semua interaksi antara pengetahuan ilmiah, pengetahuan profesional dan pengetahuan lokal berakhir dengan baik, namun kami melihat bahwa ketiganya berpotensi untuk memberikan kontribusi agar tercipta suatu kebijakan yang jauh lebih kuat. Ada kasus-kasus yang dapat kita pelajari untuk melihat beberapa cara yang menunjukkan kerja sama antara pengetahuan lokal, profesional dan ilmiah guna menciptakan kebijakan yang lebih baik demi pembangunan sosial dan ekonomi. Pengetahuan yang dihasilkan bersama (*co-production*), dan integrasi berbagai jenis pengetahuan adalah alat yang ampuh untuk menyertakan bukti ke dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga memberikan legitimasi politis yang lebih luas. Karena hal ini dihasilkan melalui

partisipasi masyarakat, pengetahuan yang dihasilkan bersama akan memperbaiki kebijakan tersebut dengan membantu menangani kelayakannya dari segi teknis, politik, dan kelayakan ekonomi dan konteks.

Aset pengetahuan dan strategi

Berdasarkan penggalian tentang bagaimana pengetahuan lokal dikomunikasikan dan siapa yang perlu dipengaruhi, Bab 5 menggambarkan tiga strategi yang digunakan untuk menyertakan pengetahuan lokal dalam proses penyusunan kebijakan:

1. Strategi berbasis hubungan di seputar masalah komunikasi, tidak hanya dengan pembuat kebijakan, namun juga dengan kelompok dan individu lain yang memengaruhinya.
2. Memperlakukan pengetahuan lokal sebagai aset elektoral, menampilkannya sebagai aspirasi untuk menangani keprihatinan pemilih.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan bersama-sama melahirkan suatu pengetahuan, sehingga memberikan berbagai tekanan terhadap para pengambil keputusan agar mempertimbangkan apa yang ditawarkan oleh pengetahuan lokal.

Tidak satu pun dari strategi-strategi ini yang terjamin pengaruhnya, namun semuanya menunjukkan sifat politis yang terkandung dalam pengaruh suatu kebijakan dan bagaimana pemilik pengetahuan lokal terlibat. Sebagian terintimidasi oleh pengetahuan profesional, namun kasus-kasus di sini menggambarkan bahwa apabila pemilik pengetahuan lokal memiliki kepercayaan dan dukungan untuk terlibat dengan ilmuwan, birokrat dan politisi, mereka dapat membuat perbedaan. Strategi ini ditemukan dalam semua kasus dan menunjukkan bahwa apabila pengetahuan lokal dihargai dan menghargai, strategi tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan yang lebih relevan, namun juga yang lebih penting adalah kontribusi untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Intinya, pengetahuan lokal seringkali

tidak diperlakukan sebagai aset tetapi sebagai kewajiban yang menghambat masyarakat. Penerapan suatu kebijakan lokal sering berjalan dengan baik ketika para pemimpin daerah memperlakukan pengetahuan lokal sebagai aset penting yang perlu didukung secara politis.

Apa yang digambarkan oleh kasus yang kami sajikan adalah interaksi penting antara sumber pengetahuan lokal, profesional dan ilmiah. Namun interaksi ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Harapan, nilai-nilai dan keyakinan di balik setiap bentuk pengetahuan memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi. Di sini kami menyarankan bahwa melihat pertentangan di antara jenis-jenis pengetahuan ini akan membantu kita memahami interaksi tersebut.

Studi kasus yang kami tampilkan tentang pengetahuan lokal menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan publik merupakan arena politik ekonomi, dan oleh karena itu memerlukan kerja sama antara bukti-bukti teknis (argumen yang saling melengkapi antara pengetahuan lokal dan pengetahuan profesional dan pengetahuan ilmiah) dan upaya-upaya politik (partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah). Sifat yang saling melengkapi ini telah memberikan hasil yang positif dalam memengaruhi proses penyusunan kebijakan publik. Studi kasus menunjukkan bahwa mitra-mitra kami meyakinkan pimpinan daerah dengan berbagai cara dan intensitas untuk memastikan keberlanjutan inisiatif. Namun, kami juga menemukan bahwa pengetahuan lokal yang diterapkan untuk suatu praktik tidak serta merta membuat perbedaan pada proses penyusunan kebijakan tentang isu-isu yang lain. Organisasi lokal perlu meyakinkan pemimpin yang ditunjuk secara politis, tidak hanya para birokrat, bahwa inisiatif yang mereka lakukan akan memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan.

Ketika kita melihat kasus-kasus ini, kita menemukan sejumlah pertentangan atau tensi yang terjadi antara pengetahuan lokal dan jenis pengetahuan lainnya. Pertentangan merupakan cara untuk menggambarkan fakta bahwa 'pencarian nilai-nilai, tujuan dan manfaat yang bertentangan pasti menimbulkan tantangan tentang bagaimana

mencapai keseimbangan' (Patrizi dan Patton, 2009: 5). Intinya bukanlah untuk mengatasi pertentangan, karena tidak ada yang menang dan yang kalah. Pertentangan ini memang tidak dapat diatasi, karena merupakan bagian dari rangkaian yang kompleks dalam pengembangan pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menghargai perbedaan dan mengakui bahwa untuk menyatukan berbagai jenis pengetahuan, kontestasi perlu dikelola dan penyesuaian perlu dilakukan. Hal ini tercermin dalam rasa saling menghargai dan dukungan untuk membangun hubungan yang erat di antara semua jenis pengetahuan tersebut. Pertentangan yang dijelaskan di bawah ini tidak terjadi secara terpisah dari satu sama lain dan hanya dapat dipisahkan di sini agar dapat dijelaskan. Pertentangan tersebut berinteraksi satu sama lain dan saling memengaruhi. Cara seseorang memahami kepentingan yang berbeda memengaruhi semua pertentangan lainnya. Lima pertentangan besar tampak jelas dalam kasus yang kami sajikan di sini. Pertentangan berhasil ditangani ketika penghargaan terhadap berbagai sudut pandang melahirkan pengetahuan yang dilahirkan bersama dengan cara memadukan pengetahuan lokal, pengetahuan ilmiah dan pengetahuan profesional.

Prioritas audiens

Pertentangan yang pertama terjadi antara ketepatan ilmiah dengan partisipasi masyarakat, dan antara ketepatan ilmiah dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Setiap audiens memiliki prioritas masing-masing yang tidak selalu mudah untuk diselaraskan. Pertentangan ini disertai oleh pertentangan antara kepentingan dalam pengaruh setiap jenis pengetahuan terhadap kebijakan, dan pengaruh lain yang ada yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Salah satu aspek prioritas audiens adalah pertentangan antara fokus pada disiplin ilmiah dan fokus pengetahuan lokal yang lebih luas dari segi sistem, dan pembuat kebijakan yang bersikap cukup netral yang harus membuat keputusan di antara pengetahuan yang digunakan dan tekanan politik pada saat itu.

Definisi masalah

Pertentangan kedua terjadi adalah antara definisi masalah lokal yang

dimiliki oleh pemilik pengetahuan lokal dan definisi masalah regional/nasional/global yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan dan seringkali para ilmuwan. Pengetahuan lokal sangat dipengaruhi oleh konteks dan sangat spesifik, sedangkan sains berusaha untuk membuat generalisasi. Dalam hal sudut pandang tentang definisi masalah, perspektif ilmiah tentang objektivitas dan kenetralan sangat kontras dengan pendekatan berbasis nilai yang mendasari pengetahuan lokal. Dalam hal ini, pembuat kebijakan cenderung bersikap pragmatis. Di segala jenis pengetahuan, kita melihat pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*) terhadap definisi masalah. Ini merupakan isu horizontal yang tidak dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara satu jenis pengetahuan dengan jenis pengetahuan lainnya, namun tetap menjadi pertentangan dalam penggunaannya.

Satuan analisis

Pertentangan yang ketiga berkaitan dengan satuan analisis. Analisis pengetahuan lokal berada pada tingkat masyarakat dan dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sains lebih sering melihat pada analisis disipliner. Pertentangan terjadi antara jenis pengetahuan dan kelayakan politik, serta antara kepentingan dan sudut pandang elit kebijakan dengan pluralisme. Dalam keputusan yang berdasarkan satuan analisis, ketika birokrasi berusaha menciptakan peraturan berdasarkan pengetahuan lokal, mereka akan menemui risiko akan terlalu meluasnya jangkauan pengetahuan lokal tersebut dan penerapannya pada masyarakat yang tidak patuh atau setuju dengan peraturan tersebut. Dalam hal ini penting untuk mencocokkan tingkat pelaksanaannya.

Satuan dampak

Keempat, pengguna pengetahuan lokal memusatkan perhatian pada dampak terhadap masyarakat lokal, sedangkan sains tertarik pada dampak secara umum, dan pengguna pengetahuan profesional seringkali lebih tertarik pada sistem di tingkat nasional atau sistem global. Hasil yang ingin diraih juga berada dalam pertentangan, antara hasil dalam masyarakat itu

sendiri dan hasil yang berupa pertumbuhan pengetahuan. Bagi sebagian orang, pertumbuhan pengetahuan merupakan hasil terpenting. Bagi sebagian besar pemilik pengetahuan lokal, hasil yang utama berkisar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar mereka.

Sumber-sumber pengetahuan

Kita telah melihat bahwa apa yang kita sebut sebagai pengetahuan lokal terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah ‘kearifan lokal’ yang diwariskan secara turun menurun, contohnya praktik jaminan sosial *melesi* di Sulawesi Tenggara, praktik perburuan paus *sasi* di Nusa Tenggara Timur, dan praktik pembagian keuntungan *mawah* di Aceh. Yang kedua adalah pengetahuan kontemporer masyarakat. Pengetahuan ini merupakan bagian dari wacana kontekstual dan wacana hidup, yang diperebutkan melalui interaksi sehari-hari dan melalui interpretasi masyarakat dari berbagai bentuk pengetahuan yang merupakan bagian dari pengalaman hidup mereka. Bentuk pengetahuan ini menjadi modal sosial yang membuat seseorang menjadi warga negara dan membentuk masyarakat. Contohnya adalah agrometeorologi dalam bentuk baru yang digunakan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, bentuk perlawanan sehari-hari terhadap penambangan, serta pengelolaan air bersih berbasis masyarakat di Kupang dan Banjarmasin. Keduanya adalah jenis pengetahuan lokal yang sah, namun keduanya perlu dibedakan.

Peran baru, aturan baru

Penyusunan kebijakan seharusnya tidak semata-mata bergantung pada penilaian profesional atau menjadi bagian dari konsultasi yang sangat diatur dan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Masyarakat harus bisa mempertanyakan, menggugat dan melakukan penilaian dengan pemerintah. Para profesional perlu menjadi penasihat, advokat, penyusun solusi dan penengah, bukan pemilik pengetahuan. Pada Bab 3 kami membuat argumen untuk melakukan ‘de-profesionalisasi’ dalam bidang politik dan administrasi publik, sehingga mematahkan ‘tirani teknik’ (Fischer, 2009). Dengan perubahan positif, hal ini menjadi proses demokratisasi kebijakan publik - yang melibatkan masyarakat dalam

kebijakan publik, pengambilan keputusan dan proses penyertaan pengetahuan dalam penyusunan kebijakan.

Hal ini membutuhkan antara lain peran pengetahuan lokal yang lebih strategis dalam proses pembangunan dengan menetapkan kondisi politik dan etika yang kondusif bagi proses pembangunan. Hal ini memastikan agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang program yang sedang dipertimbangkan; dan informasi yang diberikan memadai, relevan dan dikemas dengan benar. Masyarakat harus mampu memahami informasi tersebut dan dapat menjadikannya sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Peran ini menggugat sistem representasi yang ada di masyarakat agar program-program menjadi inklusif – secara singkat, hal ini memastikan bahwa kepercayaan dan pengalaman hidup suatu masyarakat dapat menjadi titik awal dalam melakukan penelitian tentang budaya lokal dan tradisional; dengan meminjam judul buku Tuhiwai Smith (1999), *Decolonizing Methodology*.

Dalam paradigma de-profesionalisasi seperti itu, apa peran baru para pakar dan konsultan pembangunan? Peran tersebut bukan untuk sekadar menyediakan solusi siap pakai atau ‘praktik terbaik’, atau bahkan untuk menciptakan pengetahuan yang lebih maju, betapapun pentingnya hal yang terakhir ini di ‘era pascakebenaran’. Yang lebih penting adalah untuk membantu masyarakat agar terlibat dalam proses pertimbangan, mengenali pengetahuan yang mereka miliki dan memberi pendapat kepada mereka. Pakar dan konsultan perlu bekerja lebih jauh ke hulu, di tempat yang kadang-kadang disebut sebagai ‘lingkungan yang mendukung’, mendorong kesempatan yang sama dan peluang untuk menciptakan demokrasi substantif, serta kerja sama untuk melahirkan pengetahuan. Pakar dan konsultan dapat membantu masyarakat memahami dan mendiskusikan masalah-masalah rumit yang memengaruhi kehidupan mereka dengan menggunakan sumber pengetahuan yang berbeda. Kami berpendapat bahwa pengetahuan lokal harus dilihat sebagai bagian dari aspirasi politik dan kepentingan bersama, dan bukan pengetahuan ilmiah yang terpisah. Sehingga masalahnya tidak berkaitan dengan salah satu ‘kodifikasi pengetahuan’

yang ilmiah, melainkan tentang ‘pengetahuan siapa’ dan apa gunanya.

Pengelolaan negara yang lebih demokratis dan efektif serta kemitraan memerlukan praktik tata kelola yang lebih baik di tingkat daerah, nasional dan internasional. Tanpa bukti, pembuat kebijakan jatuh pada intuisi, ideologi, kebijaksanaan konvensional atau teori (Banks, 2009: 4). Seiring dengan terbentuknya kenyataan empiris tentang globalisasi, desentralisasi, privatisasi dan demokratisasi, mengungkapkan serangkaian hasil, urutan reformasi dan interaksi proses menjadi lebih penting. Reformasi kebijakan telah menjadi ‘perpaduan yang dinamis antara tujuan, peraturan, tindakan, sumber daya, insentif dan perilaku yang mengarah pada hasil yang hanya dapat diprediksi atau dikendalikan secara tidak sempurna’ (Brinkerhoff and Crosby, 2001:5).

Melangkah maju: kesempatan yang setara

Pilihan kebijakan yang terbaik sekalipun dapat melenceng dari tujuan jika kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan pengetahuan lain dan realitas politik serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pilihan kebijakan. Kami telah menyajikan kasus yang berkaitan dengan masalah ini. Misalnya, di Torong Besi, Nusa Tenggara Timur, kesehatan dan mata pencaharian masyarakat terdampak oleh kegiatan penambangan yang menimpa hutan lokal dan mencemari sungai. Upaya masyarakat untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang tidak membuahkan hasil, sehingga mereka mulai menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga advokasi bagaimana memanfaatkan pengetahuan lokal dan menggabungkannya dengan bukti-bukti ilmiah dan tekanan politik, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kita perlu menghubungkan berbagai jenis pengetahuan serta mengikuti perkembangan konteks politik. Untuk mengatasi krisis air bersih yang terus terjadi di Kupang, Pikul menggunakan pengetahuan lokal untuk menentukan pendekatan berkelanjutan terhadap pengelolaan air bersih dan menggabungkannya dengan solusi ilmiah dan rekayasa yang diperlukan untuk mulai meningkatkan persediaan air. Contoh ketiga berasal dari PUSKA UI yang bekerja sama

dengan petani melalui sekolah lapangan untuk menggabungkan ‘*hard science*’ (agrometeorologi) dengan pengetahuan tradisional tentang pola panen guna mengatasi tantangan di seputar perubahan iklim. Jika sekolah penjangkauan yang dikelola pemerintah gagal, Warung Ilmiah Lapangan yang dikelola oleh petani, yang merupakan hasil kerja sama antara Universitas Indonesia dengan asosiasi petani lokal, berjalan dengan lebih baik melalui kerja sama dengan masyarakat petani sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan. Dampak kebijakan serupa juga dapat dilihat dalam kasus lain yang kami sajikan.

Pengetahuan lokal tidak dapat tersebar jauh karena sifatnya yang terikat oleh waktu dan tempat, sehingga keberhasilan penggunaannya lebih banyak ditemukan pada proses penyusunan kebijakan di tingkat daerah daripada di tingkat nasional. Seperti yang telah kita bahas, berbagai jenis pengetahuan lokal telah dipadukan ke dalam praktik-praktik pembangunan di daerah, baik yang berkaitan dengan *melesi*, *mawah*, *Keujreun Blang* atau perburuan tradisional paus. Pencapaian ini dapat terwujud berkat dukungan berbagai institusi lokal, apakah itu kelompok adat, DPRD atau organisasi masyarakat. Kami tidak dapat mendokumentasikan kasus dengan praktik lokal yang tersebar atau direplikasi secara lebih luas, melebihi tingkat daerah. Mungkin ini adalah salah satu sifat pengetahuan lokal, yaitu terikat oleh tempat dan waktu. Sehingga tantangan yang dihadapi oleh mitra pembangunan (baik nasional maupun internasional) bukanlah masalah replikasi ‘praktik terbaik’, melainkan untuk mendukung masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mengkodifikasi dan menggunakan hasil-hasil pembangunan yang menangani masalah bersama: jaminan kesehatan, perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya dan akses terhadap keuangan.

Semua jenis pengetahuan dapat dianggap sebagai aset, dan hasil kerja mitra kami sangat mendukung pandangan tersebut. Artinya, pengetahuan memberi nilai tambah pada keputusan yang kita buat, bagaimana kita menerapkan keputusan tersebut, dan bagaimana kita belajar dan memperbaiki diri. Agar semua jenis pengetahuan dapat

diperlakukan sebagai aset, pertentangan di antara pengetahuan-pengetahuan tersebut perlu diidentifikasi dan ditangani. Keberhasilan yang kita lihat dalam kasus-kasus di sini terjadi karena adanya adaptasi dan penghargaan terhadap semua jenis pengetahuan, bahkan apabila terjadi pertentangan yang serius.

Ketika pengetahuan lokal diperlakukan sebagai aset, kita melihat manfaatnya baik untuk pengetahuan lokal itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan melalui kontribusinya terhadap proses kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya rasa saling menguntungkan dari lahirnya pengetahuan yang memadukan pengetahuan lokal dengan pengetahuan profesional dan ilmiah. Ketika peneliti dari perguruan tinggi memadukan pengetahuan lokal ke dalam penelitian mereka, dan tidak semata-mata memperlakukan masyarakat sebagai tempat yang nyaman untuk melakukan penelitian mereka sendiri, kami melihat ada manfaat yang muncul, misalnya dalam Warung Ilmiah Lapangan. Ketika birokrat melakukan hal yang sama, mereka dapat mengintegrasikan aspek-aspek pengetahuan lokal alih-alih menerapkan kebijakan baru dan belum teruji di masyarakat, seperti yang terlihat dalam kasus pengelolaan air bersih di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur.

Premis dasar yang kami tetapkan untuk membuktikan hal ini tidak berubah: pengetahuan lokal memperkaya kebijakan publik. Dalam kasus yang kami ajukan di sini, aset pengetahuan yang menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan opsi pengembangannya antara lain:

- **Pengetahuan lokal menghasilkan kebijakan yang lebih baik:** Contoh yang tepat adalah skema jaminan sosial berdasarkan *melesi* di Sulawesi Tenggara.
- **Pengetahuan lokal membuat kebijakan publik lebih mudah diterima dan kemungkinannya untuk diterapkan meningkat:** Sistem irigasi tradisional *Keujruen Blang* di Aceh berfungsi sebagai mekanisme umum untuk mendistribusikan air, dan juga tempat untuk menyelesaikan konflik di antara masyarakat.
- **Pemanfaatan pengetahuan lokal membuka kesempatan bagi aktor-aktor baru untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan:**

Pengetahuan lokal membuat proses penyusunan kebijakan lebih demokratis dan tidak dikendalikan oleh para pembuat kebijakan. Contohnya adalah konsultasi publik tentang pengelolaan hutan di Jawa Tengah dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh industri pertambangan terhadap masyarakat lokal.

- **Mengikutsertakan kelompok yang kurang terwakili dan terpinggirkan:** PKPM dapat merevitalisasi asosiasi petani adat dengan memobilisasi perempuan dalam konsultasi publik, dan LK3 dapat meningkatkan manfaat sungai yang lebih inklusif dengan menjangkau kelompok perempuan.

Bagaimana pengetahuan lokal memperkaya pengetahuan lainnya? Kita telah melihat di seluruh tulisan ini bahwa siklus yang membawa pengetahuan menjadi kebijakan sebenarnya bukan merupakan sebuah “siklus” sama sekali: ini adalah proses yang jauh lebih sulit dan rumit, sebuah proses politik yang terjadi di pusaran ‘energi politik, kepentingan pribadi dan lobi’ (Bank, 2009: 9). Temuan di sini didasarkan pada contoh kasus yang sedikit dan perlu verifikasi lebih lanjut dengan melihat kasus lain yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan lokal dalam kebijakan publik. Namun, kasus-kasus yang kami tampilkan menunjukkan bahwa ketika kita memperlakukan pengetahuan ilmiah, pengetahuan profesional dan pengetahuan lokal karena semuanya memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan untuk kepentingan penyusunan kebijakan publik, khususnya kebijakan di tingkat lokal dan regional, proses kebijakan tersebut akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Lebih dari sekadar pengetahuan yang berkontribusi terhadap perumusan kebijakan, pengetahuan lokal telah memainkan peran sentral dalam keberhasilan penerapan kebijakan, sebagian karena kebijakan tersebut lebih didasarkan pada konteks, sebagian lagi karena masyarakat mengenali asal-usul dan tujuan kebijakan tersebut.

Membangun hubungan guna menjembatani pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah memainkan peran penting. Kami melihat adanya nilai-nilai yang tinggi yang melekat pada pengetahuan ilmiah,

namun kasus-kasus yang kami hadapi juga menggambarkan bahwa pengetahuan ilmiah seringkali gagal dalam pelaksanaannya. Membangun waduk baru tanpa memperhitungkan bagaimana masyarakat mengelola pasokan airnya menyebabkan timbulnya limbah dan hilangnya sumber daya air. Menjembatani teknologi baru dengan pengetahuan dan pendekatan tradisional menghasilkan solusi yang jauh lebih baik. Pertentangan antara pariwisata dan perburuan paus membutuhkan dialog dan pembinaan hubungan. Keduanya dibutuhkan demi pembangunan masyarakat. Hubungan yang harmonis di antara keduanya telah tercipta di awal, namun pembinaan hubungan dan komunikasi yang berkelanjutan di antara kepentingan yang bersaing akan diperlukan.

Bersama-sama, aset pengetahuan ini telah meningkatkan pemahaman kita yang bersifat kontekstual tentang proses pembangunan di daerah, dan mulai memulihkan hubungan yang harmonis antara wacana praktis dan kebijakan publik dengan menyediakan forum untuk sumber-sumber pengetahuan sosial yang bersifat nonakademik, namun kaya.

Pustaka

- Ackerman, J. (2004) 'Co-governance for accountability: Beyond "exit" and "voice"', *World Development*, 32(3): 447–463.
- Agrawal, A. (1995) 'Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge', *Development and Change*, 26(3): 413–439.
- Andrews, M., Pritchett, L. and Woolcock, M. (2017) *Building state capability: Evidence, analysis, action*, Oxford: Oxford University Press.
- Andrews, M., Pritchett, L. and Woolcock, M. (2012) *Escaping capability traps through problem-driven iterative adaptation*, Harvard Kennedy School Working Paper RWP12-036, <http://www.cgdev.org/publication/escaping-capability-traps-through-problem-driven-iterative-adaptation-pdia-working-paper>.
- Antlov, H. and Wetterberg, A. (2013) 'Citizen engagement, deliberative spaces and the consolidation of post-authoritarian democracy', in Öjendal, J. and Dellnäs, A. (eds), *The imperative of good local governance: Challenges for the next decade of decentralization*, Tokyo: United Nations University Press.
- Antlov, H. and Hidayat, S. (2004) 'Decentralization by default in Indonesia', in Oxhorn, P., Tulchin, J. and Selee, A. (eds), *Decentralization, civil society, and democratic governance: Comparative perspectives from Latin America, Africa, and Asia*, Washington: Woodrow Wilson Center.
- Antlov, H., Wetterberg, A. and Dharmawan, L. (2016) 'Village governance, community life and the new Village Law in Indonesia', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2): 161–83.
- Armitage, D., Berkes, F., Dale, A., Kocho-Schellenberg, E. and Patton, E. (2011) 'Co-management and the co-production of knowledge: Learning to adapt in Canada's Arctic', *Global Environmental Change*, 21: 995–1004.
- Asian Development Bank (2012) *Indonesia: Water supply and sanitation sector assessment, strategy and road map*. Jakarta: Asian Development Bank

- Aspinall, E. and Mietzner, M. (2010) 'Problems of democratisation in Indonesia: An overview', In Aspinall, E. and Mietzner, M. (eds) *Problems of democratisation in Indonesia*, pp.1–20. Singapore: ISEAS.
- Australian Aid (2012) *Design document for the Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: the Knowledge Sector Initiative*, Jakarta: AUSAID.
- Bagir, Z. A. (2014) 'Advocacy for Religious Freedom in Democratizing Indonesia', *The Review of Faith & International Affairs*, 12(4): 27-39
- Banks, G. (2009) 'Evidence-based policy making: What is it? How do we get it?' ANU Public Lecture Series, Productivity Commission, Canberra, 4 February 2009 <https://ssrn.com/abstract=1616460>.
- Barnes, R. H. (1984) *Whaling off Lembata: The effects of a development project on an Indonesian community*, IWGIA Document 48, Copenhagen: International Workgroup on Indigenous Affairs.
- Bergold, J. and Thomas, S. (2012) 'Participatory research methods: A methodological approach in motion', *Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 13(1) Art. 30, <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1201302>.
- Bievre, D. (2007) 'The question of interest group influence', *International Public Policy*, 27(1): 1–12.
- Blair, H. (2000) 'Participation and accountability at the periphery: Democratic local governance in six countries', *World Development*, 28(1): 21–39.
- Borang, F., Cornell, A., Grimes, M. and Schuster, C. (2014) 'Bureaucratic politicization and political knowledge', Conference on the Quality of Government and the Performance of Democracies, http://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1530/1530009_bor--ng--cornell--grimes---schuster.pdf.
- Borkman, T. (1976) 'Experiential knowledge: A new concept for the analysis of self-help groups', *Social Science Review*, 50(3): 445–456.
- Boyte, H. C. (2004) *Everyday politics: Reconnecting citizens and public life*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Bratamihardja, Mulyadi Sunito, S. and Kartasubrata, J (2005) *Forest management in Java 1975-1999: Towards collaborative management*, Bogor: ICRAF Southeast Asia Working Paper No. 2005_1.

- Briggs, J. (2005) 'The use of indigenous knowledge in development: Problems and challenges', *Progress in Development Studies*, 5(2): 99–114.
- Brinkerhoff, D. W. and Crosby, B. L. (2001) *Managing policy reform: Concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries*, Bloomfield, CT: Kumarian Press.
- Briner, R. B., Denyer, D., and Rousseau, D. M. (2009) 'Evidence-based management: concept cleanup time?' *Academy of Management Perspectives*, 23(4), 19–32.
- Bryant, T. (2002) 'Role of knowledge in public health and health promotion policy change', *Health Promotion International*, 17(1): 89–98.
- Bubandt, N. (2014) *Democracy, corruption and the politics of spirits in contemporary Indonesia*, London and New York: Routledge.
- Cahyadi, R. (2012) 'Nelayan Dan Pertarungan Terhadap Sumberdaya Laut', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(2): 127–144.
- Campbell H. and Marshall, R. (2000) 'Public involvement and planning: Looking beyond the one to the many', *International Planning Studies*, 5(3): 321–344.
- Cannadine, D. and Price, S. (eds) (1987) *Rituals of royalty: Power and ceremonial in traditional societies*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Carden, F. (2009) *Knowledge to policy: Making the most of development research*, New Delhi and Ottawa: Sage and International Development Research Centre.
- Cartwright, N. and Hardie, J. (2012) *Evidence-based policy: A practical guide to doing it better*, Oxford: Oxford University Press.
- Chambers, R. (2012) *Provocations for development*, Rugby U.K.: Practical Action Publishing.
- Colbran, N. (2010) 'Prosperity denied', *Inside Indonesia*, 13 June 2010, <http://www.insideindonesia.org/prosperity-denied>.
- Cooke, B. and Kothari, U. (eds) (2001) *Participation: The new tyranny*, London and New York: Zed Books.
- Datta, A., Hendytio, M., Perkassa, V. and Basuki, T. (2016) *The acquisition of research knowledge by national-level decision makers in Indonesia*, Jakarta: Knowledge Sector Initiative, <http://www.ksi-indonesia.org/en/>

[news/detail/the-acquisition-of-research-knowledge-by-national-level-decision-makers-in-indonesia.](#)

- Denhardt, J. and Denhardt, R. (2007) *The new public service: Serving, not steering* (Expanded Edition), New York: M.E. Sharpe.
- Department of Foreign Affairs and Trade (2015) *DFAT women in leadership strategy: Promoting equality and dismantling barriers*, DFAT Canberra, November 2015, accessed 22 December 2016, <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/women-in-leadership-strategy.pdf>.
- Durose, C. and Richardson, L. (2016) *Designing public policy for co-production: Theory, practice and change*, Bristol U.K.: Policy Press.
- Easterly, W. (2015) *The tyranny of experts*, New York: Basic Books.
- ELSAM (2008) 'Pemantauan terhadap Implementasi Perda-perda Bermasalah', Jakarta: ELSAM publication, [http://lama.elsam.or.id/downloads/1269181690 Tulisan Monitoring Perda - surur.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1269181690_Tulisan_Monitoring_Perda_-_surur.pdf)
- Eyben R., Guijt, I., Roche, C. and Shutt, C. (2015) *The politics of results and evidence*. Rugby U.K.: Practical Action Books.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (n.d.) *Challenges to local knowledge*, <http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/007/y5631e/y5631e00.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2004) *Building on gender, agrobiodiversity and local knowledge*, Fact Sheet.
- Fischer, F. (2003) *Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices*, Oxford: Oxford University Press.
- Fischer, F. (2009) *Democracy and expertise: Reorienting policy inquiry*, Oxford: Oxford University Press.
- Flyvbjerg, B. (1991) *Rationality and power: Democracy in practice*, Chicago: Chicago University Press.
- Flyvbjerg, B. (2001) *Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fortier, J. (2014) 'Regional hunter-gatherer traditions in South-East Asia', in Cummings, V., Jordan, P. and Zvelebil, M. (eds) *The Oxford handbook of the archaeology and anthropology of hunter-gatherers*. Oxford: Oxford University Press.

- Fung, A. and Wright, E. O. (eds) (2003) *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*, London and New York: Verso Press.
- Gastil, J. and Levine, P. (2005) *The deliberative democracy handbook: Strategies for effective civic engagement in the twenty-first century*, San Francisco: Jossey-Bass.
- Gawande, A. (2016) 'The mistrust of science', *The New Yorker*, June 2016, <http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-mistrust-of-science>.
- Geertz, C. (1973) *The interpretation of cultures: selected essays*, New York: Basic Books
- Geertz, C. (1983) *Local knowledge: Further essays in interpretive knowledge*, New York: Basic Books.
- Gladwell, M. (2002) *The tipping point: How little things can make a big difference*, New York: Back Bay Books.
- Gledhill, J. (1994) *Power and its disguises: Anthropological perspectives on politics*, London and Boulder: Pluto Press.
- Glover, A. (2015) *Scientific evidence alone is not what people need or want to inform policy*, The Roberts Lecture 2015, www.sciencecouncil.org/content/scientific-evidence-alone-not-what-people-need-or-want-to-inform-policy.
- Gorski, P., Kim, D. K., Torpey, J. and Van Antwerpen J. (eds) (2012) *The post-secular question*, New York: New York University Press.
- Goss, J. (2000) 'Understanding the 'Maluku Wars': Overview of sources of communal conflict and prospects for peace', *CAKALELE*, 11 (2000): 7–39, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.3518&rep=rep1&type=pdf>.
- Goss, S. (2001) *Making local governance work: Networks, relationships and the management of change*, London: Palgrave.
- Grant, C. (2014) *Politics of knowledge: Whose knowledge matters in trypanosomiasis policy making in Zambia?* STEPS Working Paper 73, Brighton: STEPS Centre.
- Grenier, L. (1998) *Working with indigenous knowledge*, Ottawa: International Development Research Centre, http://hdrnet.org/214/1/Working_with_indigenous_knowledge.pdf

- Guggenheim, S. (2012) 'Indonesia's quiet springtime: Knowledge, policy and reforms', in Reid, A. (ed) *Indonesia rising: The repositioning of Asia's third giant*, Singapore: ISEAS.
- Hadiz, V. R. (2003) 'Power and politics in North Sumatra: The uncompleted *reformasi*', in Aspinall, E. and Fealy, G. (eds) *Local power and politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS.
- Hall, J. (2003) *Civil Society*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hayman, R. and Bartlett, J. (2013) *Getting to grips with evidence: How NGOs can tackle changing needs in the use of evidence and research*, Oxford: International NGO Training and Research Centre, Praxis Paper, November.
- Heaton, J., Day, J. and Britten, N. (2016) 'Collaborative research and the co-production of knowledge for practice: an illustrative case study', *Implementation Science*, (11): 20, <https://doi.org/10.1186/s13012-016-0383-9>.
- Hernandez, M. (2012) 'The politics of knowledge in policy analysis', *Pimatisiwin: A Journal of Aboriginal and Indigenous Community Health*, 10(2): 153–60.
- Hickey, S. and Mohan, G. (eds) (2004) *Participation: From Tyranny to Transformation?*, London: Zed Books
- Heryanto, A. (2015) 'Asia literacy: A deeply problematic metaphor', in Johnson, C., Mackie, V. and Morries-Suzuki, T. (eds) *The social sciences in the Asian century*, Canberra: Australian National University Press.
- Holmes, K. and Crossley, M. (2004) 'Whose knowledge, whose values? The contribution of local knowledge to education policy processes: A case study of research development initiatives in the small state of St Lucia', *Compare*, 34(2): 197–214, <http://dx.doi.org/10.1080/0305792042000214010>.
- Hood, C. (1991) 'A public management for all seasons?' *Public Administration Review*, 69(Spring): 3–19.
- Hunt, A. and Shackley, S. (1999) 'Reconceiving science and policy', *Minerva*, 37(2): 141–164.
- Ibrahim, R., van Tuijl, P. and Antlov, H. (2007) 'NGO governance and accountability in Indonesia: Challenges in a newly democratizing country', in Jordan, L. and van Tuijl, P. (eds) *NGO accountability: Politics, principles and innovations*, London: EarthScan.

- Ichimura, S. (1989) 'A conceptual framework of the political economy of policy-making', in Urrutia, M., Ichimura, S. and Yukawa, S. (eds) *The political economy of fiscal policy*, Tokyo: The United Nations University.
- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (2017) 'SAINS45, Indonesian science agenda towards a century of independence', Jakarta: AIPI, <https://www.aipi.or.id/index.php?pg=detilpublikasi&pid=58&type=2>.
- Jasanoff, S. (1990) *The fifth branch: Science advisers as policymakers*, Cambridge: Harvard University Press.
- Jasanoff, S. (2012) *Science and public reason*, London: Earthscan Books.
- Jasanoff, S. (ed) (2004) *States of knowledge: The co-production of science and social order*, London and New York: Routledge.
- Jones, H., Jones, N., Shaxson, L. and Walker, D. (2012) *Knowledge, policy and power in international development: A practical guide*, Bristol U.K.: Policy Press.
- Keefer, P. (2002) 'The political economy of corruption in Indonesia', World Bank, <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/FlagshipCourse2003/KeeferIndonesia.pdf>
- Keesing, R. M. (1991) 'Culture and Asian studies', *Asian Studies Review*, 15(2): 43–50.
- Kertzer, D. (1988) *Ritual, politics and power*, New Haven: Yale University Press.
- Kingdon, J. (1984) *Agendas, alternatives and public policies*, Boston: Little, Brown & Co.
- Kuhn, T. (1962) *The structure of scientific revolutions*, Chicago: University of Chicago Press.
- Laaksonen, M. (ed) (2006) *Local knowledge and international decision-making in development*, KEPA Working Paper no. 8 <https://www.kepa.fi/tiedostot/julkaisut/local-knowledge.pdf>.
- Lukes, S. (1974) *Power: A radical view*, London: Macmillan Education.
- Mangkusubroto, K., Sarwo Utomo, D. and Ramadhani, D. (2016) 'Supporting decision making for a republic under a complex system', in Mangkusubroto, K., Sarjono Putro, U., Novani, S. and Kijima, K. (eds) *Systems science for complex policy making: A study of Indonesia*, Springer Publishing.

- Manning, C. and Diermen P. van (eds) (2000) *Indonesia in Transition : Social Aspects of Reformasi and Crisis* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, Indonesia assessment series.
- Manor, J. (1998) *The political economy of democratic decentralization*, Washington: World Bank, Direction in Development.
- Martini, M. (2012) *Influence of interest groups on policy-making*, U4 expert answer no. 335, Bergen (Norway): Transparency International.
- Nadasdy, P. (2003) *Hunters and bureaucrats: Power, knowledge and Aboriginal-state relations*, Vancouver: University of British Columbia Press.
- Nagy Hesse-Biber, S. (2013) *Feminist research practice: A primer* (2nd edn), London: Sage.
- Najam, A. (1995) *Learning from the literature on policy implementation: A synthesis perspective*, Working Paper WP-95-61. Vienna: International Institute for Applied Systems Analysis.
- Nandy, A. (1989) 'Shamans, savages and the wilderness: On the audibility of dissent and the future of civilizations', *Alternatives*, 14(3): 263–277.
- Nasution, A. (2016) *Government decentralization program in Indonesia*, ADBI Working Paper 601, Tokyo: Asian Development Bank Institute, <https://www.adb.org/publications/government-decentralization-program-indonesia/>.
- National Research Council of the National Academies (2012) *Using science as evidence in public policy*, Washington, D.C.: National Academies Press.
- Needham, J., with Wang Ling (1956) *Science and civilization in China, Vol. 1: Introductory orientations*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nikijuluw, V. (1998) 'Identification of indigenous coastal fisheries management (ICFM) system in Sulawesi, Maluku and Irian Jaya', *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources Management*, 1(2): 40–51.
- Nordic Council of Ministers (2015) *Local knowledge and resource management: On the use of indigenous and local knowledge to document and manage natural resources in the Arctic*, Report of an International Symposium, Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

- Novaczek, I., Harkes, I. H. T., Sopacua, J. and Tatuhey, M. D. D. (2001) *An institutional analysis of Sasi Laut in Maluku, Indonesia*, International Center for Living Aquatic Resources Management Technical Report no. 59.
- Nugroho, Y., Prasetyamartati, B. and Ruhanawati, S. (2016) *Addressing barriers to university research*, Working Paper no. 8, Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Ofir, Z., Schwandt, T., Duggan, C. and McLean, R. (2016) *Research quality plus (RQ Plus): A holistic approach to evaluating research*, Ottawa: International Development Research Centre.
- Olivier de Sardan, J-P. (2005) *Anthropology and development: Understanding contemporary social change*, London and New York: Zed Books.
- Osborne, D. and Gaebler, T. (1993) *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*, New York: Plume Press.
- Parkhurst, J. (2017) *The politics of evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence*, Abington-on-Thames: Routledge Press.
- Parthasarathy, S. (2011) *Whose knowledge? What values? The comparative politics of patenting life forms in the United States and Europe*, Springer Science+Business Media, LLC.
- Patrizi, P. and Patton, M. (2009) 'Learning from doing: Reflections on IDRC's strategy in action', Ottawa: International Development Research Centre, accessed 6 July 2017, <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/47305>.
- Pawson, R. (2006) *Evidence-based policy: A realist perspective*, London: Sage Publications.
- Pellini, A., Alicia, M. D., Nguyen Thi Thu Hang and Permata Bachtiar, P. (2012) *Technically sound and politically achievable? A taxonomy of knowledge types and their influence on governance in three South-East Asian countries*, Background Note, London: Overseas Development Institute.
- Pimbert, M. (2001) *Reclaiming our right to power: Some conditions for deliberative democracy*, PLA Notes 40: Deliberative democracy and citizen participation, London: International Institute for Environment and Development.

- Pisani, E. and Buehler, M. (2016) 'Why do Indonesian politicians promote Shari'a laws? An analytic framework for Muslim-majority democracies', *Third World Quarterly*, 38(3): 734–752.
- Pisani, E., Kok, M. O. and Nugroho, K. (2017) 'Indonesia's road to universal health coverage: A political journey', *Health Policy and Planning*, 32(2): 267–276.
- Pritchett, L., Woolcock, M. and Andrews, M. (2010) 'Capability traps? The mechanisms of persistent implementation failure', Harvard: Kennedy School, [https://www.hks.harvard.edu/fs/lpritch/Governance/capability_traps\(june2010\).pdf](https://www.hks.harvard.edu/fs/lpritch/Governance/capability_traps(june2010).pdf).
- Priyono, A. E., Samadhi, W. P. and Törnquist, O., with Birks, T. (2007) *Making democracy meaningful: Problems and options in Indonesia*, Jakarta, Yogyakarta and Singapore: Demos and PCD Press with ISEAS.
- Puddy, R. W. and Wilkins, N. (2011) *Understanding evidence, Part I: Best available research evidence. A guide to the continuum of evidence effectiveness*, Atlanta, GA: Centers for Disease Control.
- Rakhmani, I. and Siregar, F. (2016) *Reforming research in Indonesia: Policies and practices*, Research Report, Jakarta: Global Development Network.
- Reinharz, S. (1992) *Feminism methods in social research*, Oxford: Oxford University Press.
- Relf, E. (1976) *Place and placelessness*, London: Pion.
- Rose, J. (2017) 'Brexit, Trump, and post-truth politics', *Public Integrity*, (0): 1–4, <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2017.1285540>.
- Russo, J. (2012) 'Survivor-controlled research: A new foundation for thinking about psychiatry and mental health', *Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 13(1), Art. 8, <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs120187>.
- Said, E. (1978) *Orientalism*, New York: Vintage Books.
- Sandel, M. J. (2012) *What money can't buy: The moral limits of markets*, New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Sandercock, L. (1998) *Making the invisible visible: A multicultural planning history*, Berkeley: University of California Press.

- Schaffer, F. (1998) *Democracy in translation: Understanding politics in an unfamiliar culture*, Ithaca: Cornell University Press.
- Scott, J. (1998) *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*, New Haven: Yale University Press.
- Seamon, D. and Sowers, J. (2008) 'Key texts', in Hubbard, P., Kitchen, R. and Vallentine, G. (eds) *Human Geography*, 2008, pp. 43–51, London: Sage.
- Sen, A. (1999) *Development as freedom*, New York: Knopf.
- Simpson, H., de Loë, R. and Andrey, J. (2015) 'Vernacular knowledge and water management—Towards the integration of expert science and local knowledge in Ontario, Canada', *Water Alternatives*, 8(3): 352–372.
- Siregar, P. R. and Crane, T. A. (2011) 'Climate information and agricultural practice in adaptation to climate variability: The case of climate field schools in Indramayu, Indonesia', *CAFÉ*, 33: 55–69. doi:10.1111/j.2153-9561.2011.01050.x
- Sjamsuddin, H. (2016) 'Dinamika Sosial Urang Banjar dalam Sejarah', Antasari Islamic State University, Banjarmasin <http://idr.uin-antasari.ac.id/6218/1/Dinamika%20Sosial%20Urang%20Banjar%20dalam%20Sejarah.pdf>
- Spencer, J. (2007) *Anthropology, politics and the state: Democracy and violence in South Asia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stokes, D. (1997) *Pasteur's quadrant: Basic science and technological innovation*, Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Suiter, J. (2016) 'Post-truth politics', *Political Insight*, 7(3): 25–27.
- Surowiecki, J. (2004) *The wisdom of crowds: Why the many are smarter than the few*, New York: Random House.
- Suryawan, I. N. (2017) *Papua versus Papua: Perubahan dan perpecahan budaya*, Yogyakarta: LABIRIN.
- Susskind, L. E. and Cruikshank, J. L. (2006) *Breaking Robert's rules: The new way to run your meeting, build consensus and get results*, Oxford: Oxford University Press.
- Taleb, N. N. (2010) *The bed of Procrustes: Philosophical and practical aphorisms* (1st printing), New York Edition: Random House.

- Tengö, M., Brondizio, E. S., Elmqvist, T., Malmer, P. and Spierenburg, M. (2014) 'Connecting diverse knowledge systems for enhanced ecosystem governance: The multiple evidence base approach', *Ambio*, 43(5): 579–591, Sweden: Stockholm Resilience Centre, Stockholm University.
- Thaman, R., Lyver, P., Mpande, R., Perez, E., Cariño, J. and Takeuchi, K. (eds) (2013) *The contribution of indigenous and local knowledge systems to IPBES: Building synergies with science*, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services Expert Meeting Report, UNESCO/UNU. Paris: UNESCO, <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002252/225242E.pdf>
- Törnquist, O. (2002) *Popular development and democracy: Case studies with rural dimensions in the Philippines, Indonesia and Kerala*, Oslo: Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
- Tuhiwai Smith, L. (1999) *Decolonizing methodologies: Research and indigenous people*, London: Zed Books.
- University of York (2012) *The co-production of knowledge*, <https://www.york.ac.uk/media/satsu/events-docs-images-media/publication.pdf>.
- van Klinken, G. (2000) 'What caused the Ambon violence?', *Inside Indonesia*, 60, <http://www.insideindonesia.org/what-caused-the-ambon-violence>
- von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K. and Brouwer, A. H. (1992) *Changing 'indigenous environmental law' in the Central Moluccas: Communal regulation and privatization of sasi*, Paper presented to the Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism at Victoria University, Wellington, August 1992.
- Vincent, J. (1990) *Anthropology and politics: Visions, traditions, trends*, Tucson and London: The University of Arizona Press.
- Weiler, H. (2009) 'Whose knowledge matters? Development and the politics of knowledge', in Theodor, H., Weiler, H. N. and Dickow, H. (eds) *Festschrift for Peter Molt: Entwicklung als Bberuf*, Baden-Baden: Nomos, pp. 485–496. Accessed 6 January 2017, http://web.stanford.edu/~weiler/Texts09/Weiler_Molt_09.pdf
- Weiss, C. H. (1997) *Evaluation* (2nd edn), Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall.

- Weiss, C. H. (1979) 'The many meanings of research utilization', *Public Administration Review* 39(5): 426-431.
- Wildavsky, A. and Pressman, J. L. (1973) *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland; or, why it's amazing that federal programs work at all*, Los Angeles: University of California Press.
- Wood, N. (2006) *Transmitting craft knowledge: Designing interactive media to support tacit skills learning*, Doctoral thesis, University of Sheffield Hallam.
- World Agroforestry Centre (ICRAF) (2014) *Local knowledge*, ICRAF policy guideline series, Jakarta: ICRAF.
- World Health Organization (2013) 'WHO traditional medicine strategy, 2014-2023', http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf?ua=1.
- Yanow, D. (2003) 'Accessing local knowledge', in Hajer, M. and Wagenaar, H. (eds) *Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society*, pp.228–246, Cambridge: Cambridge University Press.
- Yearley, S. (2000) 'Making systematic sense of public discontents with expert knowledge: Two analytical approaches and a case study', *Public Understanding of Science*, 9: 105–22.
- Zimmerman, T. (n.d.) *Tacit knowledge in post-bureaucratic organizations*, https://www.academia.edu/2101565/Tacit_Knowledge_in_Post_Bureaucratic_Organizations
- Zinnbauer, D. (2009) 'The role of investors in strengthening corporate integrity and responsibility', in *Global corruption report: Corruption and the private sector*, Transparency International. New York: Cambridge University Press. <https://transparency.hu/wp-content/uploads/2009/09/Global-Corruption-Report-2009-final-eng.pdf>



Knowledge Sector Initiative (KSI)

Ratu Plaza Office Tower 9th Floor

Jalan Jenderal Sudirman No. 9

Jakarta 10270 Indonesia

Phone : 62 21 7278 9921

Fax : 62 21 7278 9934

Email : ksicommunication@ksi-indonesia.org